



**PEMERINTAH KABUPATEN
PASAMAN BARAT**

Rancangan Akhir

**RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH
DAERAH
(RPJMD)**

TAHUN 2011 - 2015



Simpang Empat, Februari 2011



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

**RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT**

NOMORTAHUN 2011

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2011 - 2015**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah ke dalam sistem pembangunan Nasional, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. bahwa perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penganggaran serta sinergitas pembangunan antar daerah secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan, perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011 - 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat.
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 - 2025.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

dan

BUPATI PASAMAN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2011-2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah
3. Kepala daerah adalah Bupati Pasaman Barat
4. Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah perangkat daerah pada Kabupaten.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Bappeda atau sebutan lain adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
6. Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
7. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Rencana pembangunan jangka panjang daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana kerja pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
11. Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana kerja SKPD yang selanjutnya disingkat Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Rencana kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
14. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

15. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
16. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
18. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
19. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
20. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa.
21. Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas.
22. Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
23. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
24. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
25. Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
26. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
27. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan, yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
28. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
29. Rencana tata ruang wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional dan pulau/kepulauan ke dalam struktur dan pola ruang wilayah.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2010.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. SKPD didalam menyusun Renstra SKPD;
 - b. Pemerintah Daerah di dalam menyusun Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan tahunan;
 - c. Pemerintahan Nagari dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari

Pasal 3

SKPD melaksanakan program RPJMD yang dituangkan dalam Renstra SKPD sesuai tugas pokok masing-masing

Pasal 4

SKPD melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam menyusun Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Pasal 5

Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan ke dalam Renstra SKPD dan Renja SKPD

Pasal 6

RPJMD dimaksud pada pasal 2 ayat 1 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Daerah ini

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
pada tanggal 2011

Bupati Pasaman Barat

H. BAHARUDDIN, R

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH
Kabupaten Pasaman Barat

HERMANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2010 NOMOR

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang No. 25 Tahun 2004 tentang *Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional* (SPPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat periode 2011-2015 pada dasarnya merupakan penjabaran lebih kongkrit dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang terpilih dalam proses Pemilihan Umum Kepala daerah (Pemilukada). Dengan demikian, penyusunan rencana pembangunan ini adalah sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat daerah setempat yang tercermin dari hasil pemungutan suara dalam Pemilikada secara demokratis. Dokumen RPJMD ini disusun dalam rangka pelaksanaan dari amanat Undang-Undang tersebut di atas dalam kerangka penyusunan sistem perencanaan pembangunan daerah secara terpadu.

Penyusunan RPJMD ini dilakukan dengan berpedoman pada dokumen-dokumen RPJP Daerah, RTRW dan memperhatikan RPJM Nasional. Secara umum, RPJMD Kabupaten Pasaman Barat memuat kondisi umum daerah, strategi dan prioritas pembangunan daerah, kebijakan umum dan bidang pembangunan serta program dan kegiatan pembangunan Daerah. Dengan demikian, RPJMD priode 2011-2015 ini berisikan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah dalam kurun waktu masa bakti Bupati dan Wakil Bupati terpilih dalam rangka mewujudkan kondisi sosial dan ekonomi yang diinginkan oleh masyarakat setempat sebagai pelaksanaan dari arah pembangunan daerah lima tahunan kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) periode 2005-2025.

1.2. LANDASAN HUKUM

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Pasaman Barat ini dilakukan dengan menggunakan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

16. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah.
19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat 2005-2025.
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pasaman Barat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005 - 2025.

1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN

Sebagai dokumen perencanaan, RPJM Kabupaten Pasaman Barat ini mempunyai kaitan yang erat dengan berbagai dokumen perencanaan, baik nasional maupun daerah. Dalam lingkup perencanaan nasional, RPJM Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan memperhatikan RPJP dan RPJM Nasional dan dalam lingkup perencanaan provinsi mengacu pada RPJP dan RPJM Provinsi Sumatera Barat. Sementara dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, RPJM ini disusun dengan berpedoman pada RPJP Kabupaten Pasaman Barat. Selanjutnya RPJM Kabupaten Pasaman Barat menjadi pedoman bagi SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). RPJM Kabupaten Pasaman Barat juga dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan daerah berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2015 terdiri dari 8 bab yang berisikan :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang penyusunan rencana, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan.

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

Memuat gambaran umum tentang kondisi geografis dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum, Aspek Daya Saing Daerah sebagai dasar untuk melanjutkan pembangunan daerah untuk lima tahun berikutnya.

BAB III GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

Memuat Kinerja Keuangan Masa Lalu, Kebijakan Pengelola Keuangan Masa Lalu, Kerangka Pendanaan

BAB IV ANALISA ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis, yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah.

BAB V PENYAJIAN VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, yang merupakan aktualisasi target dan harapan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat terpilih.

BAB VI STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Memuat strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari strategi yang dipilih.

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Memuat hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indicator kinerja.

BAB VIII INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Memuat hubungan urusan pemerintah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab SKPD. Serta pencapaian target indicator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indicator kinerja pada awal perencanaan.

1.5 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat periode 2011-2015 dimaksudkan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi para pelaku pembangunan (Pemerintah, Swasta dan Masyarakat) dalam mendorong proses pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Disamping itu, RPJMD ini juga berfungsi sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD), dalam rangka

mewujudkan proses pembangunan daerah yang bersinergi dan saling menunjang secara makro dan lintas sektoral.

RPJMD Kabupaten Pasaman Barat ini bertujuan untuk menetapkan strategi dan kebijakan umum pembangunan daerah serta merumuskan program pembangunan selama lima tahun kedepan agar mekanisme perencanaan dan pembangunan daerah dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah Kabupaten Pasaman Barat dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis (RENSTRA) masing-masing SKPD.

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

a. Luas, Letak, Kondisi Geografis dan Penduduk

Kabupaten Pasaman Barat merupakan daerah yang dilalui garis katulistiwa yang terletak antara 0°03' Lintang Utara - 0°11' Lintang Selatan dan antara 99°10' - 100°04' Bujur Timur dengan luas wilayah sekitar 3.887,77 km² atau 9,29 % dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten ini terletak pada ketinggian antara 0 - 2.912 meter di atas permukaan laut. Gunung tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat yaitu Gunung Talamau dengan ketinggian 2.912 meter di atas permukaan laut. Sebahagian besar wilayah datar, sebahagian lagi berupa daerah berbukit, pegunungan dan pulau-pulau kecil. Dan didominasi juga dengan sebahagian wilayah lautan dan pesisir pantai. Topografi datar terdapat di Kab. Pasaman Barat di bagian barat Kecamatan Kinali, Luhak nan Duo, Sasak Ranah Pasisie, Pasaman, Sungai Aur, lembah Melintang dan Koto Balingka, sedangkan bergelombang hingga bergunung bagian timur dan utara kemiringan lereng antara 30 - 60% tersebar di seluruh kecamatan.

Dari luas wilayah daratan Kabupaten Pasaman Barat, yang dijadikan sebagai lahan permanen hanya sekitar 3,53 % (13.710 Ha). Bagian wilayah lainnya sebagian digunakan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan dan kegiatan lainnya yang bersifat non - fisik. Dominasi penggunaan lahan yang cukup besar di kabupaten Pasaman Barat adalah Perkebunan Rakyat sebesar 159.965 Ha atau (41,15), sedangkan untuk penggunaan lahan di sektor kehutanan menduduki urutan kedua dengan luas berkisar 132.428 Ha atau (34,06 %). Dengan kondisi pemanfaatan lahan tersebut, maka Kabupaten Pasaman Barat dapat dikembangkan sebagai kawasan budidaya untuk kegiatan permukiman, budidaya pertanian maupun untuk sarana dan prasarana perkotaan. Kabupaten Pasaman Barat memiliki banyak hutan yang dikategorikan dalam lima jenis peruntukan yaitu diantaranya untuk cagar alam dengan luas lahan sebesar 20.000. Peruntukan lainnya adalah hutan lindung dengan luas area 120.000 ha. Hutan produksi terbatas memiliki luas area sebesar 13.565 ha. peruntukan lainnya adalah hutan produksi, dimana luas areanya mencapai 18.600 ha

Pada sektor pertanian baru sekitar 60 % lahan sawah yang terjamin irigasinya, walaupun irigasi tersebut belum seluruhnya irigasi teknis dan setengah teknis. Dengan kondisi irigasi tersebut IP (Indek Pertanian) padi di wilayah ini telah mencapai 256%, hal ini terlihat dari luas pertanaman pada musim hujan yang mencapai 16.425 ha (lebih dari 159% dari pertanaman musim kemarau) lahan sawah yang dapat diusahakan untuk menanam padi. Di samping lahan sawah irigasi, kabupaten Pasaman Barat juga memiliki potensi lahan sawah lebak sekitar 30.000 ha. Lahan sawah lebak adalah lahan rawa yang tergenang karena meluapnya sungai, sehingga pada saat mulai surut lahan rawa tersebut dapat diusahakan untuk tanaman padi maupun palawija. Disamping untuk pengembangan padi sawah, lahan rawa lebak juga potensial untuk pengembangan tanaman jeruk dan jagung komoditas palawija yang paling menonjol di wilayah ini adalah jagung. Total luas pertanaman jagung di Kabupaten Pasaman Barat adalah 17.326,5 ha dengan sentra produksi di tiga Kecamatan yaitu kecamatan Kinali,

Pasaman, dan luhak nan Duo. Komoditas hortikultura yang perkembangannya menonjol di wilayah kabupaten Pasaman Barat yaitu jeruk, salak dan Alpukat. Luas Pertanaman jeruk di wilayah ini telah mencapai 2.505 ha. Pertanaman jeruk dikembangkan baik di lahan kering, maupun sawah lebak.

Secara administratif, Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari 11 Kecamatan dan 19 nagari dengan daerah dan batas wilayah sebagai berikut:

Bagian Utara : Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara.
 Bagian Timur : Kabupaten Pasaman
 Bagian Selatan : Kabupaten Agam.
 Bagian Barat : Samudera Indonesia.

Kabupaten Pasaman Barat terdiri atas 11 kecamatan, dimana kecamatan terluas adalah Kecamatan Koto Balingka 486.51 Km² (12.51 %). Dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisir merupakan wilayah yang relatif kecil yakni tercatat 123.31 Km² (3.17 %). Tabel 2.1 memberikan rincian luas wilayah menurut kecamatan.

Tabel 2.1
 Luas Daerah Kabupaten Pasaman Barat Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Ibu kotanya	Luas (km ²)	Jumlah		Persentase Luas (%)
				Nagari	Jorong	
1	Sungai Beremas	Air Bangis	440,48	1	12	11,33 %
2	Ranah Batahan	Silaping	534,88	2	30	9,13%
3	Koto Balingka	Parit	340,78	1	26	8,7%
4	Lembah Melintang	Ujung Gading	263,77	1	16	6,78%
5	Sungai Aur	Sungai Aur	420,16	1	22	10,81%
6	Gunung Tuleh	Simpang Tiga Alin	453,97	2	20	11.68%
7	Pasaman	Simpang Empat	508,93	3	22	13,09%
8	Sasak Ranah Pasisie	Sasak	123,31	1	7	3.18%
9	Luhak Nan Duo	Simpang Tiga	174,21	2	14	4,48%
10	Kinali	Kinali	482,64	2	13	12.41%
11	Talamau	Talu	324,24	3	20	8,34%
Jumlah			3.887,77	19	202	100%

Sumber : Profil Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Penduduk Kabupaten Pasaman Barat menurut hasil Proyeksi penduduk tahun 2009 berjumlah sebanyak 338.567 jiwa dengan komposisi 170.743 jiwa laki-laki dan 167.824 jiwa perempuan Dengan rasio jenis kelamin 102 jiwa laki-laki setiap 100 jiwa perempuan. Penduduk tersebut tersebar pada 11 (Sebelas) kecamatan di kabupaten Pasaman Barat.

Jika kita melihat distribusi penduduk perkecamatan, jumlah penduduk terbesar berdomisili di kecamatan pasaman yakni 54.556 jiwa. diikuti oleh kecamatan Kinali dengan jumlah penduduk 54.281 jiwa dan kecamatan lembah melintang 39.616 jiwa. sedangkan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dengan jumlah penduduk 13.200 jiwa Pasaman Barat. Namun jika di bandingkan dengan luas

wilayah, penduduk terpadat berada dikecamatan luhak nan duo dengan kepadatan penduduk 198 jiwa/ Km². diikuti oleh kecamatan lembah melintang dengan 150 jiwa/Km². Pada tahun 2009 jumlah rumahtangga dikabupaten Pasaman Barat sebanyak 79.766 rumah tangga. jika dibandingkan dengan jumlah penduduk didapat rata-rata penduduk per rumah tangga pada tahun 2009 dikabupaten Pasaman sebanyak 4 jiwa/ rumah tangga.

b. Topografi

Kabupaten Pasaman Barat keadaan tanahnya bervariasi antara datar, bergelombang, dan bukit bergelombang. Untuk melihat keadaan masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah:

No	Kecamatan	Ketinggian dari Permukaan Laut (mdpl)
1	Sungai Beremas	0-319
2	Ranah Batahan	23-753
3	Koto Balingka	0-811
4	Sungai Aur	0-1875
5	Lembah Melintang	15-725
6	Gunung Tuleh	26-1875
7	Talamau	225-2010
8	Pasaman	40-2913
9	Luhak Nan Duo	0-1250
10	Sasak Ranah Pasisie	0-10
11	Kinali	0-1332

Wilayah topografi Kabupaten Pasaman Barat antara berada pada ketinggian 0-2913 mdpl. Apabila dilihat dari ketinggian tersebut wilayah Pasaman Barat dapat dikategorikan kedalam 4 kondisi yaitu:

1. Daratan yang berada pada ketinggian sampai dengan 5 Meter dari permukaan laut. Satuan topografi ini, area daratan rendah seperti Sasak, Sikilang, Sikabau dan Air Bangi dan desa-desa pantai lainnya.
2. Daratan yang bergelombang di atas 15 meter
3. Kawasan bergelombang yang menuju kawasan perbukitan dengan ketinggian diatas 50 meter
4. Areak perbukitan dengan ketinggian sampai dengan 2913 meter diatas permukaan laut, yang sebahagian besar merupakan kawasan lindung.

c. Hidrologi

Hidrologi yang dimiliki Kabupaten Pasaman Barat yaitu berupa sungai yang tersebar di seluruh kecamatan. Sungai yang melintas di Kabupaten Pasaman Barat terdiri dari sungai besar dan sungai kecil yang berpola dendritik. Umumnya sungai-sungai besar dan kecil yang mengalir di wilayah kabupaten Pasaman Barat ketinggiannya tidak jauh berbeda dengan tinggi permukaan laut. Kondisi ini yang mengakibatkan cukup banyak bagian wilayah Kabupaten Pasaman Barat yang rawan banjir. Kondisi air tanah dalam di Kabupaten Pasaman Barat memiliki potensi yang cukup besar untuk pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat.

d. Klimatologi

Suhu udara di wilayah Kabupaten Pasaman Barat berkisar 20°C - 26°C dengan kelembaban udara 88%. Kecepatan angin di wilayah darat minimal 4 km/jam dan maksimal 20 km/jam. Dari hasil pemantauan stasiun Meteorologi, pada tahun 2008 dengan rata-rata curah hujan berkisar antara 48 mm - 691 mm dengan rata-rata curah hujan 345 mm/bulan, sedangkan jumlah hari hujan berkisar antara 6-22 hari dengan rata-rata 10 hari perbulan.

Berdasarkan iklim diatas, maka menurut Ferguson dan Scenet, Kabupaten Pasaman Barat tergolong pada jenis/tipe iklim A (sangat basah) atau tropika basah.

Tabel 2.2
Rata-rata Curah Hujan dan Jumlah Hari Hujan di Tempat-tempat Terpilih Tahun 2008

Bulan	XY	Simpang Tiga	Ujung Gading
Januari	X	493	830
	Y	12	17
Februari	X	413	424
	Y	10	13
Maret	X	383	1118
	Y	10	19
April	X	434	750
	Y	8	19
Mei	X	250	321
	Y	7	13
Juni	X	394	316
	Y	8	8
Juli	X	330	238
	Y	6	11
Agustus	X	291	408
	Y	11	11
September	X	156	768
	Y	11	11
Oktober	X	524	209
	Y	8	10
November	X	264,8	126
	Y	7	4
Desember	X	115	500,2
	Y	3	17
Rata-rata	X	337	500
	Y	8	13

Keterangan: X adalah curah hujan, Y adalah hari hujan

e. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Pasaman Barat sampai saat ini didominasi oleh pemanfaatan untuk perkebunan yaitu lebih dari 50% dari luas area yang terdiri dari perkebunan rakyat 71.338 Ha (26,47%) dan perkebunan besar yang dikelola oleh perseroan dan koperasi seluas 69.541 ha (25,80%). Sedangkan kawasan hutan (sudah termasuk hutan lindung) seluas 30.045 Ha (11,15%), untuk kawasan perairan dan rawa seluas 20.707 Ha (7,68%). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Tabel persentase luas lahan menurut jenis penggunaannya.

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	%
1	Perkampungan	8.344	3,10
2	Kawasan Industri	1.120	0,42

3	Sawah		
	- Irigasi	15.904	5,90
	- Tadah Hujan	11.156	4,14
4	Tegalan/Ladang	7.413	2,75
5	Kebun Campuran	13.939	5,17
6	Perkebunan Rakyat	71.338	26,47
7	Perkebunan Besar	69.541	25,80
8	Hutan	13.256	4,92
9	Tanah Belukar	30.045	11,15
10	Tanah Rusak	2.109	0,78
11	Perairan	20.707	7,68
12	Padang Rumput		
13	Hutan Sejenis		
14	Lain-lain	4.645	1,72
	Total	269.517	100

2.1.2. Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.3. Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan karakteristik wilayah untuk kabupaten Pasaman Barat dapat diidentifikasi beberapa daerah yang termasuk rawa bencana diantaranya:

a. Kawasan Rawan Banjir

Bencana alam yang sering terjadi di Kabupaten Pasaman Barat menurut analisis kebencanaan adalah banjir. Kawasan yang teridentifikasi rawan banjir adalah Kecamatan Pasaman, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kecamatan Luhak Nan Duo. Hal ini disebabkan karakteristik lahan berupa satuan bentuk lahan yang memiliki topografi dataran dan cekungan pada daerah aliran sungai.

b. Tsunami

Seluruh bagian pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan rawan bahaya tsunami. Untuk kawasan pesisir barat pada wilayah Kabupaten Pasaman Barat yaitu Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kecamatan Sungai Beremas, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kecamatan Kinali dan Kecamatan Sungai Aur.

c. Abrasi dan Tanah Longsor

Dari data yang ada, kawasan abrasi yang paling rawan adalah daerah pantai di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie. Dari tahun 2006, hampir tiap tahunnya terjadi bencana abrasi pantai. Untuk kawasan longsor di wilayah Pasaman Barat hanya terdapat di kecamatan Talamau yang dilintasi jalan menuju Lubuk Sikaping.

d. Rawan Gempa

Karena lokasi Pasaman Barat berada di bawah dua patahan besar yaitu pertemuan lempeng Eurasia dan Australia dengan jalur patahan Semangko Besar (ring of fire), maka seluruh kabupaten Pasaman Barat merupakan kawasan rawan gempa.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Menurut konsep Badan Pusat Statistik dan Bank Dunia (1988), analisis indikator peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat dilakukan dari beberapa aspek pula yaitu: dari sisi pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan per kapita dan pengeluaran per kapita, pengangguran dan kemiskinan, indeks pembangunan manusia, kesehatan, dan pendidikan. Karena itu di Indonesia

Badan Pusat Statistik mengeluarkan buku laporan pendapatan nasional untuk mengetahui perkembangan indikator ekonomi makro.

Meskipun pencapaian kinerja dari sisi indikator makro tersebut sampai sekarang ini kelihatannya masih diperdebatkan orang, karena sering para ahli menganggap bahwa capaian kinerja tersebut bukanlah menunjukkan kinerja Pemda semata, tetapi juga merupakan kinerja bersama antara pemerintah kabupaten, masyarakat serta swasta. Namun demikian keberhasilan capaian kinerja tersebut sudah tentu tidak terlepas dari semakin baik dan meningkatnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh Pemda.

Berdasarkan sifatnya aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan social, serta seni dan budaya. Untuk melihat gambaran umum aspek kesejahteraan masyarakat Pasaman Barat dapat dilihat pada uraian di bawah ini.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisa kinerja untuk focus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dilakukan pada indicator Pertumbuhan PDRB, PDRB Perkapita, Indeks Gini, Persentase penduduk diatas garis kemiskinan, angka kriminalitas tertangani.

a. Pertumbuhan PDRB

Pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten Pasaman Barat atas dasar harga konstan selama beberapa tahun terakhir ternyata mengalami peningkatan yang cukup tinggi dan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi secara rata-rata selama periode 2006-2009 ternyata mencapai sebesar 6,36%. Pada tahun 2006, laju pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten Pasaman Barat menurut harga konstan baru sebesar 6,36 %, dan kemudian meningkat menjadi sebesar 6,40% pada tahun 2008.

Terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan tersebut memberikan indikasi bahwa selama periode 2006-2009 telah terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat tersebut sudah tentu disebabkan oleh meningkatnya kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Pemda selama periode tersebut. Sebab dengan meningkatnya pelayanan terutama dalam penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan ekonomi yang dibutuhkan masyarakat, sudah tentu mampu mempercepat gerak roda perekonomian sehingga sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi atas dasar harga konstan ini tidak terlepas dari kontribusi yang diberikan oleh masing-masing sektor ekonomi yang ada. Secara umum, sektor yang memberikan kontribusi paling besar dalam perekonomian adalah sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor industri pengolahan. Adapun kontribusi masing-masing sektor yang dominan tersebut dapat menggambarkan perkembangan struktur perekonomian daerah kabupaten Pasaman Barat dari tahun ketahun.

Perkembangan pertumbuhan sektor pertanian terutama didukung oleh pesatnya pertumbuhan tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Dalam empat tahun terakhir pertumbuhan sektor lapangan usaha pertanian

rata-rata mencapai 7,29%. Sektor pertanian disamping memiliki pertumbuhan yang cukup pesat juga memberikan kontribusi cukup besar dan bahkan 231,96% dari total PDRB menurut harga yang berlaku di Kabupaten Pasaman Barat dalam empat tahun terakhir ini. Cukup besarnya kontribusi sektor pertanian ternyata belum diiringi oleh pertumbuhan industri pengolahan, sehingga sinergi antara output tanaman hulu ke hilir masih diperlukan beberapa tahun ke depan. Adapun selengkapnya tabel pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB Menurut Harga Konstan)
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2009

LAPANGAN USAHA	2006	2007	2008	2009	Rata-rata
1. PERTANIAN	7,29	7,42	7,30	7,16	7.29
a. Tanaman Pangan & Holtikultura	7,96	7,32	7,41		
b. Tanaman Perkebunan	7,29	3,52	12,33		
c. Peternakan & Hasil-hasilnya	6,92	6,12	6,24		
d. Kehutanan	6,62	5,01	5,09		
e. Perikanan	5,54	3,12	5,24		
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	5,13	4,02	4,10	4,11	4.34
a. Pertambangan Tanpa Migas					
b. Penggalian	5,13	4,02	4,10		
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	5,73	5,48	5,55	5,45	4.2
a. Industri Migas					
b. industri Tanpa Migas	5,73	5,48	5,55		
4. LISTRIK GAS DAN AIR BERSIH	6,45	6,45	6,28	6,67	6.4
a. Listrik	6,59	6,62	6,36		
b. Gas					
c. Air Bersih	5,28	5,06	5,60		
5. BANGUNAN	6,27	6,48	6,52	6,56	6.4
6. PERDAGANGAN, HOTEL & RESTORAN	7,13	7,49	7,39	7,04	7.2
a. perdagangan Besar & Eceran	7,17	7,52	7,42		
b. Hotel	5,92	6,02	6,18		
c. restoran	4,35	4,56	4,69		
7. PENGANGKUTAN & KOMUNIKASI	5,74	6,74	6,66	6,13	6.3
a. Angkutan	5,31	6,59	6,44		
1. Angkutan Kereta Api					
2. Angkutan Jalan Raya	5,23	6,58	6,63		
3. angkutan Laut Sungai, Danau & Penyeberangan					
4. Angkutan Udara					
5. Jasa Penunjang Angkutan	6,24	6,77	6,67		
b. Komunikasi	9,86	8,12	8,68		
8. KEUANGAN, PERSEWAAN & JASA PERUSAHAAN	5,36	5,24	5,48	5,64	5.43
a. Bank	5,27	5,12	5,30		
b. Lembaga Keuangan Tanpa Bank & Jasa penunjang	6,08	5,86	5,50		
c. Sewa Bangunan	4,98	5,02	5,92		
d. Jasa Perusahaan	5,37	4,68	5,60		
9. JASA-JASA	3,51	2,93	3,03	3,18	2.43
a. Pemerintahan Umum & Pertahanan	3,47	2,87	2,98		
b. Swasta	3,76	3,34	3,38		
1. Sosial Kemasyarakatan	4,69	3,96	4,24		

2. Hiburan & Rekreasi	4,43	4,24	4,36		
3. Perorangan & Rumahtangga	3,07	2,86	2,72		
Pertumbuhan Ekonomi Daerah	6,36	6,41	6,40	6,26	6,3

Sumber: BPS, *Pasaman Barat Dalam Angka* untuk beberapa tahun.

Salah satu aspek kesejahteraan masyarakat adalah pemerataan pendapatan yang merupakan aspek penting untuk terus dipantau perkembangannya, karena upaya pemerintah dalam pemerataan hasil pembangunan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan jangka panjang. Karena terjadinya ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok-kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kecemburuan sosial dan lain sebagainya.

b. Indeks Gini

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat ketimpangan pembagian (distribusi) pendapatan adalah Rasio Gini dan distribusi persentase pendapatan yang diterima seluruh masyarakat baik kelompok masyarakat berpendapatan rendah, berpendapatan sedang (menengah) dan kelompok masyarakat berpendapatan tinggi (kriteria Bank Dunia). Rasio Gini merupakan ukuran pemerataan yang dihitung dengan membagi luas antara garis diagonal dan kurva lorenz dengan luas segi tiga dibawah garis diagonal.

Berdasarkan hasil susenas tahun 2007 dan 2008 tampaknya telah terjadi pergeseran/perubahan indeks gini dan perubahan komposisi distribusi pendapatan seluruh masyarakat daerah Kabupaten Pasaman Barat menurut versi Bank Dunia. Besaran koefisien indeks gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Distribusi pendapatan antar penduduk di suatu daerah dapat dikatakan merata jika indeks gini mendekati angka 0, demikian juga sebaliknya distribusi pendapatan penduduk suatu daerah akan semakin tidak merata (timpang) jika indeks gini mendekati 1. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pemerataan distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2007 menghasilkan indeks gini 0,2470. Sedangkan pada tahun 2008 tercatat indeks gini sebesar 0,2206.

Tabel 2.5
Indeks Gini dan Sebaran Pendapatan Menurut Klasifikasi
Bank Dunia Tahun 2007 dan 2008

Tahun	Indeks Gini	Klasifikasi Bank Dunia		
		40% Pertama	40% Kedua	20% Ketiga
2007	0,2470	25,82	37,70	36,48
2008	0,2206	25,38	41,20	33,42

Sumber: Bappeda, *Evaluasi Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat 2006-2008*, Pasaman Barat 2009

Dengan adanya pergeseran indeks gini selama periode 2007-2008 memberikan arti bahwa pada tahun 2008 ketimpangan pendapatan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat sedikit lebih merata dibandingkan dengan distribusi pendapatan masyarakat yang terjadi pada tahun 2007. Kondisi ini memberikan arti yang baik, yakni semakin meratanya ketimpangan diantara kelompok penduduk.

Selanjutnya, jika dilihat distribusi pendapatan menurut klasifikasi Bank Dunia menunjukkan bahwa dari seluruh pendapatan masyarakat Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2008, sebesar 25,38% dapat dinikmati oleh 40% kelompok penduduk berpendapatan rendah. Sedangkan 40% kelompok penduduk berpenghasilan menengah memperoleh porsi pendapatan sebesar 41,20%. Sementara itu, sebesar 33,42% dari seluruh pendapatan dinikmati oleh sebanyak 20% kelompok berpenghasilan tinggi.

Kriteria yang disusun oleh Bank Dunia untuk mengetahui tingkat ketidakmerataan suatu daerah adalah sebagai berikut:

1. Jika 40% penduduk berpendapatan rendah memperoleh <12% dari total pendapatan, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi dianggap tinggi.
2. Jika 40% penduduk berpendapatan rendah memperoleh 12%-17% dari total pendapatan, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi dianggap sedang.
3. Jika 40% penduduk berpendapatan rendah memperoleh >17% dari total pendapatan, maka ketimpangan pendapatan yang terjadi dianggap rendah.

Sesuai dengan kriteria Bank Dunia diatas, maka hasil susenas tahun 2007 dan 2008 menunjukkan bahwa ketidakmerataan pendapatan di Kabupaten Pasaman Barat masih termasuk dan kategori rendah, karena 40% penduduk berpendapatan rendah masih dapat menikmati total pendapatan yang lebih besar dari 12%. Bahkan pada tahun 2008 porsinya cenderung menurun dibandingkan dengan tahun 2007. Semakin baiknya pemerataan distribusi pendapatan di Kabupaten Pasaman Barat diduga semakin baiknya peran lembaga sosial seperti amil zakat yang dikelola secara swadaya oleh masyarakat serta peran perkebunan milik swasta nasional melalui CSR (*Corporate Social Responsibility*) dalam membantu masyarakat yang kurang mampu.

c. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasaman Barat terus mengalami penurunan. Kondisi ini cukup menggembirakan mengingat, cukup banyak program-program pengentasan kemiskinan baik yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten sendiri. Dari data hasil sensus ekonomi nasional (Susenas) BPS dapat diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasaman Barat berjumlah sebanyak 45.500 jiwa atau 14,10% dari total jumlah penduduk Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2006. Sedangkan di tahun berikutnya jumlah penduduk miskin telah semakin berkurang sehingga pada tahun 2007 tersebut berjumlah sebanyak 42.700 jiwa penduduk miskin atau 13,03% dari total penduduk tahun 2007 yakni sebanyak 327.787 jiwa. Berkurangnya persentase penduduk miskin dari jumlah total penduduk sebesar 1% setiap tahun diharapkan dapat terus terjadi sehingga angka kemiskinan di Kabupaten Pasaman Barat dapat terus berkurang. Selengkapny jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2006-2008

No	Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Jumlah Penduduk Kabupaten (Jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
1	2006	45.500	322.780	14,10
2	2007	42.700	327.787	13,03
3	2008		333.192	

Sumber: BPS, data susenas 2006-2007

Sedangkan data RTS, berdasarkan data PPLS Biro Pusat Statistik dalam kurun waktu 4 (empat) tahun 2006-2009, dengan adanya program-program pembangunan kabupaten pasaman telah dapat menurunkan Rumah Tangga Miskin dari 32.007 KK tahun 2006 menjadi 24.179 KK tahun 2009. Program pembangunan dalam penuntasan kemiskinan melibatkan semua dinas teknis dan saling terintegrasi. Diantaranya, bantuan kredit mikro nagari, bantuan peralatan untuk mendukung perekonomian, bantuan pemasaran produk.

d. Rasio Penduduk Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Jika dilihat dari data yang di publikasi oleh pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, pada tahun 2006 rasio penduduk bekerja mencapai 91,71 %, dengan kata lain pada saat itu jumlah pengangguran hanya mencapai kurang dari 10 %. Namun pada tahun berikutnya rasio penduduk bekerja menurun hingga menjadi 91,03 %, akan tetapi kondisi ini kembali membaik pada tahun 2008 dimana rasio penduduk yang bekerja dapat mencapai 94,62 %. Berdasarkan kondisi terakhir angka ini cukup menggembirakan karena mengindikasikan jumlah pengangguran kurang dari 5% di kabupaten Pasaman Barat. Kenyataan yang demikian memberikan indikasi bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD terkait telah memberikan dampak yang positif terhadap penurunan angka pengangguran pada tahun 2008.

Tabel 2.7
Rasio Penduduk yang Bekerja di Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2006 - 2009

Unsur Penduduk	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
Jumlah Penduduk yang bekerja	133.696	135.932	160.372	148.645
Angkatan Kerja	145.789	149.327	169.487	139.868
Rasio Penduduk yang Bekerja (%)	91,71	91,03	94,62	94,62

Sumber: Data diolah dari Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2006 - 2009

Menurut informasi dan data yang tersedia, sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang paling banyak menyerap lapangan kerja. Karena itu, untuk mengatasi masalah pengangguran di masa mendatang, maka Pemda sebaiknya lebih meningkatkan pengembangan sektor pertanian tersebut. Disamping itu sektor perdagangan dan jasa juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja di daerah Pasaman Barat.

e. Pendapatan Perkapita

Untuk mengevaluasi perkembangan tingkat kemakmuran kasar yang terdapat di kabupaten Pasaman Barat dapat juga dianalisis dari perkembangan pendapatan per kapita selama 3 tahun terakhir ini. Dengan menggunakan data PDRB atas harga berlaku dan membagi dengan jumlah penduduk maka didapatkan PDRB per Kapita pada tahun tersebut. Berdasarkan atas dasar harga berlaku ternyata PDRB per kapita kabupaten Pasaman Barat mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan yang dicapai pada tahun 2009 lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan PDRB per kapita kabupaten Pasaman Barat tahun 2007 dan tahun 2006. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel 2.3.

Berdasarkan tabel diatas, telah terjadi peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Pasaman Barat dari tahun ke tahun. Secara umum terjadinya peningkatan pendapatan per kapita tersebut tidak terlepas dari besarnya pertumbuhan sektor pertanian khususnya subsektor perkebunan dan tanaman pangan hortikultura disamping sektor lapangan usaha lainnya. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa selama periode 2006-2008 kinerja sektor perkebunan telah mampu menggerakkan perekonomian masyarakat daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Tabel 2.8
Perkembangan Pendapatan Per kapita
Kabupaten Pasaman Barat 2006-2009

Tahun	PDRB Atas Harga Berlaku	Jumlah penduduk	Pendapatan Per Kapita (Juta Rupiah)	Peningkatan (%)
2006	3.507.374,96	322.780	10,87	
2007	4.115.816,86	327.787	12,56	15,55
2008	4.868.055,28	333.192	14,61	16,36
2009	5.517.733,25	338.567	16,3	12,08

Sumber : BPS, Pasaman Barat Dalam Angka, Data Diolah

Meskipun terjadi peningkatan pendapatan per kapita masyarakat Kabupaten Agam dalam beberapa tahun terakhir namun juga diikuti pengeluaran per kapita masyarakatnya yang ikut meningkat dari tahun ke tahun. Angka pengeluaran per kapita Kabupaten Pasaman Barat hampir sama dengan angka pengeluaran rata-rata di seluruh Kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Pada tahun 2006 misalnya, angka pengeluaran per kapita daerah Kabupaten Pasaman Barat mencapai sebesar Rp.6,06,- juta. Sedangkan secara rata-rata pengeluaran riil Kabupaten di Sumatera Barat mencapai sebesar Rp.6,16 juta. Pada tahun yang sama pendapatan per kapita Kabupaten Pasaman Barat mencapai Rp.10,87 juta. Dengan demikian artinya rata-rata penduduk di daerah Kabupaten Pasaman Barat dapat menabung sebesar Rp.4,71 juta pada tahun 2006 tersebut. Demikian halnya pendapatan per kapita tahun 2007 di Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp. 12,56 juta dengan pengeluaran riil sebesar Rp. 6,11 juta atau dapat menyimpan sebesar Rp 6,46 juta. Tahun 2008 pendapatan per kapita di Kabupaten Pasaman Barat sebesar Rp 14,61 juta dengan pengeluaran riil pada tahun yang sama sebesar Rp 6,16 juta atau dapat menyimpan sebesar Rp. 8,45 juta. Sedangkan untuk tahun 2009 mencapai 16,3 juta.

2.2.2. Kesejahteraan Sosial

Salah satu indikator untuk menilai dan mengevaluasi kemajuan kesejahteraan sosial adalah Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dikeluarkan pertama kali oleh UNDP dalam evaluasi pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM ini meliputi 3 aspek penting yaitu pendidikan, kesehatan dan dayabeli (pendapatan) masyarakat.

Berdasarkan data yang tersedia, selama tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa terjadi peningkatan yang tidak begitu besar dari IPM Kabupaten Pasaman Barat yaitu 68,26 pada tahun 2006 menjadi 68,84 tahun 2007 dan 69,33 pada tahun 2008. Angka ini dibawah rata-rata IPM Sumatera Barat yaitu 71,65 di tahun 2006 dan 72,23 di tahun 2007 serta 72,96 di tahun 2008. Dari tiga kabupaten lain di daerah sekitarnya, IPM Kabupaten Pasaman Barat ternyata masih tertinggal

dan lebih rendah. Selama periode tiga tahun terakhir (2006-2008) kelihatannya IPM Pasaman Barat masih lebih rendah dibandingkan dengan daerah Kabupaten Agam, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman.

Dengan demikian, kedepan sudah tentu tantangan pembangunan daerah akan sangat dirasakan bagi Kabupaten Pasaman Barat karena dalam tatanan pembangunan global menuntut setiap daerah memiliki nilai tambah "value added" dalam aspek pengembangan Sumberdaya Manusia (SDM) terhadap pembangunan. Dalam arti kata basis dasar pembangunan daerah kedepan harus memiliki dasar pembangunan manusia "human based development" (Kuncoro, 2007). Untuk itu Kabupaten Pasaman Barat harus kembali melakukan revitalisasi pola pembangunan daerah dengan menempatkan pembangunan manusia sebagai basis dasar bagi pengembangan pembangunan kedepan. Selengkapnya IPM daerah Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.9
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Pasaman Barat, Sumatera Barat dan Nasional 2006-2008

Tahun	Pasaman Barat	Agam	Padang Pariaman	Pasaman	Sumatera Barat
2006	68,26	71,79	69,51	70,62	71,65
2007	68,84	72,06	70,09	71,05	72,23
2008	69,33	72,50	70,63	71,71	72,96
	Peringkat Nasional				
Tahun	Pasaman Barat	Agam	Padang Pariaman	Pasaman	Sumatera Barat
2006	287	127	220	176	9
2007	291	139	220	186	9
2008	302	144	227	186	9

Sumber: BPS, IPM Sumatra Barat tahun 2006 - 2008

2.2.3 Pendidikan

Kemajuan pendidikan merupakan salah satu indikator penting dalam melakukan evaluasi terhadap keberhasilan pembangunan daerah. Khusus untuk Kabupaten Pasaman Barat kegiatan pendidikan yang dilakukan sebegitu jauh baru terbatas pada pendidikan dasar dan menengah. Memperhatikan data yang tersedia, kemajuan pendidikan ini dalam periode 3 tahun terakhir dapat dilihat dari beberapa indikator utama yaitu Angka Melek Huruf, Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM), ketersediaan sekolah serta lama sekolah rata yang dialami siswa.

Angka melek huruf adalah proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya. Berdasarkan data BPS tahun 2006 hingga tahun 2008 menunjukkan Angka Melek Huruf di Kabupaten Pasaman Barat selalu berada di atas Angka Melek Huruf Propinsi Sumatera Barat. Gambaran Angka Melek Huruf di Sumatra Barat dan Kabupaten Pasaman Barat dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Angka melek huruf secara tidak langsung juga merupakan salah satu indikator kualitas sumber daya manusia. Bila angka melek huruf mendekati 100 persen hal ini memperlihatkan makin baiknya kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. Angka 100 persen berarti bahwa seluruh penduduk yang berusia 15 tahun ke atas sudah pandai baca dan tulis (melek huruf). Untuk negara maju biasanya angka ini sudah mencapai angka 100%.

Dari tabel 2.5 di atas terlihat perbandingan angka melek huruf di daerah Kabupaten Pasaman Barat dengan Propinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data yang ada, ternyata angka melek huruf Propinsi Sumatera Barat cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sedangkan angka melek huruf daerah Kabupaten Pasaman Barat juga meningkat tetapi peningkatannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan di daerah Sumatera Barat.

Tabel 2.10
Angka Melek Huruf Daerah Kabupaten Pasaman Barat
dan Sumatera Barat Tahun 2006 - 2008 (%)

Tahun	Pasaman Barat	Sumatra Barat
2006	97,63	96,00
2007	97,75	96,10
2008	97,83	96,66

Sumber: BPS, IPM Sumatera Barat tahun 2006 - 2008

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah pada tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ketersediaan sekolah yang ada di Kabupaten Pasaman Barat cenderung menurun dari tahun ke tahun (Lihat Tabel 2.6) Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui Dinas Pendidikan yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan harus bekerja lebih maksimal lagi. Karena setiap tahun jumlah penduduk atau murid yang akan bersekolah cenderung bertambah banyak, sedangkan fasilitas pendidikan seperti jumlah gedung sekolah pertambahan jumlahnya tidak secepat pertambahan murid. Karena itu perlu kebijakan dan program yang tepat untuk mengatasi hal ini, sehingga tidak ada murid sekolah yang tidak bisa bersekolah karena tidak alasan tidak tersedianya tempat belajar atau sekolah yang menampungnya. Apalagi wajib belajar 9 tahun sudah menjadi keharusan bagi pemerintah kabupaten/kota di Indonesia yang wajib dilaksanakan sebagai konsekuensi perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.11
Rasio Ketersediaan Sekolah Dasar/Penduduk Usia Sekolah (7-12 Tahun)
di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 - 2009

Indikator rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah		Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
Jumlah sekolah pendidikan dasar	SD	240	242	250	252
	MIN	1	1	2	2
	MIS	5	5	5	5
	SD + MI	246	248	257	259
Jumlah Penduduk	7-12 tahun	51.138	52.176	53.219	

Usia Pendidikan Dasar					45.398
Rasio ketersediaan sekolah/pddk usia sekolah	48,11	47,53	48,29		57,01

Tabel 2.12
Rasio Guru Sekolah Dasar Terhadap Murid
di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 - 2009

Indikator rasio guru /murid		Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
Jumlah guru pendidikan dasar	SD	3.901	3904	3907	
	MIN	31	34	36	
	MIS	52	55	59	
	SD + MI	3.984	3.993	4.002	
Jumlah murid pendidikan dasar	SD	46.320	49750	51415	
	MIN	380	480	600	
	MIS	700	850	960	
	SD + MI	47.400	51.080	52.975	
Rasio guru / murid		84,05	78,17	75,55	

Sumber: Laporan Dinas Pendidikan saman Barat 2009

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan menengah. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa angka rasio ketersediaan sekolah SLTP per penduduk usia sekolah SLTP tahun 2006 adalah 41,10 terus meningkat menjadi 42,97 di tahun 2007 dan telah mencapai angka 44,42 di tahun 2008. Angka ini mengindikasikan hingga tahun 2008 telah tercapai rasio ketersediaan sekolah SLTP 44 buah sekolah menengah untuk 10.000 penduduk berusia sekolah SLTP atau dengan kata lain 4 buah sekolah SLTP untuk 1000 penduduk berusia sekolah SLTP. Berikut ini adalah tabel rasio ketersediaan sekolah tingkat pendidikan menengah di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 - 2009.

Tabel 2.13
Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Menengah
(13-15 Tahun) di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 - 2009

Indikator rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah		Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
Jumlah sekolah pendidikan menengah	SLTP	39	45	49	49
	MTSN	4	6	6	6
	MTSS	43	43	44	44
	SLTP + MTS	86	94	99	99
Penduduk Usia Pendidikan Menengah	13-15 tahun	20.927	21.875	22.288	21.7045

Rasio ketersediaan sekolah/pddk usia sekolah	41,10	42,97	44,42	44,5
--	-------	-------	-------	------

Sumber: Laporan Dinas Pendidikan saman Barat 2009

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Pasaman Barat rasio ketersediaan sekolah menengah atas dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Tahun 2006 rasio ketersediaan sekolah menengah atas 29,73 atau 30 sekolah untuk 10.000 penduduk usia sekolah menengah atas. Tahun 2007 rasio ketersediaan sekolah terus meningkat menjadi 30,75 atau 31 buah sekolah untuk 10.000 penduduk usia sekolah menengah atas. Hingga tahun 2008 rasio ketersediaan sekolah untuk penduduk usia 16-18 tahun telah mencapai 31,29 atau 32 buah sekolah untuk 10.000 penduduk usia 16-18 tahun. Kondisi ini perlu disikapi secara positif meskipun penambahan sekolah dari tahun ke tahun bertambah 1 sekolah akan tetapi dampaknya bagi ketersediaan jumlah sekolah bagi penduduk berusia sekolah 16-18 tahun cukup besar. Disamping itu, peningkatan ketersediaan sekolah tidak saja perlu ditingkatkan secara kuantitas akan tetapi juga perlu ditingkatkan secara kualitas.

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Tabel berikut ini menggambarkan rasio guru terhadap murid di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2006 - 2009.

Tabel 2.14
Rasio Ketersediaan Sekolah/ Penduduk Usia Sekolah Menengah Atas (16-18 Tahun) di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 - 2009

Indikator rasio ketersediaan sekolah / penduduk usia sekolah	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009	
Jumlah sekolah pendidikan menengah	SMA/SMK	22	24	25	25
	MAN	5	5	5	5
	MAS	19	19	19	19
	SMA/SMK + MA	46	48	49	49
Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Menengah 16-18 tahun	15.474	15.611	15.662	16.168	
Rasio ketersediaan sekolah/pddk usia sekolah	29,73	30,75	31,29	30,1	

Sumber: Laporan Dinas Pendidikan Pasman Barat

Berdasarkan data yang ada pada periode tahun 2006-2008 terlihat bahwa rasio jumlah guru dan murid di Kabupaten Pasaman Barat cenderung menurun. Pada tahun 2006 rasio guru dengan murid adalah 57, dan kemudian naik menjadi 65 pada tahun 2007. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode 2006-2008 telah terjadi penambahan guru di tingkat pendidikan dasar. Fakta tersebut menunjukkan bahwa adanya komitmen Pemda Pasaman Barat untuk meningkatkan kualitas pendidikan melalui penambahan jumlah guru pendidikan dasar.

Selanjutnya, rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan menengah per 1000 jumlah murid pendidikan menengah. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Disamping itu juga untuk

mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran yang baik. Rasio guru terhadap murid SLTP dapat dilihat pada tabel berikut:

Berdasarkan tabel diatas ternyata rasio guru dengan murid pada pendidikan SLTP cenderung menurun. Tahun 2006 rasio guru dengan murid sudah mencapai 273 guru untuk 1000 orang murid dan tahun 2007 menurun menjadi 205 orang guru untuk 1000 orang murid dan hingga tahun 2008 terus menurun menjadi 195 orang guru untuk 1000 orang murid. Meskipun rasionya mengalami terus penurunan, namun dari sisi jumlah guru tersebut sudah cukup memadai. Karena itu, untuk meningkatkan mutu dan kualitas proses belajar dan mengajar di masa mendatang, maka program dan kegiatan pendidikan untuk tingkat SLTP diarahkan pada peningkatan kualitas guru.

Tabel 2.15
Rasio Guru Sekolah Menengah Pertama Terhadap Murid
di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 - 2008

Indikator rasio guru /murid		Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
Jumlah guru pendidikan menengah	SLTP	3.901	3.904	3.907
	MTSN	31	34	36
	MTSS	52	55	59
	SLTP + MTS	3.984	3.993	4.002
Jumlah murid pendidikan menengah	SLTP	10.086	13.318	14.079
	MTSN	380	1.912	2.012
	MTSS	4.114	4.212	4.402
	SLTP + MTS	14.580	19.442	20.493
Rasio guru / murid		273	205	195

Sumber: Laporan Dinas Pendidikan saman Barat 2009

Meskipun rasio ketersediaan sekolah cenderung terus mengalami peningkatan akan tetapi sebaliknya rasio guru terhadap murid di sekolah menengah atas terus mengalami penurunan. Tahun 2006 jumlah guru yang mengajar di SLTA berjumlah 854 orang dengan murid 8.995 orang sehingga rasio guru SLTA terhadap murid SLTA adalah 94,94. Angka ini mengindikasikan di tahun 2006 terdapat 95 orang guru untuk 1000 orang murid SLTA. Angka rasio ini terus menurun dimana pada tahun 2007 menjadi 90,38 atau 90 orang guru untuk 1000 orang murid SLTA. Hingga tahun 2008 jumlah rasio guru terhadap murid adalah 85,99 atau 86 orang guru SLTA untuk 1000 orang murid SLTA. Dari segi kuantitas tentunya diperlukan penambahan jumlah guru SLTA mengingat Kabupaten Pasaman dalam jangka panjang tidak saja menuntaskan wajib belajar 9 tahun akan tetapi juga meningkatkan wajib belajar hingga jenjang SLTA bahkan salah satu misi RPJMD Pasaman Barat adalah meningkatkan derajat *kualitas* dan *kuantitas* pendidikan.

Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Berdasarkan hasil perhitungan BPS yaitu kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan maka diperoleh angka rata-rata lama sekolah. Angka rata-rata lama sekolah Kabupaten Pasaman Barat dalam tiga tahun terakhir ini cenderung tidak mengalami peningkatan maupun penurunan yaitu pada

angka 7,90. Akan tetapi rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasaman Barat lebih rendah daripada angka rata-rata lama sekolah secara keseluruhan di Propinsi Sumatra Barat.

Tabel 2.16
Rasio Guru Sekolah Menengah Atas Terhadap Murid
di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2008

Indikator rasio guru /murid		Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
Jumlah guru pendidikan menengah	SMA/SMK	522	588	588
	MAN	102	112	139
	MAS	230	240	248
	SMA/SMK + MA	854	910	975
Jumlah murid pendidikan menengah	SMA/SMK	6.795	7.510	8.780
	MAN	1.088	1.277	1.278
	MAS	1.112	1.282	1.281
	SMA/SMK + MA	8.995	10.069	11.339
Rasio guru / murid		94,94	90,38	85,99

Sumber: Laporan Dinas Pendidikan Pasman Barat 2008

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasaman Barat lebih baik daripada angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasaman (induk) maupun di Kabupaten Padang Pariaman. Meskipun demikian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasaman Barat tidak lebih baik daripada angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Agam yang mencapai 8,20 setiap tahunnya. Hal ini tentu menjadi motivasi bagi Kabupaten Pasaman Barat agar lebih baik memajukan dan mendorong masyarakatnya agar mau terus sekolah hingga tingkat pendidikan yang lebih tinggi, sesuai dengan misi yang diemban Kabupaten Pasaman Barat dalam meningkatkan derajat kuantitas dan kualitas pendidikan. Tabel berikut ini menggambarkan perkembangan angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Pasaman Barat dan kabupaten sekitarnya serta Propinsi Sumatra Barat.

Tabel 2.17
Angka Rata-rata Lama Sekolah di Kabupaten Pasaman Barat
dan Kabupaten Sekitarnya serta Propinsi Sumatra Barat Tahun 2006-2008

Tahun	Pasaman Barat	Agam	Padang Pariaman	Pasaman	Sumatera Barat
2006	7,90	8,20	6,90	7,40	8,00
2007	7,90	8,20	7,13	7,40	8,18
2008	7,90	8,20	7,13	7,57	8,26

Sumber: BPS, IPM Sumatra Barat tahun 2006 – 2008

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Kelompok APK dan APM untuk SD, SMP, dan SMA berturut-turut adalah untuk umur 7-12, 13-15,16-18 tahun.

Tabel 2.18
Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM)
Menurut Jenjang Pendidikan (%)

Tahun	SD		SLTP		SLTA	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM
2006	91,45	88,18	81,31	76,40	57,50	55,50
2007	96,45	89,15	87,50	84,30	62,20	58,30
2008	99,40	90,65	96,50	90,00	72,40	70,20
2009	102,00	93,65	99,39	93,64	75,32	73,04

Sumber: Laporan Diknas Tahun 2006 - 2009

APK SD sama dengan jumlah siswa yang duduk di bangku SD dibagi dengan jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun. Dari Tabel 4.17 terlihat bahwa angka APK untuk Sekolah Dasar dari tahun 2006 hingga 2009 terus meningkat. Kondisi ini menunjukkan partisipasi penduduk dalam mengikuti pendidikan dasar (SD) hingga tahun 2010, APK melebihi 100% yaitu 102%. Sementara itu APM SD sama dengan jumlah murid 7 sampai 12 tahun yang terdaftar di SD dibandingkan dengan jumlah penduduk yang berusia 7 sampai 12 tahun. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa walaupun APM - nya meningkat namun belum bisa mencapai 100%. Hal ini membuktikan bahwa hingga tahun 2009 belum semua anak yang berumur 7-12 tahun mendapatkan pendidikan dasar (SD), dimana ada sekitar 6,35 % penduduk berusia 7 hingga 12 tahun yang belum mencicipi bangku sekolah dasar.

Selanjutnya selisih APM dengan APK mengindikasikan proporsi siswa yang tertinggal atau terlalu cepat bersekolah. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2006 masih ada sekitar 0, 12 % siswa yang terlalu cepat untuk bersekolah, sementara itu pada tahun 2006, 2007, tahun 2009 dan tahun 2009 mengindikasikan sebaliknya, bahwa sekitar 3,27 % pada tahun 2006 dan 7,3 % pada tahun 2007 siswa yang tertinggal untuk bersekolah. Sementara pada tahun 2008 sekitar 8,75 % siswa tertinggal untuk bersekolah. Untuk tingkat SLTP, walaupun APK mengindikasikan peningkatan dari tahun 2006 hingga 2008, namun masih rendah dibandingkan dengan SD. Hingga tahun 2008 penduduk yang telah mencicipi bangku Sekolah Dasar mencapai 96,50 %. Dengan kata lain sampai dengan tahun 2008 masih ada sekitar 3, 5 % penduduk yang belum mencicipi bangku SLTP. Sementara itu angka APM nya juga mengindikasikan terjadi peningkatan dari tahun 2006 hingga 2009.

Berdasarkan data yang ada, ternyata pada tahun 2009 masih ada sekitar 6,36% penduduk berusia 13 sampai 15 tahun yang belum mencicipi bangku SLTP. Selanjutnya kondisi yang lebih rendah lagi terjadi pada tingkat SLTA, dimana APK untuk SLTA hingga tahun 2009 hanya mencapai 75,32 % sementara itu APM nya hanya mencapai 73,04 %. Artinya sekitar 27,06 % penduduk belum pernah mencicipi bangku SLTA, dan masih ada sekitar 25,70 % penduduk yang berumur 16-18 tahun belum bersekolah pada tingkat SLTA. Kondisi ini menunjukkan perlunya kerja keras pemerintah dalam mensukseskan wajib belajar untuk usia SLTA. Wajib belajar untuk SD dan SMP sudah memberikan dampak yang cukup

signifikan terhadap partisipasi murid SD dimana APK dan APM nya sudah melebihi 90 % hingga tahun 2009.

Angka pendidikan yang ditamatkan adalah penyelesaian pelajaran pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan surat tanda tamat belajar/ijazah. Hasil ini dapat dilihat dari data BPS melalui publikasi SUSENAS tahun 2006 hingga 2008. Data tersebut memperlihatkan persentase pendidikan yang ditamatkan dari ijazah terendah hingga ijazah tertinggi.

Tabel 2.19
Persentase Pendidikan yang Ditamatkan Menurut Ijazah Tertinggi di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 - 2008

Persentase Pendidikan yang Ditamatkan		Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
Ijazah Tertinggi yang Dimiliki	Tidak Punya Ijazah	0.17	0.16	0.14
	SD/MI	46.56	45.73	44.93
	SMTp	24.93	24.49	24.06
	SMTA	23.39	24.47	25.61
	Diploma I/II/III	2.52	2.58	2.57
	Diploma IV s/d S3	2.43	2.57	2.68
	Jumlah	100	100	100

Sumber: Laporan Diknas Tahun 2006 - 2008

Selama periode tahun 2006-2008 pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh penduduk Pasaman Barat lebih didominasi oleh tingkat pendidikan SD, SLTP dan SLTA, dimana angkanya secara rata-rata adalah di atas 20%. Pendidikan SD, SLTP dan SLTA menurut data terakhir tahun 2008 mendominasi dengan jumlah lebih dari 80 %. Kondisi ini sekaligus menunjukkan kualitas potensi sumber daya manusia di Kabupaten Pasaman Barat lebih didominasi oleh pendidikan dasar, menengah, dan lanjutan. Tentu saja hal ini perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam membuat kebijakan terutama yang berhubungan dengan ketenagakerjaan. Karena tenaga kerja di daerah ini lebih didominasi oleh pendidikan SD, SLTP dan SLTA.

Kebijakan tenaga kerja harus lebih mengakomodir potensi yang ada di daerah ini. Kemudian hal yang cukup menggembirakan juga terjadi selama periode 2006-2008 adalah turunnya angka penduduk yang tidak memiliki ijazah dari tahun ke tahun, yang berarti kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kualitas diri juga meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini juga ditandai dengan meningkatnya keinginan penduduk untuk mendapatkan ijazah yang lebih tinggi. Walaupun jumlahnya tidaklah terlalu besar namun tetap mengindikasikan peningkatan dari tahun ke tahun.

2.2.4 Kesehatan Masyarakat

Evaluasi tentang kemajuan pembangunan kesehatan masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan dua indikator utama yaitu: *Indek Harapan Hidup* (IHH), *Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Balita Gizi Buruk*. Walaupun masih banyak

terdapat indikator kesehatan lainnya, tetapi kedua indikator ini sengaja dipilih berdasarkan ketersediaan data di daerah.

Angka harapan hidup pada waktu lahir adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka usia harapan hidup di Kabupaten Pasaman Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2006 angka harapan hidup di Kabupaten Pasaman Barat sebesar 67,20 terus meningkat di tahun 2007 menjadi 68,70 dan selanjutnya di tahun 2008 angka usia harapan hidup telah mencapai angka 69 dan untuk tahun 2009 mencapai 69,3.. Terus meningkatnya angka harapan hidup ini memberikan indikasi bahwa pelayanan kesehatan secara umum sudah baik, meskipun masih perlu penajaman pada beberapa program yang terkait dengan kebutuhan masyarakat luas.

Angka kelangsungan hidup bayi adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = $(1 - \text{angka kematian bayi})$. Untuk mendapatkan angka kelangsungan hidup bayi, maka data mengenai angka kematian bayi harus diketahui. Angka kematian bayi dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. Berdasarkan pada hasil perhitungan angka kelangsungan hidup bayi selama periode 2006-2008 di Kabupaten Pasaman Barat, menunjukkan penurunan. Artinya angka kematian bayi dalam tiga tahun terakhir meningkat meskipun tidak begitu besar.

Angka kematian bayi selama periode 2006-2008 cenderung meningkat persentasenya, dimana pada tahun 2007 hingga 2008 peningkatan angka kematian bayi mencapai 4,27 %. Kondisi yang demikian menunjukkan bahwa program yang telah direalisasikan tersebut belumlah efektif dan efisien untuk mengatasi masalah kematian bayi. Disamping itu, peningkatan program dan kegiatan penyuluhan kesehatan secara signifikan tampaknya juga belum mampu untuk mengatasi permasalahan kematian bayi di kabupaten Pasaman Barat. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kualitas pelayanan kesehatan untuk mengatasi permasalahan kematian bayi belumlah maksimal. Hal ini disebabkan karena masih banyaknya tenaga dokter PTT dan bidan yang berkurang dalam periode tersebut.

Tabel 2.20
Angka Harapan Hidup Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2006-2008

TAHUN	ANGKA HARAPAN HIDUP
2006	67,20
2007	68,70
2008	69,00

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, 2008

Sebaliknya persentase balita gizi buruk tampaknya semakin berkurang dari tahun ketahun. Persentase balita gizi buruk adalah persentase balita dalam kondisi gizi buruk terhadap jumlah balita, Keadaan tubuh anak atau bayi dilihat dari berat badan menurut umur. Klasifikasi status gizi dibuat berdasarkan standar WHO/NCHS. Berkurangnya persentase gizi buruk didukung oleh semakin membaiknya rasio posyandu per 1000 balita dimana secara rata-rata selama tahun 2006 sampai tahun 2008 diatas 10 posyandu per 1000 balita atau 1 posyandu untuk 100 balita.

Tabel 2.21
Angka Kelangsungan Hidup Bayi dan Balita Gizi Buruk
di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2008

No	Indikator Angka Kelangsungan Hidup Bayi	Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
1	Jumlah Kematian Bayi	91	116	127
2	Jumlah Total Bayi	6.205	6.621	6.80
3	Angka Kematian Bayi (%)	14,63	14,63	18,90
4	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (%)	85,37	85,37	81,1
5	Persentase Balita Gizi Buruk (%)	2,9	3,8	2,4
6	Rasio Posyandu per 1000 Balita	10,35	11,40	10,84

Sumber: Data diolah dari Laporan Dinas Kesehatan, 2006-2008

Rasio puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu per 1.000 penduduk Pasaman Barat tahun 2006-2009 berada pada kisaran angka 0,20. dengan kata lain jumlah puskesmas, puskesmas keliling dan puskesmas pembantu kurang dari 1 buah puskesmas untuk 1000 orang penduduk di Kabupaten Pasaman Barat. Kondisi idealnya adalah rasio mendekati angka 1 sehingga 1 puskesmas untuk 1000 orang penduduk dapat tercapai sehingga peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat lebih optimal sesuai dengan misi RPJMD Pasaman Barat meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya. Berikut ini adalah tabel rasio puskesmas, puskesmas keliling dan puskesmas pembantu per 1000 penduduk di Kabupaten Pasaman Barat tahun 2006 – 2009.

Rasio rumah sakit per satuan penduduk adalah jumlah rumah sakit per 10.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan fasilitas rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk. Tabel 2.20 memperlihatkan bahwa jumlah rumah sakit di Kabupaten Pasaman Barat bertambah 1 buah di tahun 2007. Kondisi ini berimplikasi pada rasio rumah sakit per satuan penduduk semakin membaik. Artinya, semakin banyak penduduk yang dapat dilayani oleh rumah sakit. Meskipun terjadi peningkatan rasio rumah sakit per jumlah penduduk akan tetapi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat tidak saja upaya yang dilakukan dengan menambah jumlah rumah sakit akan tetapi dapat juga melakukan penambahan kapasitas layanan rumah sakit seperti penambahan ruang rawat inap, penambahan dokter spesialis, dan pengembangan fasilitas pendukung lainnya. Disamping itu juga perlu mengajak peran serta swasta untuk membangun rumah sakit swasta dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan terhadap masyarakat.

Tabel 2.22
Rasio Puskesmas, Puskesmas Keliling dan Puskesmas Pembantu
Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 – 2009

Indikator rasio		Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
Jumlah Puskesmas	Inpres	13	16	16	16
	Non Inpres				
	Inpres + Non Inpres	13	16	16	16

Jumlah Puskesmas Keliling					
Jumlah Puskesmas Pembantu	Inpres	13	16	16	16
	Non Inpres				
	Inpres + Non Inpres	13	16	16	16
Jumlah Puskesmas, Puskesmas Keliling, Puskesmas Pembantu		63	69	71	71
Jumlah Penduduk		328.655	309.857	334.686	338.567
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk		0,19	0,22	0,21	0,20

Sumber: Data diolah dari Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2006 - 2009

Disamping penambahan jumlah rumah sakit dari segi kualitas juga memerlukan peningkatan. Kualitas layanan kesehatan ditentukan oleh rasio jumlah dokter per jumlah penduduk. Indikator yang digunakan untuk mengukur rasio ini adalah jumlah dokter per 1000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga dokter. Tabel 2.21 memperlihatkan bahwa jumlah dokter umum mengalami peningkatan selama periode 2006 - 2009. Tahun 2006 rasio dokter per 1000 penduduk adalah 0,14, terus meningkat di tahun 2007 menjadi 0,17 dan hingga tahun 2008 menjadi 0,19. Sedang untuk tahun 2009 menjadi 0,20. Meskipun terjadi peningkatan dari tahun ke tahun akan tetapi masih jauh dari target pemerintah pusat melalui *Indonesia Sehat 2010* yaitu angka rasio mendekati 0,5 hingga 0,6. Artinya dalam kondisi ideal 1 orang dokter telah dapat melayani 2000-2500 orang penduduk. Dalam rangka menjalankan misi RPJMD peningkatan derajat kesehatan dan rencana besar Pemerintah Pusat melalui *Indonesia Sehat 2010*, Pemda Kabupaten Pasaman Barat perlu terus berupaya untuk meningkatkan tenaga dokter di Pasaman Barat agar pelayanan kesehatan dapat lebih optimal.

Tabel 2.23
Rasio Dokter per Satuan Penduduk
Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 - 2009

Indikator Dokter per Satuan Penduduk		Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008	Tahun 2009
Jumlah Dokter	Dokter Umum PNS	22	32	38	60
	Dokter Gigi PNS	7	8	12	13
	Dokter Umum PTT	15	11	12	12
	Dokter Gigi PTT	2	2	0	0
	Jumlah	46	53	62	85
Jumlah Penduduk		328.655	309.857	334.686	338.567
Ratio dokter per satuan penduduk		0,14	0,17	0,19	0,20

Sumber: Data diolah dari Pasaman Barat Dalam Angka Tahun 2006 - 2009

Selanjutnya, rasio tenaga medis per jumlah penduduk adalah jumlah tenaga medis per 100.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap tenaga medis, sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk meningkatkan kesehatan masyarakat nantinya. Rasio tenaga medis secara total per satuan penduduk di Kabupaten Pasaman Barat dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Tahun 2006 rasio tenaga medis di Kabupaten Pasaman Barat adalah 173 terus meningkat menjadi 277 di tahun 2007 dan sedikit menurun menjadi 231 pada tahun 2008. Akan tetapi rasio ini masih belum cukup

baik bila mengacu kepada target *Indonesia Sehat 2010* yang dicanangkan pemerintah pusat. Secara detail rasio tenaga medis per satuan penduduk Kabupaten Pasaman Barat tahun 2008 dibandingkan dengan yang terdapat dalam rencana *Indonesia Sehat 2010* adalah:

1. Rasio tenaga farmasi per 100.000 penduduk sebesar 8,37 masih dibawah target *Indonesia Sehat 2010* sebesar 10 per 100.000 penduduk;
2. Rasio tenaga keperawatan per 100.000 penduduk sebesar 88,14 masih di bawah target *Indonesia Sehat 2010* sebesar 118 per 100.000 penduduk. Akan tetapi angka ini pernah melebihi di tahun 2007;
3. Rasio Bidan per 100.000 penduduk sebesar 52,89 masih setengah di bawah target *Indonesia Sehat 2010* sebesar 100 per 100.000 penduduk;
4. Rasio tenaga sanitasi per 100.000 penduduk sebesar 5,68 masih jauh di bawah target *Indonesia Sehat 2010* sebanyak 40 per 100.000 penduduk.

Berikut ini adalah tabel rasio tenaga medis per satuan penduduk di Kabupaten Pasaman Barat.

Tabel 2.24
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk
Di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 - 2008

Indikator Tenaga Medis per Satuan Penduduk		Tahun 2006	Tahun 2007	Tahun 2008
Jumlah Tenaga Medis	Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM)	17	22	23
	Sarjana Farmasi	12	36	28
	Sarjana Kesehatan (S2)	3	4	6
	Bidan	160	222	177
	Perawat Kesehatan	243	383	295
	Sanitarian	14	22	19
	Bidan PTT	112	137	159
	Tenaga Medis Lainnya	6	33	65
	JUMLAH	567	859	772
JUMLAH PENDUDUK		328.655	309.857	334.686
Jumlah Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk	Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM)	5,17	7,10	6,87
	Sarjana Farmasi	3,65	11,62	8,37
	Sarjana Kesehatan (S2)	0,91	1,29	1,79
	Bidan	48,68	71,65	52,89
	Perawat Kesehatan	73,94	123,61	88,14
	Sanitarian	4,26	7,10	5,68
	Bidan PTT	34,08	44,21	47,51
	Tenaga Medis Lainnya	1,83	10,65	19,42
	JUMLAH	172,52	277,22	230,66

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman Barat, 2008 (Data Diolah)

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Infrastruktur Daerah

Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan pembangunan dalam bidang infrastruktur dapat dilakukan melalui beberapa indikator utama yang antara lain adalah ketersediaan air minum, prasarana jalan dan tempat beribadah. Pengukuran ini dilakukan dengan melihat beberapa angka rasio yang dapat memberikan indikasi tentang kemajuan penyediaan fasilitas tertentu.

Salah satu indikator makro yang menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup terlihat dari persentase penduduk berakses air bersih. Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah rumah tangga secara keseluruhan.

Tabel 2.25
Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih
(Berlangganan PDAM) di Pasaman Barat Tahun 2006-2008

TAHUN	JUMLAH RT PEMAKAI	TOTAL RT	PERSENTASE
2006	2.366	75.744	3.12%
2007	2.554	76.960	3.32%
2008	2.654	78.499	3.38%
2009	3187	79.766	3.99%

Sumber; BPS, Pasaman Barat Dalam Angka (data diolah) Tahun 2006-2009

Berdasarkan data di atas, pada tahun 2006 RT yang telah menikmati air bersih mencapai 3,12 %, dan pada tahun meningkat menjadi 3,32 %. Pada tahun 2007 pemakai air bersih kembali meningkat mencapai 3,38 %. Walaupun pemakaian air bersih oleh RT meningkat, namun dilihat dari persentase masih jauh dari ideal. Kenyataan yang demikian, mengindikasikan bahwa program tersebut belum menjadi prioritas oleh Pemda Pasaman Barat padahal kurangnya program penyediaan air bersih akan memiliki dampak terhadap kesehatan di masa mendatang. Oleh karena itu, Pemda khususnya SKPD yang berwenang diharapkan mampu melaksanakan program dan kegiatan yang terdapat di RPJMD tersebut pada periode mendatang.

Rasio panjang jaringan jalan dalam kondisi baik merupakan perbandingan antara panjang dan kondisi jalan dalam keadaan baik dengan total panjang jalan. Untuk lebih detilnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.26
Proporsi Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik
(Jalan Kabupaten)

TAHUN	Panjang dan Kondisi Jalan dalam Keadaan Baik	Total Panjang Jalan	Rasio Baik terhadap Total jalan
2006	258,9	1244,37	0,21
2007	258,9	1244,37	0,21
2008	287,4	1183,92	0,24
2009	363,3	1257,81	0,28

Sumber; BPS, Pasaman Barat Dalam Angka (data diolah) Tahun 2006-2009

RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2015

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada periode 2006 hingga 2009 rasio panjang dan kondisi jalan yang dalam keadaan baik untuk jalan kabupaten terus meningkat walaupun tidak signifikan. Namun demikian secara total kondisi jalan yang rusak ternyata mendominasi pada keseluruhan panjang jalan dari periode 2006 hingga 2009 di Pasaman Barat. Hal ini harus mendapatkan perhatian khusus dari Pemda Pasaman Barat melalui SKPD terkait, karena Pasaman Barat merupakan daerah perlintasan yang banyak dilalui oleh kendaraan, baik mobil pribadi maupun truk.

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk merupakan perbandingan antara jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk. Untuk mengetahui rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Pasaman Barat dapat dilihat pada Tabel 2.25 di bawah ini. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa selama periode 2006 hingga 2009 rasio tempat ibadah per satuan penduduk berfluktuasi. Tahun 2008 rasionya mencapai 2,8 , dan pada tahun 2007 rasionya meningkat tajam hingga mencapai 3,2. Namun pada tahun 2008 rasionya kembali menurun namun lebih besar dibandingkan tahun 2006 yaitu mencapai 2,9. Kondisi ini mengindikasikan bahwa jajaran Pemda Pasaman Barat melalui SKPD terkait cukup perhatian dengan perkembangan ibadah masyarakat. Untuk kedepan Pemda diharapkan dapat mendirikan suatu wadah yang melembaga di tengah masyarakat dimana lembaga ini dapat digunakan oleh masyarakat sebagai pusat kajian pendidikan agama.

Tabel 2.27
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006-2009

Tahun	Tempat Ibadah	Jumlah Penduduk	Rasio tempat ibadah persatuan penduduk
2006	936	328.655	2,85
2007	991	309.857	3,20
2008	993	334.686	2,97
2009	993	338.567	2,97

Sumber; BPS, Pasaman Barat Dalam Angka (data diolah) Tahun 2006-2009

BAB III

GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA KERANGKA PENDANAAN

3.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, sumber pendapatan yang berasal dari pemerintah melalui desentralisasi fiskal dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) saat ini menempati proporsi yang paling besar terhadap daerah, yakni sekitar 71% pada tahun 2010. Sedangkan sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pajak dan retribusi perlu ditingkatkan, Namun tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat serta tidak membebani perkembangan dunia usaha. Demikian pula dengan sumber-sumber pendapatan lainnya juga perlu ditingkatkan, antara lain Sumbangan Pihak ke III, lain-lain pendapatan yang sah, dan perimbangan, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak, sehingga dalam kurun waktu lima tahun mendatang, porsi Dana Alokasi Umum (DAU) secara bertahap dapat dimulai dan digantikan oleh sumber pendapatan yang dapat diupayakan oleh daerah.

Dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat mulai tahun 2006 sampai sekarang yang disusun dengan menganut anggaran berbasis Kinerja yang diatur Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku mulai Kepmendagri No. 29 tahun 2002, Permendagri No. 13 Tahun 2006 dan diubah Permendagri No. 59 Tahun 2007. Anggaran Pendapatan Kabupaten Pasaman Barat tahun 2006 dan 2007 masing-masing ditargetkan sebesar Rp 313.026.033.480 dan Rp 380.186.563.036. Sementara realisasi pendapatan masing-masing sebesar Rp 317.329.638.745 dan Rp 378.102.536.635 atau secara berturut-turut mencapai 101% tahun 2006 dan 99%. Tahun 2007. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2006 - 2010

Tahun	Pendapatan (Milyar Rupiah)			Belanja (Milyar)		
	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
2006	313.026.033.480	317.329.638.745	101.37	341.809.446.741	260.108.801.796	76.10
2007	380.186.563.036	378.102.536.635	99.45	462.690.813.245	388.793.468.139	84.03
2008	413.003.228.758	424.976.790.752	102.90	472.517.316.752	400.134.106.709	84.68
2009	451.874.500.000	450.016.293.338	99.59	546.743.842.005	482.704.307.036	88.29
2010	494.336.526.296	471.534.722.047	95.39	557.648.251.846	420.077.827.616	75.33

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Guna keperluan analisis atas perkembangan pendapatan daerah maka unsur pendapatan daerah pada sisi bagian sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu dalam sistem anggaran berbasis kinerja yang diterapkan mulai tahun 2006 sampai sekarang, sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu termasuk dalam struktur pembiayaan. Pendapatan daerah terdiri dari PAD (pajak daerah, retribusi daerah, sumbangan pihak ke III dan lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Tabel 3.2
% Pertumbuhan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2006 - 2010

Tahun	Pendapatan (Milyar Rupiah)			Belanja (Milyar)		
	Realisasi	Pertumbuhan	%	Target	Pertumbuhan	%
2006	317.329.638.745			260.108.801.796		
2007	378.102.536.635	60,772,897,890	19.15	388.793.468.139	128,684,666,343	49.47
2008	424.976.790.752	46,874,254,117	12.40	400.134.106.709	11,340,638,570	2.92
2009	450.016.293.338	25,039,502,586	5.89	482.704.307.036	82,570,200,327	20.64
2010	471.534.722.047	21,518,428,709	4.78	420.077.827.616	(62,626,479,420)	(12.97)
Rata-rata Pertumbuhan			10.56	Rata-rata Pertumbuhan		15

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

1. Pendapatan Asli Daerah

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberikan kontribusi dalam pendapatan daerah. Pada tahun 2006, PAD memberikan kontribusi sebesar Rp.14.292.732.422 (4,5%) terhadap realisasi pendapatan daerah. Pada tahun 2007 memberikan kontribusi sebesar Rp 19.635.080.166 (5,20%), Tahun 2008 sebesar Rp 20.556.240.737 (4,84%) dan tahun 2009 memberikan kontribusi sebesar Rp.23.457.516.616 (5,20%) Sedangkan tahun 2010 meberikan kontribusi sebesar Rp. 23.075.492.303(4,9%). Perkembangan target dan realisasi PAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010 dapat dilihat pada Tabel 3.2. berikut ini:

Tabel 3.3
Perkembangan Target dan Realisasi PAD
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 - 2010

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
2006	11.343.090.000	14.292.732.422	126
2007	19.062.543.650	19.635.080.166	103
2008	21.309.469.450	20.556.240.737	96.47
2009	23.874.500.000	23.457.516.616	98.25
2010	28.067.830.000	23.075.492.303	82.21
Total	103.657.433.100	101.017.062.244	97,45

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa pencapaian realisasi setiap tahun sejak tahun 2006 cukup menggembirakan. Apabila diambil rata-rata pertahun sudah mencapai 97,45%. Akan tetapi untuk tahun 2010 secara persentase mengalami penurunan yaitu 82,21% dari target yang karena yang ditetapkan.

Berdasarkan dari sumber penerimaan PAD Kabupaten Pasaman Barat dapat dibagi 4 (empat) yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah memberikan kontribusi yang cukup besar yaitu rata-rata 20% pertahun.. Jika dilihat dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009 realisasi Pajak Daerah terus mengalami peningkatan. Akan tetapi untuk untuk tahun 2010 mengalami penurunan jika dibandingkan tahun 2009. Apabila dilihat pencapaian

realisasi terhadap target cukup menggembirakan yaitu rata-rata diatas 85%. Untuk tahun 2010 pajak daerah terealisasi sebesar Rp.5.461.091.120 (92%) dari target yang direncanakan.. Obyek-obyek pajak daerah adalah pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Perkembangan Target Pajak Daerah dan Realisasi serta Kontribusi terhadap PAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 - 2010

Tahun	Pajak Daerah			PAD (Rp)	Kontribusi (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
2006		1.871.914.584	92.2	14.292.732.422	13.10
2007	4.797.517.000	4.424.393.074	84.4	19.635.080.166	22.53
2008	5.227.020.800	4.410.695.206	90.6	20.556.240.737	21.46
2009	5.410.000.000	4.902.139.772	83.6	23.457.516.616	20.90
2010	6.535.000.000	5.461.091.120	92.2	23.075.492.303	23.67
Total		18.424.368.729		101.017.062.244	20.86

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah memberikan kontribusi hampir sama besar dengan pajak daerah dalam menyumbang untuk PAD. terbesar dalam PAD Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan obyek-obyek retribusi adalah pelayanan kesehatan, persampahan, pelayanan parkir/pasar, pengujian kendaraan bermotor, jasa ketatausahaan, pemakaian kekayaan, jasa usaha tempat pelelangan ikan, terminal, jasa khusus parkir, rumah potong hewan, pelayanan pelabuhan kapal, tempat rekreasi, IMB, izin gangguan, izin trayek, hasil bumi dan laut, jasa konstruksi, jasa ketenagakerjaan, izin usaha perindustrian, perdagangan, pertambangan, izin pemeriksaan alat pemadam kebakaran.

Tabel 3.5
Perkembangan Target Restribusi Daerah dan Realisasi serta Kontribusi terhadap PAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 - 2010

Tahun	Restribusi Daerah			PAD	Kontribusi (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
2006		3.295.655.416		14.292.732.422	23.06
2007	2.875.026.650	3.972.378.918	138.17	19.635.080.166	20.23
2008	3.365.811.450	4.211.770.302	125.13	20.556.240.737	20.49
2009	6.217.300.000	5.883.822.077	94.64	23.457.516.616	25.08
2010	6.535.000.000	5.461.091.120	83.57	23.075.492.303	23.67
Total		22,824,717,833		101.017.062.244	22.6

Dari tabel diatas dapat dijelaskan rata-rata kontribusi retribusi daerah terhadap PAD sejak tahun 2006 sampai tahun 2010 sekitar 22.6%. Jika dilihat realisasi pertahun terus mengalami peningkatan. Untuk tahun 2006, realisasi sebesar Rp. 3.295.655.416 selama 5 (lima) tahun terjadi peningkatan 165% menjadi Rp.5.461.091.120 pada tahun 2010.

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Selanjutnya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan memberikan kontribusi terkecil dalam PAD. Pada tahun 2007 Rp.74.077.183 atau 0,38%, Tahun 2008 sebesar Rp. 190.652.499 atau 0,93%, Tahun 2009 sebesar Rp.391. 392.050 atau 1,67%, tahun 2010 sebesar Rp.444.965.048 atau 1,93%.

Tabel 3.6
Perkembangan Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Realisasi serta Kontribusi terhadap PAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 - 2010

Tahun	Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			PAD	Kontribusi (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
2006				14.292.732.422	
2007	74.077.183	74.077.183		19.635.080.166	0.38
2008		190.652.499		20.556.240.737	0.93
2009		391.392.050		23.457.516.616	1.67
2010		444.965.048		23.075.492.303	1.93
Total		1,101,086,780		101.017.062.244	1.09

d. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah merupakan penyumbang terbesar untuk PAD. Apabila dilihat dari rata-rata pertahun selama 5 (lima) tahun realisasinya melebihi 50%. Untuk tahun 2006 sebesar Rp. 9.125.162.422 dengan kontribusi 63.84%, meningkat menjadi Rp. 11.164.230.991 tahun 2007. Sedangkan untuk tahun 2008 realisasinya mencapai Rp. 11.743.122.730 dengan kontribusi 57.13%. Untuk tahun 2010 realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 10.976.291.124 dengan kontribusi 47.57%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terjadi penurunan sekitar 3 %. Sedangkan untuk pencapaian target yang ditetapkan setiap tahun diatas 90% kecuali tahun 2010 hanya mencapai 74%. Hal ini berkemungkinan terlalu tingginya target yang ditetapkan.

Tabel 3.7
Perkembangan Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dan Realisasi serta Kontribusi terhadap PAD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006 - 2010

Tahun	Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			PAD	Kontribusi (%)
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
2006		9.125.162.422		14.292.732.422	63.84
2007	11.315.922.817	11.164.230.991	99	19.635.080.166	56.86
2008	12.716.637.200	11.743.122.730	92	20.556.240.737	57.13
2009	12.247.200.000	12.280.162.717	100	23.457.516.616	52.35
2010	14.895.616.000	10.976.291.124	74	23.075.492.303	47.57
Total		55,288,969,984		101.017.062.244	54.73

2. Dana Perimbangan Keuangan

Dana perimbangan keuangan berasal dari; bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana perimbangan tahun 2006 ditargetkan sebesar Rp 341.809.446.741 dan terealisasi sebesar Rp 260.108.801.796 (...%). tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp 342.344.658.711 dan terealisasi sebesar Rp.335.894.858.371 (98%). Selanjutnya, tahun 2008 ditargetkan perolehan dana perimbangan adalah sebesar Rp 378.829.003.090 dan terealisasi sebesar Rp.378.790.420.078(99,6%). Dana perimbangan tahun 2009 ditargetkan sebesar Rp 402.747.770.000 dan terealisasi sebesar Rp 400.590.502.435 (99%) dan dana perimbangan tahun 2010 ditargetkan sebesar Rp. 436.612.776.311 dan terealisasi Rp. 423.294.072.339(97%).

Tabel:3.8
Target dan Realisasi Dana Perimbangan
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006-2010

Tahun	Target	Realisasi	%
2006	341.809.446.741	260.108.801.796	
2007	342.344.658.711	335.894.858.371	98
2008	378.829.003.090	378.790.420.078	100
2009	402.747.770.000	400.590.502.435	99
2010	436.612.776.311	423.294.072.339	97
Total	1,560,534,208,112	1,538,569,853,223	99

Sumber: APBD Kabupaten Pasaman Barat

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Dana Perimbangan yang diterima oleh Kabupaten Pasaman Barat tiap tahun mengalami peningkatan yaitu rata-rata sekitar 8%. Peningkatan ini tidak terlalu besar karena untuk kebutuhan belanja pegawai yaitu penambahan CPNS dan kenaikan gaji untuk penyesuaian dengan kenaikan harga.

Tabel .3.9
Kontribusi Realisasi Terhadap Dana Perimbangan
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2006-2010 (000)

No	Uraian	Th 2006	Th 2007	Th 2008	Th 2009	Th 2010
1	Bagi Hasil Pajak	20,238,830	22,728,000	26,142,176	26,163,000	34,317,000
2	Dana Bagi Hasil bukan Pajak	1,006,579	834,096	354,172	959,978	
3	Dana Alokasi Umum	243,281,000	271,069,000	305,576,071	323,123,000	338,852,000
4	Dana Alokasi Khusus	26,695,303	41,263,000	46,718,000	50,344,000	50,123,000
	Total Realisasi	291,221,712	335,894,096	378,790,419	400,589,978	389,009,317

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Realisasi kontribusi dana perimbangan Kabupaten Pasaman Barat secara berurut dari yang paling besar yaitu: Dana Alokasi Umum (DAU), bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak, dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Tabel.3.10
% Kontribusi Realisasi Terhadap Dana Perimbangan
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006-2010 (%)

No	Uraian	Th 2006	Th 2007	Th 2008	Th 2009	Th 2010
1	Bagi Hasil Pajak	7,00	6,75	7,9	7	8,11
2	Dana Bagi Hasil bukan Pajak	0,80	0,25	0,1	0,24	-
3	Dana Alokasi Umum	83,00	81	81	80	80
4	Dana Alokasi Khusus	9,0	12	11	12,76	11,89
	Total Realisasi	100	100	100	100	100

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

a. Dana Alokasi Umum

Total Realisasi Untuk Dana Alokasi Umum (DAU), pada tahun 2006 memberikan kontribusi terhadap dana perimbangan sebesar Rp 243,281,000,000(83%). Pada tahun 2007, memberikan kontribusi sebesar Rp. 271,069,000,000 (81%). Kontribusi pada tahun 2008 sebesar Rp. 305,576,071,000 (81%). Pada tahun 2009, memberikan kontribusi sebesar Rp.323,123,000,000 (80%), sedangkan pada tahun 2010, memberikan kontribusi sebesar Rp. 338,852,000 (80%).

b. Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak memberikan kontribusi terbesar kedua dalam dana perimbangan. Pada tahun 2006, memberikan kontribusi terhadap dana perimbangan sebesar Rp. 21,245,409,000 (7,8%). Pada tahun 2007 memberikan kontribusi sebesar Rp 23.562.096.000 (7%). Kontribusi pada tahun 2008 sebesar Rp.26.496.348.000 (8%). Pada tahun 2009, memberikan kontribusi sebesar Rp. 27.122.978.000(7,24%), sedangkan pada tahun 2010 memberikan kontribusi sebesar Rp . 34.317.000.000 (8,11%).

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan kontribusi ketiga dalam dana perimbangan. Pada tahun 2006 memberikan kontribusi terhadap dana perimbangan sebesar Rp. 26,695,303,000 (9%). Kontribusi pada tahun 2007 sebesar Rp. 41,263,000,000 (12%), pada tahun 2008 memberikan kontribusi sebesar Rp. 46,718,000,000 (11%), pada tahun 2009 memberikan kontribusi sebesar Rp. 50,344,000,000(12,76), sedangkan pada tahun 2010 memberikan kontribusi sebesar Rp. 50,123,000,000M (11,89%).

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah memberikan kontribusi dalam pendapatan daerah. Pada tahun 2006 dan terealisasi sebesar Rp 12.281.345.941. Selanjutnya, tahun 2007 terealisasi sebesar Rp.22.572.598.098, Tahun 2008 terealisasi sebesar Rp. 25.630.129.937. Dari target dan realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Pasaman Barat Tahun Anggaran 2006 sampai dengan 2010 dapat digambarkan pada Tabel 1. berikut ini:

Tabel.3.11
Target dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2006-2010

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2006	12.281.345.941	12.281.345.941	100
2	2007	22.572.598.098	22.572.598.098	100
3	2008	25.630.129.937	25.630.129.937	100
4	2009	25.968.274.287	25.968.274.287	100
5	2010	86.452.348.263	86.452.348.263	100

Realisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah Kabupaten Pasaman Barat dari tahun 2006 ke tahun 2007 mengalami peningkatan yang sangat signifikan yaitu dari Rp. 12.281.345.941 pada tahun 2006 menjadi Rp. 22.572.598.098 tahun 2007. Sedang perbandingan antara tahun 2009 dengan tahun 2010, memang mengalami peningkatan tetapi sangat kecil, nurun 16,0 %, sedangkan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 mengalami kenaikan.

3.1.2. Pengembangan Sumber Pendapatan Daerah

Untuk mendukung pembelanjaan daerah dalam rangka pelaksanaan berbagai program dan kegiatan strategik, berbagai upaya telah dan akan terus diupayakan. Tidak saja untuk meningkatkan jumlah penerimaan dari berbagai sumber pendapatan yang selama ini menyumbangkan nilai yang tidak sedikit bagi APBD, juga berbagai upaya dilakukan untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru. Secara umum, upaya peningkatan pendapatan daerah, lebih khusus diupayakan pada sumber PAD, mengingat *controllability*-nya yang tinggi dibanding sumber-sumber pendapatan yang lain. Upaya yang akan dilakukan meliputi sebagai berikut :

a. Program intensifikasi dan ekstensifikasi

Program ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan rendahnya tingkat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak yang berada di wilayah Kabupaten Pasaman Barat. Indikator keberhasilan program ini adalah berupa peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah dan PBB, untuk mendukung program tersebut akan dialokasikan dana dari tahun 2011 sampai dengan 2015 dalam APBD Kabupaten Pasaman Barat.

b. Program Koordinasi/Sinkronisasi Lintas Sektoral

Program ini dimaksudkan untuk mendukung program pertama dalam mendukung peningkatan pendapatan pajak daerah dari aspek pembangunan ekonomi. Program ini juga dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atas rendahnya rasio elastisitas pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan pajak daerah. Indikator keberhasilan program ini adalah berupa peningkatan kegiatan pembangunan yang mendukung potensi pajak daerah.

c. Program Peningkatan Kualitas SDM Aparatur

Program ini dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan atas keterbatasan kualitas sumber daya aparatur yang berhubungan dengan upaya penggalan dan pelayanan penerimaan pendapatan daerah. Indikator keberhasilan program ini adalah peningkatan kualitas SDM aparat dalam

jangka pengelolaan pajak daerah melalui penyelenggaraan pelatihan yang relevan.

3.2.ARAH PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Dalam pengelolaan keuangan untuk tahun 2006 masih memakai Kepmen 29 tahun 2004, dimana belanja pemerintah menggunakan istilah belanja aparatur dan belanja public. Akan tetapi sejak tahun 2007 sampai dengan tahun 2010 sudah menggunakan Permendagri no.13 tahun 2006 dimana belanja pemerintah menggunakan istilah Belanja Langsung dan Belanja Tidak langsung. Kontribusi realisasi belanja daerah untuk belanja aparatur/ belanja tidak langsung dan belanja pelayanan publik/ belanja langsung dapat digambarkan Tabel sebagai berikut :

Tabel.3.12
Target dan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006-2010

Tahun	Jumlah		
	Target	Realisasi	%
2006	341.809.446.741	260.108.801.796	76
2007	462.690.813.245	388.793.468.130	84
2008	471.690.316.752	339.307.586.709	72
2009	546.743.842.005	482.704.307.036	88
2010	557.648.251.846	420.077.827.616	75

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan tabel di atas, realisasi belanja daerah Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2006 mencapai Rp.260.108.801.796 atau 76% dari target yang direncanakan. Untuk tahun 2007 realisasi belanja naik menjadi Rp.388.793.468.130, sedangkan pada tahun 2008 mengalami penurunan menjadi sebesar Rp. 339.307.586.709 (72%). Realisasi belanja terbesar pada tahun 2009 yaitu Rp.482.704.307.036 (88%).

Jika dilihat dari Laporan Realisasi Anggaran, maka penyajian pembagian jenis belanja dapat dibagi menjadi 3 periode. Untuk tahun 2006, kita mengenal *Belanja Aparatur Daerah* dan *Belanja Pelayanan Public*, untuk tahun 2007-2009. pembagian belanja dibagi 3 (tiga) yaitu *Belanja operasi* dan *Belanja Modal* dan *Belanja Tak terduga*. Sedangkan untuk Laporan Realisasi Anggaran tahun anggaran 2010 yaitu 2 (dua) jenis belanja yaitu *Belanja Langsung* dan *Belanja Tidak Langsung* Untuk lebih lebih jelas dapat kita pada tabel di bawah ini:

Tabel.3.13
Rincian Realisasi Belanja Aparatur Pemerintah dan Pelayanan Publik
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006

No	Uraian	Th 2006
1	Aparatur Daerah	129.459.798.084
	- B. Administrasi Umum	110.711.798.927
	- B.Belanja Operasional pemeliharaan	12.395.994.200
	- Belanja Modal	6.352.033.957
2	Pelayanan Publik	130.649.003.712
	- B. Administrasi Umum	11.996.858.110

	- Belanja Operasi Pemeliharaan	18.728.581.063
	- Belanja Modal	82.960.614.509
	- Belanja Bagi hasil	13.837.820.750
	- Belanja Tidak Tersangka	3.125.129.280
	Total	260.108.801.796

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Tabel.3.14
Proporsi realisasi belanja terhadap total belanja
Belanja Aparatur Pemerintah dan Pelayanan Publik
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006

No	Uraian	Th 2006 (%)
1	Aparatur Daerah	49.77
	- B. Administrasi Umum	42.56
	- B. Belanja Operasional pemeliharaan	4.77
	- Belanja Modal	2.44
2	Pelayanan Publik	50.23
	- B. Administrasi Umum	4.61
	- Belanja Operasi Pemeliharaan	7.20
	- Belanja Modal	31.89
	- Belanja Bagi hasil	5.32
	- Belanja Tidak Tersangka	1.20

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Dari tabel 3.12 untuk tahun 2006 pembagian belanja di bagi 2 (dua) bagian yaitu **belanja aparatur dan belanja pelayanan public**. Belanja aparatur yaitu belanja ruitn dalam pelaksanaan kegiatan sedangkan belanja pelayanan public adalah belanja pembangunan yang dapat dibagi beberapa bagian yaitu: belanja *adminstrasi umum*, *belanja pemelihraan*, *belanja modal*, *belanja bagi hasil*, dan *belanja tak tersangka*. Realisasi belanja untuk tahun 2006 sebesar Rp. 260.108.801.796, apabila dibandingkan dengan target maka realisasi mencapai 76%. Untuk belanja tak tersangka realisasi sebesar Rp. 3.125.129.280 (74%). Sedangkan realisasi tertinggi adalah pada belanja modal yaitu sebesar Rp.82.960.614.509 (83%). Hal ini karena banyaknya belanja modal terutama pada belanja penyediaan sarana dan prasarana.

Sedangkan apabila dilihat dari kontribusi terhadap total belanja daerah, belanja aparatur daerah mencapai 49,77%. Belanja aparatur daerah ini adalah belanja wajib karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang harus dipenuhi lebih dahulu. Sisa dari belanja aparatur daerah yang akan menjadi belanja public atau belanja pembangunan. Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2006 belanja public menyumbang sebesar 50,23%. Dari total belanja belanja public tersebut belanja modal sebagai penyumbang terbesar yaitu 31,89%. Hal ini terlihat karena pada tahun 2006 awal dari pemerintah kabupaten Pasaman Barat memulai pembangunan sarana dan prasarana sesudah pemekaran.

Tabel.3.15
Rincian Realisasi Belanja Operasi
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007-2009

No	Uraian	Th 2007	Th 2008	Th 2009
1	Belanja Pegawai	150.610.350.877	186.296.796.271	223.979.871.685
2	Belanja Barang	75.039.396.180	81.083.440.603	91.360.024.652
3	Belanja Bunga	-	-	-
4	Subsidi	-	-	-
5	Hibah	1.738.915.000	4.180.194.000	26.810.097.500
6	Bantuan Sosial	6.876.685.000	5.394.855.000	8.169.435.000
7	Bantuan Keuangan	10.072.780.991	3.798.054.523	5.667.786.473
	Total Realisasi	244.338.128.048	280.753.340.397	355.987.215.310

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Tabel.3.16
Proporsi Realisasi Belanja Operasi Terhadap Total Belanja
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2007-2009

No	Uraian	Th 2007	Th 2008	Th 2009
1	Belanja Pegawai	38.74	54.90	46.40
2	Belanja Barang	19.30	23.90	18.93
3	Belanja Bunga			
4	Subsidi			
5	Hibah	0.45	1.23	5.55
6	Bantuan Sosial	1.77	1.59	1.69
7	Bantuan Keuangan	2.59	1.12	1.17
	Total	62.85	82.74	73.75

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Tabel.3.17
Rincian Realisasi Belanja Modal
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006-2009

No	Uraian	Th 2007	Th 2008	Th 2009
1	Belanja Tanah	1.792.729.900	91.648.000	2.243.210.500
2	Belanja Peralatan dan Mesin	19.648.110.282	15.809.635.524	22.359.903.904
3	Belanja Bangunan dan Gedung	28.269.311.559	50.622.424.358	35.484.786.385
4	Belanja Jalan,	50.260.046.725	47.469.154.780	62.143.300.013

RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2015

	Irigasi, dan Jaringan			
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	5.759.075.700	466.751.650	1.080.106.500
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	35.342.048.175	-	-
	Total Realisasi	141.071.319.351	114,459,614,312	123.311.307.302

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Tabel.3.18
Proporsi Realisasi Belanja Modal terhadap Total Belanja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006-2009

No	Uraian	Th 2007	Th 2008	Th 2009
1	Belanja Tanah	0.46	0.03	0.46
2	Belanja Peralatan dan Mesin	5.05	4.66	4.63
3	Belanja Bangunan dan Gedung	7.27	14.92	7.35
4	Belanja, Jalan, Irigasi, dan Jaringan	12.93	13.99	12.87
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1.48	0.14	0.22
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	9.09		
	Total Realisasi	36.28	33.73	25.55

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Tabel.3.19
Rincian Realisasi Tidak Terduga Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006-2009

No	Uraian	Th 2007	Th 2008	Th 2009
	Belanja Tidak Terduga	3.084.791.000	4.094.632.000	3.189.268.750

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Tabel.3.20
Proporsi Realisasi Belanja Tidak Terduga terhadap Total Belanja Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006-2009

No	Uraian	Th 2007	Th 2008	Th 2009
	Belanja Tidak Terduga			

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Tabel.3.21
Rincian Realisasi Transfer Bagi Hasil Ke KAB/KOTA/DESA Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006-2009

No	Uraian	Th 2007	Th 2008	Th 2009
1	Bagi Hasil Pajak	100.000.000	666.920.000	126.389.907
2	Bagi Hasil Retribusi	199.229.740	159.600.000	90.125.767

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Sedangkan untuk tahun 2010 klasifikasi belanja daerah berdasarkan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung.

Tabel.3.22
Rincian Target Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	268.603.015.193	204.831.794.252	76.26
2	Belanja Hibah	16.400.000.000	15.742.108.710	95.99
3	Belanja Bantuan Sosial	9.110.000.000	3.121.734.530	34.27
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	360,000,000	284.009.807	78.89
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah desa	6.315.000.000	5.691.492.169	90.13
6	Belanja Tak Terduga	1,800,000,000	1.800.000.000	100.00
	Total Realisasi	302.588.015.193	231.471.139.468	76.50

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Tabel.3.23
Proporsi Realisasi Belanja Tidak Langsung terhadap Total Belanja
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010

No	Uraian	%
1	Belanja Pegawai	48.76
2	Belanja Hibah	3.75
3	Belanja Bantuan Sosial	0.74
4	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0.07
5	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan pemerintah desa	1.35
6	Belanja Tak Terduga	0.43
	Total Realisasi	55.10

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Tabel.3.24
Rincian Target dan Realisasi Belanja Langsung
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010

No	Uraian	Target	Realisasi	%
1	Belanja Pegawai	26.975.884.058	21.319.021.595	79,03
2	Belanja Barang dan Jasa	99.108.098.018	78.240.535.682	78,94
3	Belanja Modal	128.976.254.577	89.047.130.871	69,04
	Total Realisasi	255.060.236.653	188.606.688.148	73,95

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Tabel.3.25
Proporsi Realisasi Belanja Langsung Terhadap Total Belanja
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2010

No	Uraian	%
1	Belanja Pegawai	5.08
2	Belanja Barang dan Jasa	18.63
3	Belanja Modal	21.20
	Total Realisasi	44.90

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Dari tabel 3.12 sampai dengan 3.24 dapat dijelaskan realisasi beberapa jenis belanja selama periode RPJMD tahun 2006-2010 sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai sejak tahun 2006 sampai tahun 2010 terus mengalami peningkatan, untuk tahun 2006 realisasi belanja pegawai mencapai Rp.139,677,317,750 Pada tahun 2007 menjadi Rp. 150.610.350.877. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 mengalami peningkatan sebesar Rp. 10,933,033,127 (7,83%). Sedangkan untuk tahun 2008 belanja pegawai menjadi 186.296.796.271, untuk tahun 2009 mencapai Rp. 223.979.871.685, Jika dibandingkan dengan tahun 2008 mengalami peningkatan sebesar Rp. 37,683,075,414 (20.23%). Pada tahun 2010 belanja pegawai mencapai Rp. 226,150,815,847 dan apabila dibandingkan dengan tahun 2009 mengalami peningkatan hanya Rp. 2,170,944,162 (1%). Kenaikan belanja pegawai ini biasanya diiringi dengan naiknya Dana Alokasi Umum.

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa sejak tahun 2006 sampai tahun 2010 terus mengalami peningkatan. Kecuali untuk tahun 2010 mengalami penurunan dari Rp. 91.360.024.652 tahun 2009 menjadi Rp. 78.240.535.682 tahun 2010. Penurunan ini di karena menurunnya jumlah belanja untuk pembangunan dari belanja langsung.

c. Belanja Modal

Realisasi belanja modal yang terbesar pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp. 141.071.319.351 yaitu mencapai 36% dari total belanja. Untuk tahun 2008 realisasi belanja modal sebesar Rp.114,459,614,312 (29%) dari total belanja tahun 2008. Sedangkan untuk tahun 2009 jumlah realisasi belanja modal sebesar Rp. 123.311.307.302 (26%). Pada tahun 2010 realiasi belanja modal sebesar Rp. 89.047.130.871 atau 21% dari realiasasi belanja. Jika dibandingkan antara tahun 2009 dan tahun 2010 mengalami penurunan 28%.

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.

Realisasi belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa di Kabupaten Pasaman Barat adalah bantuan keuangan kepada 19 nagari berupa Dana Alokasi Untuk Nagari (DAUN), ditambah dana untuk

kesejahteraan para jorong di kabupaten Pasaman Barat. Untuk tahun 2007 realisasi belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp. 10.072.780.991. Untuk tahun 2008 realisasi Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 3,798,054,523 jika dibandingkan dengan target Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa untuk tahun 2008 yang terealisasi hanya 45%. Sedangkan untuk tahun 2009 terealisasi sebesar Rp. 5.667.786.473 atau 84%

e. Belanja Hibah

Belanja hibah adalah belanja daerah yang diperuntukkan ke Instansi Pemerintah Lainnya, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat, organisasi profesi, organisasi keagamaan, dan organisasi lainnya. Belanja hibah terus mengalami peningkatan tiap tahunnya karena realisasinya berdasarkan kebutuhan dan proposal kegiatan yang akan diadakan instansi, oragnisasi yang anggarannya tidak ada. Jika dilihat dari tabel diatas realisasi belanja hibah untuk tahun 2007 sebesar Rp. 1.738.915.000, naik menjadi Rp. 4.180.194.000 pada tahun 2008. Sedangkan untuk 2009 belanja hibah sangat signifikan sekali kenaikannya mencapai Rp.26.810.097.500 hal ini terkait dengan PEMILU Legislatif dan Pemilihan Presiden Putaran I dan Pemilihan Presiden Putaran Ke II. Karena Pemerintah Kabupaten sharing dana dengan pusat tentang biaya penyelenggaraan. Dimana Pemerintah Daerah menggarkannya lewat rekening belanja hibah yaitu Hibah ke Pemerintah Pusat melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sedangkan untuk tahun 2010 realisasi belanja hibah sebesar Rp. 15.742.108.710. Belanja hibah untuk tahun 2010 ini juga hibah ke KPU karena penyelenggaraan PEMILU KADA.

f. Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga sejak tahun 2006 s/d 2009 berkisar antara Rp.3,000,000,000 sampai dengan Rp. 4,250,000,000 sedangkan untuk tahun 2010 hanya Rp. 1,800,000,000. Belanja Tak Terduga direalisasikan bagi kegiatan yang tidak ada tertampung dalam APBD tahun berjalan dengan alasan bencana alam, kejadian luar biasa, dimana realisasi bersifat sementara dan dianggarkan tahun berikutnya. Realisasi Belanja Tak Terduga ini harus sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

3.3. ANALISA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan bagian dari struktur APBD yang tidak termasuk Pendapatan dan Belanja tetapi sangat penting artinya. Karena yang termasuk ke Pembiayaan Daerah antara lain; Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pembentukan Dana Cadangan dan Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Perkembangan SiLPA sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel.3.26
Realisasi SiLPA
Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2006-2010

No	Uraian	Th 2006	Th 2007	Th 2008	Th 2009	Th 2010
	SiLPA	86,104,250,209	73,557,055,205	97,499,739,248	63,311,725,550	51,456,894,430

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Perkembangan SiLPA pada APBD Kabupaten Pasaman Barat sejak tahun 2006 mengalami penurunan kecuali tahun 2008, SiLPA mencapai Rp.97,499,739,248. Untuk tahun 2009 SiLPA turun menjadi Rp.63,311,725,550 dan tahun 2010 menjadi Rp.51,456,894,430. SiLPA untuk tahun 2010 sudah termasuk luncturan pada DAK pada Dinas Pendidikan sebesar Rp 12.000.000.000. Dengan terus menurunnya SiLPA selama periode 2006 s/d 2010 hal ini menandakan realisasi APBD setiap tahun cukup baik.

3.4. Analisis Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran yang wajib.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

- Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
- Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
- Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
- Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
- Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Selanjutnya, untuk menentukan kapasitas riil keuangan daerah, dihitung dengan mengisi tabel, sebagai berikut:

Tabel.3.27
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
untuk Mendanai Pembangunan Daerah Dalam (000.000)

No.	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Pendapatan (rata-rata naik 10%)	544.400	598.840	658.724	724.596	797.055
2.	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	39.705	29.924	19.000	15.000	15.000

	Total penerimaan	584.105	628,764	677.724	739.596	812.055
	Dikurangi:					
3.	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama (Belanja Pegawai dan Tunjangan), rata-rata naik 15%	317.137	364.707	419.413	482.324	554,673
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	266.968	264.057	258.311	257.272	257.382

Sumber : APBD Kabupaten Pasaman Barat

Berdasarkan O dihitung rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran belanja langsung dan belanja tidak langsung dalam rangka pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan, dengan menggunakan tabel berikut:

Tabel.3.28
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Pasaman Barat Dalam (000.000)

No	Uraian	Proyeksi				
		Tahun 2011	Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
I	Kapasitas riil kemampuan keuangan	266.968	264.057	258.311	257.272	257.382
II	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I,					
	Belanja Langsung/Belanja Pembangunan	227.265	224.057	218.311	192.272	207.382
III	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II					
	Belanja Tidak Langsung diluar Gaji Pegawai dan Tunjangan yaitu Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga Belanja Langsung	39.703	40.000	40.000	65.000	50.000
	Total rencana Aloksi Prioritas I + Prioritas II					
	Surplus anggaran riil atau Berimbang (I-II)	-	-	-	-	-

Dari total dana alokasi pagu indikatif yang tersedia, kemudian dialokasikan ke berbagai program/kegiatan sesuai urutan prioritas. Prioritas program/kegiatan dipisahkan menjadi prioritas I, prioritas II dan prioritas III, dimana prioritas I mendapatkan prioritas pertama sebelum prioritas II. Prioritas III mendapatkan alokasi anggaran setelah prioritas I dan II terpenuhi kebutuhannya.

Prioritas I

Prioritas I merupakan program pembangunan daerah dengan program unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan sesuai dengan visi, misi, arah kebijakan yang disampaikan pada waktu pelaksanaan kampanye. Program prioritas I harus berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang

tinggi pada capaian visi/misi daerah. Di samping itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan merupakan program prioritas ditingkat SKPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan. Suatu prioritas I berhubungan dengan program/kegiatan unggulan SKPD yang paling berdampak luas pada masing-masing segementasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi SKPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu.

Prioritas II

Prioritas II merupakan prioritas yang dimaksudkan untuk alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas II harus memperhatikan (mendahulukan) pemenuhan dana pada prioritas I terlebih dahulu untuk menunjukkan urutan prioritas yang benar. Akan tetapi dalam prioritas II ada yang termasuk kedalam Visi Misi Bupati terpilih yaitu Pemberdayaan Pemerintahan Nagari dalam melaksanakan pembangunan.

BAB IV ANALISIS FAKTOR STRATEGIS

4.1. Analisis Faktor Strategis Internal

Memperhatikan fakta dan kenyataan yang dialami selama lima tahun terakhir baik dari hasil observasi lapangan maupun dari data statistik yang tersedia serta analisis capaian hasil pembangunan daerah di analisis pada bagian terdahulu, maka kekuatan dan kelemahan utama yang dialami dalam proses pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah seperti terlihat pada Tabel 2.11. Dalam hal ini penentuan faktor kekuatan dan faktor kelemahan utama dilakukan secara makro melalui penggabungan dari beberapa unsur terkait. Hal yang sama juga dilakukan untuk analisis faktor kelemahan yang terdapat dalam pelaksanaan proses pembangunan daerah. Hasil dari penggabungan tersebut ternyata dapat menunjukkan adanya 5 unsur kekuatan dan 5 kelemahan yang berkaitan erat dengan proses pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat dimasa lalu dan juga diperkirakan akan terus berlanjut kedepan sehingga akan mempengaruhi proses pembangunan daerah secara keseluruhan.

Kekuatan sosial-budaya utama yang terdapat pada Kabupaten Pasaman Barat adalah semakin baiknya pemahaman agama dan budaya yang dapat memberikan arah dan bimbingan terhadap proses pembangunan daerah sudah dirasakan sebagai kekuatan utama yang terdapat dalam masyarakat. Aspek ini perlu diberikan perhatian dan tekanan utama guna dijadikan dasar untuk menyusun strategi pembangunan daerah yang baik dan sesuai dengan kondisi daerah setempat dalam rangka mewujudkan Kabupaten Pasaman Barat yang maju dan sejahtera berbasis sumberdaya manusia yang agamais sebagaimana diharapkan masyarakat dalam jangka panjang.

Tabel 4.1
Analisis Faktor Strategis Internal

No.	Faktor Strategis Internal
A.	<i>Kekuatan</i>
1.	Kondisi dan kualitas agama dan budaya Minangkabau yang sudah baik sebagai acuan untuk mengarahkan dan mengendalikan kegiatan pembangunan daerah;
2.	Adanya kewenangan dan semangat yang cukup besar sebagai daerah otonomi baru untuk menggerakkan prtoses pembangunan daerah;
3.	Adanya kemampuan wirausaha dalam masyarakat yang cukup tinggi dan ulet untuk menggerakkan dan mengembangkan kegiatan ekonomi masyarakat;
4.	Tersedianya lahan yang cukup luas dan subur yang dapat dikelola untuk peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat ekonomi wilayah
B	<i>Kelemahan</i>
1.	Belum selarasnya tingkah laku dengan ajaran agama dan budaya daerah;
2.	Kualitas sumberdaya manusia, baik aparatur maupun masyarakat umum yang masih relatif rendah;
3.	Kemampuan penerapan dan kualitas IPTEK yang masih rendah dan belum berkembang dengan baik;
4.	Masih terbatasnya jumlah dan kualitas prasarana dan sarana perhubungan daerah yang menghambat pengembanganm kegiatan social dan ekonomi

No.	Faktor Strategis Internal
	masyarakat;
5.	Masih rendahnya kepastian hukum tanah ulayat sehingga menimbulkan iklim investasi yang belum kondusif;

Sementara itu, pengalaman di masa lalu menunjukkan pula bahwa kualitas sumberdaya manusia yang terdapat di Pasaman Barat adalah relatif baik. Kondisi ini tercermin dari perkembangan *Indek Pembangunan Manusia* (IPM) yang cukup menggembirakan. Kualitas sumberdaya yang relatif baik akan dapat dijadikan sebagai modal dasar untuk dapat mendorong proses pembangunan daerah berbasis sumberdaya manusia dalam rangka mewujudkan proses pembangunan daerah yang berlandaskan pada IPTEKS. Karena itu, unsur kualitas sumberdaya manusia ini juga dapat diberikan tekanan yang cukup tinggi dalam analisis faktor strategis sebagai faktor penggerak utama proses pembangunan daerah menuju masyarakat yang sejahtera.

Masyarakat Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana umumnya di Provinsi Sumatera Barat sampai saat ini terkenal mempunyai jiwa wirausaha yang cukup tinggi dan ulet. Kondisi yang demikian ditandai oleh banyaknya anggota masyarakat yang bergerak dan sukses dalam bidang perdagangan, industri rumahtangga dan jasa walaupun umumnya masih dalam skala kecil dan menengah (UKM). Semangat kewirausahaan ini merupakan modal dasar yang sangat penting untuk mendorong kegiatan ekonomi daerah ke depan pada berbagai sektor sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Berdasarkan analisis tersebut di atas, terlihat bahwa peranan dan kekuatan yang sangat penting diletakkan pada unsur agama dan budaya yang merupakan faktor pengarah pengendali kegiatan pembangunan daerah agar sesuai dengan kepentingan dunia dan akhirat. Aspek kedua yang juga dijadikan sebagai landasan utama dari kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat adalah kualitas sumberdaya manusia walaupun kondisinya dewasa ini ternyata masih belum sebagaimana yang diharapkan. Unsur berikutnya adalah kemampuan wirausaha masyarakat daerah yang cukup tinggi dan ulet. Terakhir kondisi prasarana dan sarana perhubungan daerah yang sudah memadai dapat pula dijadikan sebagai landasan untuk menggerakkan proses pembangunan kedepan.

Namun demikian, tidak dapat disangkal pula bahwa terdapat aspek-aspek penting yang merupakan kelemahan utama yang terdapat di Pasaman Barat. Unsur kelemahan pertama yang sangat dirasakan sekali sampai saat ini adalah belum selarasnya tingkah laku masyarakat dengan hukum dan kaedah yang terdapat dalam ajaran agama. Akibatnya, banyak sekali upaya-upaya pembangunan yang baik belum dapat diraih manfaatnya semaksimal mungkin untuk peningkatan proses pembangunan daerah karena tingkah laku masyarakat dan pemerintah yang kurang wajar.

Kelemahan selanjutnya adalah menyangkut dengan kondisi geografis dan posisi Pasaman Barat yang kurang strategis bagi pengembangan ekonomi daerah. Sebagaimana diketahui bahwa kondisi daerah adalah berbukit-bukit sehingga angkutan barang menjadi relatif tinggi sehingga menimbulkan kendala bagi pengembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa. Sementara itu, daerah juga mempunyai hutan lindung yang cukup luas sehingga lahan yang dapat digunakan untuk kegiatan pertanian dan pertambangan juga sangat terbatas. Disamping itu, letak daerah yang berada di pantai Barat pulau Sumatera ternyata

membelakangi pusat kegiatan ekonomi dunia, yaitu Singapura, Hongkong, Jepang, Korea dan China, yang semuanya berada di Timur. Akibatnya sinergi antar perekonomian Pasaman Barat dengan negara-negara maju menjadi sangat lemah sehingga pertumbuhan ekonomi daerah cenderung lambat.

Kondisi prasarana dan sarana, terutama perhubungan yang terdapat di Pasaman Barat ternyata belum memadai. Kondisi ini semakin diperburuk dengan sering terjadinya bencana alam (longsor, banjir dan gempa bumi). Kondisi prasarana dan sarana pembangunan ini sangat penting artinya dan perlu terus dikembangkan guna mendorong proses pembangunan daerah dimasa mendatang.

Kelemahan lainnya adalah menyangkut dengan kemampuan IPTEKS daerah yang masih sangat rendah sehingga kemampuan untuk memanfaatkan sumberdaya alam yang tersedia menjadi sangat terbatas. Disamping itu, IPTEKS yang rendah juga mengakibatkan efisiensi dan kualitas produk yang dapat dihasilkan menjadi relatif kurang baik. Kondisi ini selanjutnya mengakibatkan masih rendahnya daya saing produk yang dapat dihasilkan sehingga menimbulkan kendala sangat serius dalam mengembangkan kegiatan ekonomi daerah. Kendala ini menjadi semakin serius dalam era globalisasi dan perdagangan bebas dimana tingkat persaingan menjadi sangat tajam.

Pasaman Barat yang masyarakatnya menganut budaya Minangkabau memiliki tanah ulayat cukup luas yang dimiliki oleh kaum. Permasalahan yang dihadapi adalah tanah ulayat yang dimiliki tidak mempunyai kepastian hukum, karena tidak mempunyai bukti kepemilikan serta batas-batas tanah yang tidak jelas. Kondisi ini mengakibatkan pemanfaatan tanah ulayat sulit untuk mendukung kegiatan usaha dan menarik investor menjadi

4.2. Analisis Faktor Strategis Eksternal

Sebagaimana terlihat pada Tabel 4.1 dalam analisis faktor strategis eksternal terdapat 4 peluang dan 3 ancaman utama bagi terlaksananya proses pembangunan daerah Pasaman Barat yang cepat dan berkelanjutan. Peluang ini pada dasarnya merupakan faktor luar yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan daerah. Sedangkan ancaman adalah aspek-aspek yang sering muncul dan membahayakan keberlanjutan proses pembangunan daerah Sumatera Barat.

Peluang pembangunan utama yang cukup menentukan adalah semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah sehingga kewenangan dan peranan pemerintah daerah dalam menggerakkan proses pembangunan menjadi semakin besar. Hal ini sangat penting artinya untuk dapat mendorong inspirasi dan kreasi daerah dalam memanfaatkan potensi sumberdaya pembangunan yang tersedia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Tabel 4.2
Analisis Faktor Strategis Eksternal

No.	Faktor Strategis Eksternal
A.	<i>Peluang</i>
1.	Semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah
2.	Meningkatnya kebutuhan dan daya beli sebagai hasil peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
3.	Potensi ekonomi daerah yang cukup besar terutama dalam bidang perkebunan

	yang dapat dijadikan motor penggerak utama pembangunan daerah;
4.	Semakin besarnya dukungan pemerintah nasional terhadap pembangunan daerah
B	Ancaman
1.	Kondisi daerah yang rawan bencana alam, gempa dan tsunami yang meresahkan masyarakat
2.	Semakin rendahnya moral masyarakat yang tercermin dari meningkatnya budaya KKN di daerah
3.	Meningkatnya ancaman persaingan sebagai akibat diberlakukannya Kawasan Perdagangan Bebas China-ASEAN (CAFTA).

Peluang pembangunan berikutnya yang juga terbuka dan dapat dimanfaatkan untuk mendorong proses pembangunan daerah adalah karena semakin meningkatnya kebutuhan dan daya beli masyarakat daerah sebagai hasil dari peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kebutuhan dan daya beli ini selanjutnya memicu peningkatan permintaan efektif yang dapat mendorong kegiatan investasi ke daerah. Peningkatan kegiatan investasi ini selanjutnya akan mendorong pula peningkatan penyediaan lapangan kerja dan sumber penghasilan masyarakat dan pemerintah daerah sendiri.

Peluang pembangunan berikutnya yang tersedia dewasa ini adalah masih tetap besarnya dukungan pemerintah nasional terhadap kegiatan pembangunan di Kabupaten Pasaman Barat. Peluang ini ditunjukkan dari masih besarnya dana dekonsentrasi (APBN) yang dialokasikan untuk pembangunan kegiatan dan proyek berskala besar di daerah Pasaman Barat. Dana dekonsentrasi yang cukup besar ini perlu disinergikan dengan dana APBD sehingga dapat memberikan manfaat yang optimal untuk meningkatkan kegiatan pembangunan daerah.

Ancaman yang juga serius dialami oleh Pasaman Barat adalah karena ternyata daerah ini rawan terhadap bencana alam seperti gempa, tanah longsor dan banjir. Bencana alam ini sudah sering terjadi dan akibat negatifnya sangat dirasakan terhadap kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu antisipasi dan program-program untuk penanggulangan dampak dari bencana tersebut perlu terus disiapkan untuk melindungi masyarakat Sumatera Barat.

Walaupun masyarakat Pasaman Barat adalah sangat agamais dan didominasi oleh pemeluk agama Islam, namun demikian kenyataan menunjukkan bahwa tingkah laku masyarakat tersebut seringkali belum sejalan dengan ajaran agama tersebut. Hal ini terlihat dari masih sangat tingginya budaya korupsi, penipuan, kekerasan dan perbuatan tidak bermoral. Hal ini ternyata sangat mengancam proses pembangunan daerah karena apa yang telah direncanakan dan ditetapkan kemudian ternyata pelaksanaannya jauh berbeda karena terjadinya tindakan-tindakan yang tidak seharusnya terjadi.

Ancaman berikutnya yang terjadi pada akhir-akhir ini adalah dalam bentuk peningkatan persaingan sebagai akibat dari adanya globalisasi dan pelaksanaan *Kawasan Perdagangan Bebas China-ASEAN (CAFTA)* yang secara resmi mulai berlaku tahun 2010. Peningkatan persaingan ini akan menjadi ancaman karena daya saing produk yang dapat dihasilkan oleh Pasaman Barat umumnya masih rendah sebagai cerminan dari rendahnya tingkat efisiensi dan penggunaan teknologi yang belum maju. Karena itu, upaya untuk meningkatkan efisiensi produksi dan penggunaan teknologi produksi maju dan tepat guna merupakan hal yang strategis untuk meningkatkan pembangunan Pasaman Barat kedepan.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004, visi dan misi pembangunan jangka menengah adalah visi dan misi Kepala Daerah yang terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada). Visi dan misi ini dijadikan dasar utama penyusunan kebijakan umum pembangunan daerah dalam RPJMD ini karena telah disetujui oleh mayoritas masyarakat Kabupaten Pasaman Barat yang dibuktikan oleh hasil pemungutan suara dalam pemilukada 2010 yang lalu. Hal ini dilakukan sesuai dengan prinsip pembangunan dalam era demokratisasi dan otonomi yaitu seluruh kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dengan keinginan dan aspirasi masyarakat daerah secara keseluruhan.

Visi jangka menengah daerah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat pada 5 tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada visi misi jangka panjang daerah sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Pasaman Barat 2005-2025. Disamping itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan umum daerah dewasa ini, prediksi untuk 5 tahun mendatang dan keinginan, aspirasi serta cita-cita yang berkembang dalam masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, visi ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai oleh Kabupaten Pasaman Barat.

V.1 Visi Jangka Menengah Daerah

Visi pembangunan jangka menengah pada dasarnya merupakan kondisi objektif yang diinginkan dapat dicapai oleh masyarakat Kabupaten Pasaman Barat untuk 5 tahun mendatang. Kondisi yang diinginkan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada aspirasi dan keinginan masyarakat setempat yang diperoleh melalui penjangkaran aspirasi masyarakat sebagaimana telah dilakukan sebelumnya. Disamping itu, visi tersebut juga ditetapkan dengan memperhatikan keadaan umum daerah dewasa ini dan prediksi untuk 5 tahun mendatang. Dengan demikian, visi yang dirumuskan ini sebenarnya adalah merupakan kondisi realistis yang diharapkan akan dapat dicapai oleh seluruh warga Kabupaten Pasaman Barat dimasa mendatang.

Visi pembangunan pada RPJM ini diformulasikan dalam bentuk yang ringkas dan singkat, tapi padat, sehingga mudah difahami dan diingat oleh seluruh lapisan masyarakat. Bila masyarakat sudah memahami dan mengingat visi tersebut, maka diharapkan akan dapat pula mempedomaninya dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari serta menjadikannya sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan gerak langkah pembangunan daerah dalam jangka panjang. Bila hal ini dapat diwujudkan, diharapkan partisipasi masyarakat dalam menggerakkan dan sekaligus mengawasi kegiatan pembangunan akan pula dapat dioptimalkan sehingga terwujud keterpaduan dan keserasian antara peranan pemerintah daerah, peranan masyarakat, dan dunia usaha dalam proses pembangunan daerah secara keseluruhan.

Visi jangka menengah kepala daerah terpilih Kabupaten Pasaman Barat untuk periode 2011-2015 adalah sebagai berikut:

*“Membangun Pasaman Barat diatas Tadah Agama
untuk Kesejahteraan Umat Dunia dan Akhirat “*

V.2 Misi

Sesuai dengan harapan terwujudnya visi “Membangun Pasaman Barat diatas Tadah Agama untuk Kesejahteraan Umat Dunia dan Akhirat”, maka ditetapkan “Misi Pembangunan Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2015” sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kehidupan beragama serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, seni dan budaya untuk menjaga kerukunan hidup bermasyarakat;
2. Menciptakan pemerintahan yang bersih,berwibawa dan bebas KKN, memelihara harmonisasi antar lembaga, mengembalikan hak dan fungsi tanah ulayat serta menegakkan supremasi hukum;
3. Melaksanakan pembangunan berbasis nagari (1 Milyar/ Nagari), meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan (koperasi), mengurangi pengangguran melalui kegiatan padat karya;
4. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan menguasai teknologi;
5. Menggali dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan.

V.3 Tujuan dan Sasaran

Penetapan tujuan, sasaran pembangunan di dasarkan pada penetapan visi dan misi pembangunan. Tujuan dan sasaran dirumuskan dalam bentuk yang lebih tepat dan terarah dalam rangka mencapai visi dan misi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Kabupaten Pasaman Barat dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya daerah dan kemampuan yang dimiliki baik aktual maupun potensial.

Sasaran pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan memantau pencapaian kinerja Kabupaten Pasaman Barat serta lebih menjamin suksesnya pelaksanaan rencana jangka panjang yang sifatnya menyeluruh.

Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dapat dicapai.

Tabel V.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kabupaten Pasaman Barat

Visi : Membangun Pasaman Barat diatas Tadah Agama untuk Kesejahteraan Umat Dunia dan Akhirat
--

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Meningkatkan kehidupan beragama serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, seni dan budaya untuk menjaga kerukunan hidup bermasyarakat;	1. Penerapan Ajaran Agama dan Budaya Daerah	1. Penerapan dan Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan Masyarakat
		2. Pengembangan Kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur
2. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan bebas KKN, memelihara harmonisasi antar lembaga, mengembalikan hak dan fungsi tanah ulayat serta menegakkan supremasi hukum;	2. Pembangunan Hukum dan pemerintahan	3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan
		4. Peningkatan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban dan menegakkan supremasi hukum
3. Melaksanakan pembangunan berbasis nagari (1 Milyar/ Nagari), meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan (koperasi), mengurangi pengangguran melalui kegiatan padat karya;	3. Peningkatan ekonomi	5. Pengembangan Pertanian, pangan, peternakan dan perkebunan
		6. Pengembangan Perikanan dan Kelautan
		7. Pengembangan agro industri, Jasa, perdagangan, investasi dan pariwisata
		8. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)
		9. Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan
		10. Pemberdayaan masyarakat, peningkatan partisipasi perempuan dan kesejahteraan keluarga
		11. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat
4. Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan menguasai teknologi;	4. Pembangunan kualitas sumber daya manusia	12. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan;
		13. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
		14. Peningkatan Kualitas Pemuda dan Pembangunan Olahraga
5. Menggali dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dalam pembangunan yang	5. Perbaikan kualitas lingkungan	15. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana
		16. Pelestarian Lingkungan Hidup

berwawasan lingkungan.	hidup sesuai dengan penataan ruang	17. Pemanfaatan sumber daya alam
		18. Penataan ruang wilayah

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi

Strategi dan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk periode tahun 2011-2015 ditetapkan dengan memperhatikan kondisi umum daerah serta analisis faktor strategis sebagaimana dibahas pada Bab II terdahulu. Kedua hal ini perlu dijadikan sebagai dasar pertimbangan utama agar perumusan strategi pembangunan daerah tersebut benar-benar sesuai dan didasarkan pada kondisi dan permasalahan umum daerah serta faktor-faktor strategis pembangunan, sehingga sesuai dengan kenyataan riil dan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten Pasaman Barat dewasa ini.

Teknis perumusan strategi pembangunan daerah ini dilakukan dengan menggunakan *Matrix SWOT* yang terdapat pada Tabel VI.1 sebagai dasar. Pada matrik ini dicantumkan kembali unsur-unsur penting yang termasuk dalam faktor internal maupun eksternal yang diurut berdasarkan tingkat kepentingannya dalam mendorong proses pembangunan daerah. Berdasarkan *Matrix SWOT* ini terdapat 4 kuadran yang berisikan kelompok strategi pembangunan daerah yang disusun dengan menghubungkan dua unsur faktor strategis yang terkait. Keempat kelompok strategi tersebut adalah: Strategi S-O (Kuadran I), Strategi S-T (Kuadran II), Strategi W-O (Kuadran III) dan Strategi W-T (Kuadran IV).

Strategi S-O dirumuskan dengan jalan memanfaatkan kekuatan yang dimiliki daerah untuk merebut peluang pembangunan yang tersedia. *Strategi S-T* dihasilkan dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki daerah untuk menghilangkan ancaman pembangunan yang diperkirakan dapat terjadi. *Strategi W-O* dirumuskan dengan jalan mengurangi kelemahan yang terdapat di daerah untuk merebut peluang pembangunan yang tersedia. Sedangkan *Strategi W-T* dihasilkan dengan jalan mengatasi kelemahan yang terdapat di daerah untuk menghilangkan ancaman pembangunan yang mungkin terjadi.

Tabel VI.1
Perumusan Strategi Pembangunan Daerah Menggunakan Matrik SWOT

	FAKTOR EKSTERNAL		
	Peluang	Ancaman	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah. 2. Meningkatnya kebutuhan dan daya beli sebagai hasil peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. 3. Semakin berkembangnya perekonomian daerah tetangga sebagai faktor pendorong pembangunan ekonomi daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya moral masyarakat yang tercermin dari peningkatan budaya KKN dan kekerasan. 2. Kondisi daerah yang rawan bencana alam, gempa dan tsunami yang meresahkan masyarakat. 3. Meningkatnya persaingan antar provinsi tetangga dan sebagai akibat diberlakukannya Kawasan Perdagangan Bebas China-ASEAN (CAFTA). 	
FAKTOR INTERNAL	<p align="center">Kekuatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman Agama dan budaya Minangkabau yang relatif baik 2. Adanya kewenangan dan semangat yang cukup besar sebagai daerah otonomi baru untuk menggerakkan proses pembangunan daerah; 3. Kemampuan wirausaha masyarakat yang relatif tinggi dan ulet 4. Teersewainya lahan yang cukup luas dan subur yang dapat dikelola untuk peningkatan ekonomi daerah 	<p align="center">S-O Strategy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarahkan proses pembangunan daerah berdasarkan ajaran agama dan budaya; 2. Peningkatan kegiatan pembangunan daerah melalui pemanfaatan kualitas pendidikan, kesehatan dan IPTEKS tepat guna; 3. Pengembangan dunia usaha daerah dengan memanfaatkan keterkaitan ekonomi antar daerah 4. Pengembangan perusahaan sector pertanian, khususnya perkebunan sawit untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat 	<p align="center">S-T Strategy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan penerapan ajaran agama untuk perbaikan moral dan ahklak masyarakat; 2. Peningkatan pemanfaatan IPTEKS untuk pencegahan dan penanggulangan dampak bencana alam; 3. Pengembangan kemampuan wirausaha untuk meningkatkan daya saing baik pada tingkat regional, nasional dan internasional
	<p align="center">Kelemahan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Belum selarasnya tingkah laku masyarakat dengan ajaran agama dan budaya daerah 2. Masih sangat terbatasnya prasarana dan sarana pembangunan daerah 3. Kemampuan IPTEKS daerah masih rendah dan belum berkembang 4. Belum tegasnya hak kepemilikan tanah ulayat; 5. Masih tingginya tingkat pengangguran dan kemiskinan 6. Masih relatif rendahnya kualitas lingkungan 	<p align="center">W-O Strategy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki tingkah laku masyarakat sejalan dengan agama dan budaya daerah 2. Pengembangan prasarana dan sarana perhubungan untuk mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat; 3. Pengembangan kemampuan IPTEKS untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan daerah; 4. Meningkatkan ketegasan hak kepemilikan tanah ulayat melalui pelaksanaan sertifikasi tanah berdasarkan hukum adat. 5. Peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan pengangguran dan kemiskinan 6. Peningkatan kualitas lingkungan dan pembangunan secara berkelanjutan 	<p align="center">W-T Strategy</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pendidikan dan penerapan ajaran agama sebagai penuntun kehidupan dan perilaku masyarakat; 2. Melakukan mitigasi dan pengurangan resiko terhadap kemungkinan dampak negatif yang terjadi akibat bencana alam; 3. Pengembangan kemampuan IPTEKS untuk meningkatkan daya saing daerah.

Mengikuti prosedur yang ditetapkan oleh sistem Matrix SWOT tersebut maka dapat dirumuskan 9 strategi pokok yang dapat ditetapkan untuk meningkatkan dan mendorong proses pembangunan daerah Pasaman Barat secara keseluruhan. Strategi ini ternyata lebih sedikit jumlahnya dibandingkan dengan apa yang dihasilkan pada Tabel VI.1 karena sudah dilakukannya penggabungan beberapa

strategi yang menyangkut dengan hal yang sama untuk menghilangkan unsur tumpang tindih.

Strategi pokok pembangunan daerah tersebut adalah sebagai berikut

1. Peningkatan penerapan ajaran agama dan budaya daerah untuk memperbaiki moral dan akhlak masyarakat khususnya dan mengarahkan dan mendorong proses pembangunan daerah Sumatera Barat umumnya, melalui perbaikan pola pendidikan agama, pengajaran, dakwah dan bimbingan;
2. Meningkatkan daya saing produk dipasaran regional, nasional dan internasional melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan pemanfaatan IPTEKS tepat guna untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produk;
3. Pengembangan kegiatan perusahaan sektor pertanian, khususnya perkebunan sawit untuk peningkatan perekonomian daerah dan kesejahteraan masyarakat;
4. Peningkatan kemampuan kewirausahaan masyarakat daerah untuk mendorong pengembangan dunia usaha, meningkatkan kesempatan berusaha dan penambahan penyediaan lapangan kerja di daerah;
5. Pengembangan prasarana dan sarana perhubungan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial dan mempercepat proses pembangunan daerah;
6. Melakukan antisipasi secara dini tentang kemungkinan terjadinya bencana alam, seperti banjir, tanah longsor dan gempa bumi untuk mengatasi dampak negatif yang dapat ditimbulkan terhadap masyarakat karena terjadinya bencana alam tersebut;
7. Meningkatkan ketegasan hak kepemilikan tanah ulayat melalui pelaksanaan sertifikasi tanah berdasarkan hukum adat..
8. Peningkatan investasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penanggulangan pengangguran dan kemiskinan
9. Peningkatan kualitas lingkungan dan pembangunan secara berkelanjutan

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Penyajian strategi dan arah kebijakan, disajikan dalam tabel berikut.

Tabel VI. 2
Strategi, Arah dan Kebijakan Kabupaten Pasaman Barat

VISI	: Membangun Pasaman Barat diatas Tadah Agama untuk Kesejahteraan Umat Dunia dan Akhirat
MISI I	: Meningkatkan kehidupan beragama serta menjunjung tinggi nilai-nilai adat istiadat, seni dan budaya untuk menjaga kerukunan hidup bermasyarakat;

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah kebijakan
1. Penerapan Ajaran Agama dan Budaya Daerah	1. Penerapan dan Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan Masyarakat	1. Peningkatan Akses Informasi Keagamaan 2. Kaderisasi dan Revitalisasi Tenaga Penggerak Keagamaan 3. Efektifitas pemanfaatan dan peningkatan sarana keagamaan 4. Revitalisasi lembaga-lembaga pendidikan formal dan pesantren 5. Peningkatan Pemahaman Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan nilai-nilai keagamaan
	2. Pengembangan Kebudayaan yang berlandaskan nilai-nilai luhur	6. Mengembangkan kelembagaan masyarakat adat dan meningkatkan peran ulama, ninik mamak dan cendekiawan dalam penerapan nilai-nilai adat, seni dan budaya 7. Memupuk rasa solidaritas sosial serta mengembangkan toleransi terhadap perbedaan budaya sehingga dapat menumbuhkan kebersamaan dan kerukunan 8. Mengembangkan pendidikan budaya mulai sejak usia dini dengan mendorong tumbuhnya partisipasi yang luas dalam masyarakat 9. Mengembangkan iklim dan suasana kehidupan seni dan budaya yang kondusif
MISI II : Menciptakan pemerintahan yang bersih,berwibawa dan bebas KKN, memelihara harmonisasi antar lembaga, mengembalikan hak dan fungsi tanah ulayat serta menegakkan supremasi hukum		
Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah kebijakan
2. Pembangunan Hukum dan pemerintahan	3. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Pemerintahan	10. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM apratur dalam bidang tugasnya 11. Meningkatnya etos kerja dan disiplin aparatur dalam menjalankan tugasnya 12. Melakukan penataan terhadap organasasi tata kerja pemerintah menuju kecil organisasi kaya fungsi. 13. Menciptakan standarisasi jabatan untuk mewujudkan manajemen aparatur yang berlandaskan pada keahlian (maritokrasi) 14. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi antara daerah dan stakeholders pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. 15. Meningkatkan fungsi dan peranan pemerintahan nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 16. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah kebijakan
		<p>pengelolaan keuangan daerah serta perbaikan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah</p> <p>17. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.</p> <p>18. Pengendalian kependudukan dan pembinaan administrasi kependudukan</p> <p>19. Peningkatan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik</p>
	4. Peningkatan Keamanan, Ketentraman, Ketertiban dan menegakkan supremasi hukum	<p>20. Peningkatan rasa aman, tertib, melalui upaya pencegahan terjadinya tindakan kriminalitas dan gangguan keamanan lainnya.</p> <p>21. Peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan kemungkinan konflik dan mengatasi konflik yang terjadi</p> <p>22. Pembangunan produk hukum daerah yang aspiratif yang mewadahi nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat</p> <p>23. Pembinaan, penyusunan, dan pengawasan serta evaluasi produk hukum daerah dalam rangka penegakan HAM, dan investasi</p> <p>24. Peningkatan kesadaran hukum warga masyarakat</p> <p>25. Meningkatkan kualitas hidup berbangsa dan bernegara atas dasar penghargaan dan penghormatan kebhinekaan dan perbedaan.</p>
<p>MISI III : Melaksanakan pembangunan berbasis nagari (1 Milyar/ Nagari), meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sistem ekonomi kerakyatan (koperasi), mengurangi pengangguran melalui kegiatan padat karya</p>		
Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah kebijakan
3. Pembangunan Ekonomi	5. Pengembangan Pertanian, pangan, peternakan dan perkebunan	<p>26. Membangun sistem ketahanan dan keamanan pangan di tingkat kabupaten yang dapat menjamin ketahanan pangan di tingkat rumah tangga.</p> <p>27. Membangun dan mengembangkan sistem pertanian terpadu berbasis bahan organik ;</p> <p>28. Merevitalisasi sistem kelembagaan dalam penyuluhan pertanian/ pendampingan terhadap petani tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan</p> <p>29. Meningkatkan kemampuan/ kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha Pertanian, Perkebunan dan peternakan</p>
	6. Pengembangan	30. Pengembangan dan pengelolaan

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah kebijakan
	Perikanan dan Kelautan	<p>perikanan tangkap di perairan Barat Sumatera.</p> <p>31. Pengembangan perikanan budidaya.</p> <p>32. Peningkatan infrastruktur dan daya saing produksi perikanan.</p> <p>33. Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan baik secara sustainable</p> <p>34. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.</p> <p>35. Pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan.</p>
	7. Pengembangan agro industri, Jasa, perdagangan, investasi dan pariwisata	<p>36. Meningkatkan daya saing komoditi ekspor melalui pengembangan teknologi dan efisiensi produksi</p> <p>37. Mendorong dan memfasilitas pengembangan komoditi ekspor menuju daerah-daerah pemasaran baru</p> <p>38. Mendorong pengembangan kegiatan perdagangan dalam negeri melalui perbaikan dan pengembangan fasilitas pasar;</p> <p>39. Menyediakan jaminan resiko dan kredit bagi usaha agro industri dan agro bisnis pertanian</p> <p>40. Perwilayahan Industri Agro melalui Penataan areal lokasi industri pengolahan sub sector perkebunan, perikanan, dan peternakan.</p> <p>41. Peningkatan fasilitasi investasi dan Promosi Investasi</p> <p>42. Mengembangkan industri pariwisata dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan peluang usaha yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.</p> <p>43. Mengembangkan destinasi pariwisata dengan mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata, mengembangkan kawasan strategis dan daya tarik pariwisata berbasis wisata bahari, alam, dan budaya.</p> <p>44. Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif, serta menguatkan strategi pemasaran dan promosi pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>45. Mengembangkan sumber daya pariwisata dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah kebijakan
		pariwisata lokal, meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan kepariwisataan.
	8. Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)	<p>46. Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UKM melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>47. Mendorong terwujudnya kemitraan Koperasi dan UKM dengan usaha besar dalam bentuk kerjasama saling memerlukan dan saling menguntungkan</p> <p>48. Meningkatkan bantuan dana bergulir dari APBD/APBN, perusahaan BUMN, perusahaan swasta nasional/asing dan sumber dana lainnya sehingga selalu tersedia dana murah yang dapat diakses oleh Koperasi dan UKM.</p> <p>49. Menyediakan bantuan asuransi kredit bagi Koperasi UKM yang ingin mendapatkan akses ke perbankan</p> <p>50. Meningkatkan peran lembaga pemasaran (trading house) untuk mendorong pertumbuhan Koperasi dan UKM..</p> <p>51. Menyediakan fasilitas produksi bersama (common service facilities) di sentra-sentra produksi kerajinan rakyat yang dilaksanakan dalam skala mikro dan rumah tangga.</p>
	9. Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan	<p>52. Pengembangan kesempatan kerja dengan mendorong perluasan kesempatan kerja</p> <p>53. Peningkatan kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial perlindungan kerja serta kebebasan berserikat.</p> <p>54. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, keterampilan, kompetensi dan kemandirian melalui pendidikan dan pelatihan</p> <p>55. Peningkatan dan pemberdayaan SDM Transmigrasi melalui penempatan, pendidikan dan pelatihan</p> <p>56. Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam pengembangan kawasan transmigrasi</p> <p>57. Meningkatkan Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmigrasi</p> <p>58. Menurunkan jumlah penduduk miskin terutama di daerah pesisir pantai, tertinggal dan terisolir</p> <p>59. Meningkatkan daya beli masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar pangan</p>
	10. Pemberdayaan Masyarakat,	60. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah kebijakan
	Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga	lembaga ekonomi dalam membangun desa/ Nagari 61. Meningkatkan kapasitas aparaturnya dan kelembagaan pemerintah desa/ nagari 62. meningkatkan kualitas SDM perempuan, kedudukan dan perannya dalam pembangunan daerah 63. Meningkatkan kesejahteraan, Keluarga berencana dan perlindungan anak terutama bidang kesehatan, pendidikan maupun hukum 64. Peningkatan kelembagaan perlindungan terhadap anak dan orang tua usia lanjut
	11. Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat	65. Memaksimalkan perencanaan, pengawasan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan. 66. Pengembangan jalan baru diarahkan kepada daerah potensial yang masih terisolasi dan membuka hubungan ke pusat-pusat perkembangan ekonomi 67. Meningkatkan peranan Swasta dan Masyarakat dalam pembangunan jalan dan jembatan 68. Meningkatkan dan mengembangkan sistem saluran irigasi melalui kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan swadaya masyarakat 69. Memadukan pembangunan saluran irigasi dengan pembangunan sistem drainase, pembuangan air limbah, dan lain-lain. 70. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap bendungan dan saluran irigasi yang sudah ada sehingga berfungsi dengan baik. 71. Mengembangkan dan optimalisasi sumberdaya dan potensi energi/ energi baru dan terbarukan. 72. Mengembangkan infrastruktur jaringan dan penyediaan pembangkit listrik dari energi pemenuhan tenaga listrik terutama daerah tertinggal (Kawasan Pesisir dan Pegunungan). 73. Menciptakan pemerataan dan pemenuhan distribusi energi yang tepat dan efisien. 74. Mengembangkan sistem pelayanan informasi dan promosi dalam rangka menarik minat investor khususnya di bidang pengembangan energi. 75. Melaksanakan pengendalian/pemantauan/ pengawasan

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah kebijakan
		<p>terhadap pencurian arus listrik oleh masyarakat.</p> <p>76. Penyediaan lahan yang diperlukan bagi investor dalam pemenuhan sarana dan prasarana telekomunikasi.</p> <p>77. Memberi berbagai kemudahan dan informasi kepada calon investor secara reguler tentang peluang investasi yang tersedia dalam bidang telekomunikasi</p> <p>78. Menambah jaringan telepon di semua daerah Pasaman Barat</p> <p>79. Meningkatkan pelayanan Telekomunikasi Pos dan Giro</p> <p>80. menyediakan perumahan dan pemukiman layak huni yang akan diprioritaskan bagi penduduk berpenghasilan rendah</p> <p>81. peningkatan kapasitas terpasang debit air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat</p> <p>82. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan</p> <p>83. Mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.</p> <p>84. Meningkatkan Prasarana dan Sarana perhubungan</p> <p>85. Meningkatkan Sarana dan Fasilitas Lalulintas</p> <p>86. Meningkatkan Disiplin dan Keselamatan Lalulintas</p>
MISI IV : Mewujudkan masyarakat sehat, cerdas dan menguasai teknologi		
Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah kebijakan
4. Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia	12. Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan;	<p>87. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan</p> <p>88. Peningkatan Kualitas Pendidikan yang Tinggi dan Dilandasi Moral Agama dan beretika.</p> <p>89. Peningkatan Relevansi Pendidikan</p> <p>90. Peningkatan Pengelolaan, Penegakkan aturan (Kode Etik Guru), Pengawasan dan Manajemen</p> <p>91. Meningkatkan Pendidikan Nonformal</p> <p>92. Meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sektor produksi melalui upaya-upaya penyuluhan yang sesuai dengan kondisi masyarakat,</p> <p>93. Mengembangkan budaya IPTEKS di kalangan masyarakat.</p> <p>94. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perpustakaan dan kearsipan</p>

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah kebijakan
		95. Menyempurnakan sistem dan pengelolaan kearsipan 96. Meningkatkan layanan perpustakaan dan minat baca siswa/masyarakat
	13. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	97. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama antar kabupaten, dengan provinsi dan nasional. 98. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan berkeadilan, serta berbasis bukti, dengan pengutamaan pada upaya promotif – preventif. 99. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional. 100. Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang merata dan bermutu. 101. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan. 102. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan desentralisasi kesehatan yang bertanggung jawab.
	14. Peningkatan Kualitas Pemuda dan Pembangunan Olahraga	103. Peningkatan koordinasi dan keterpaduan pembinaan kegiatan olahraga 104. Meningkatkan prestasi dan Memasyarakatnya kegiatan olahraga 105. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam menggerakkan olahraga 106. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang sesuai dengan pengembangan bakat dan minat pemuda serta peran sertanya dalam pembangunan 107. Pemberdayaan pemuda, pengembangan kepeloporan/ kreatifitas pemuda dan pemberdayaan organisasi kepemudaan
MISI V : Menggali dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dalam pembangunan yang berwawasan lingkungan		

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah kebijakan
Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah kebijakan
5. Perbaikan kualitas lingkungan hidup sesuai dengan penataan ruang	15. Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	108. Mengembangkan sistem informasi sumber daya alam untuk mendukung pengambilan keputusan dan mitigasi bencana alam 109. Memperkuat kapasitas, kualitas dan kesiapan pengelolaan dan penanganan dampak bencana alam
	16. Pelestarian Lingkungan Hidup	110. Peningkatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan pada air, lahan, udara dan keanekaragaman hayati, serta pengendalian bencana alam 111. Peningkatan penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan 112. Peningkatan upaya penegakan hukum lingkungan secara konsisten 113. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan ekosistem pesisir dan laut 114. Peningkatan pengelolaan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penanganan persampahan 115. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta peningkatan akses informasi lingkungan. 116. Peningkatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara Terpadu
	17. Pemanfaatan sumber daya alam	117. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna 118. Peningkatan pengelolaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan serta peningkatan daya dukung DAS. 119. Peningkatan pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan, serta mitigasi adaptasi perubahan iklim 120. Peningkatan revitalisasi pemanfaatan Kawasan Hutan dan industri kehutanan 121. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan 122. Perbaikan sistim informasi data Sumberdaya Hutan yang lebih berkualitas (akurat, mutakhir, dapat dipertanggung jawabkan) sebagai bahan pengambilan keputusan 123. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 124. Meningkatkan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang

Tujuan	Sasaran	Strategi dan Arah kebijakan
	18. Penataan Ruang Wilayah	<p>berpotensi merusak lingkungan</p> <p>125. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk penataan ruang, evaluasi, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang</p> <p>126. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah</p> <p>127. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah</p> <p>128. Pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah</p> <p>129. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu</p>

BAB VII

KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan dan program bidang pembangunan daerah merupakan rencana pembangunan untuk bidang dan sektor tertentu. Bab ini disusun untuk dapat memberikan kebijakan dan program pembangunan secara lebih rinci untuk masing-masing bidang dan sektor sehingga menjadi lebih operasional. Perencanaan bidang dan sektor ini sangat bermanfaat untuk dapat memberikan arah dan acuan bagi penyusunan Rencana Strategis untuk masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI) masing-masing. Hal ini menjadi penting karena operasional dari program dan kegiatan ini sebagian besar akan dilakukan oleh masing-masing SKPD terkait.

Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja yang disajikan dengan penjelasan tentang hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih. Melalui rumusan kebijakan umum, diperoleh sarana untuk menghasilkan atau diperolehnya berbagai program yang paling efektif mencapai sasaran. Untuk itu, dibutuhkan kebijakan umum agar dapat merangkai program-program prioritas yang *inherent*.

Setelah kebijakan umum dibuat, langkah selanjutnya adalah merumuskan program pembangunan daerah. Tahap ini sangat penting dalam perumusan RPJMD karena hasil dari perumusan program pembangunan daerah menghasilkan rencana pembangunan yang kongkrit dalam bentuk program prioritas. Urgensi lain adalah juga karena perumusan program pembangunan daerah adalah inti dari perencanaan strategis itu sendiri yang mendefinisikan tujuan strategis dalam 5 (lima) tahun.

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas yang bersifat strategis.

Penyajian kebijakan umum dan program pembangunan daerah, disajikan dalam tabel VII.1 yang datanya bersumber dari tabel VI.2

Tabel VII.1
Kebijakan Umum dan Program Pembangunan
Kabupaten Pasaman Barat tahun 2011 - 2015

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
1	Penerapan dan Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan Masyarakat	1. Peningkatan Akses Informasi Keagamaan	1. Meningkatnya tenaga penggerak keagamaan	500 Org	750 Org	Program peningkatan akses informasi keagamaan	Pemerintahan Umum	Pem. Pusat, Prov, Kabupaten
		2. Kaderisasi dan Revitalisasi Tenaga Penggerak Keagamaan	2. Terwujudnya optimalisasi pemanfaatan sarana keagamaan	75 %	80 %	Peningkatan SDM dan kaderisasi tenaga penggerak keagamaan	Pemerintahan Umum	Pem. Pusat, Prov, Kabupaten
		3. Efektifitas pemanfaatan dan peningkatan sarana keagamaan	3. Meningkatnya pemahaman dan kerukunan umat beragama	75 %	90 %	Program Pembinaan dan peningkatan sarana prasarana keagamaan	Pemerintahan Umum	Pem. Pusat, Prov, Kabupaten
		4. Revitalisasi lembaga-lembaga pendidikan formal dan pesantren	4. Meningkatnya rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,93	5,0	Program peningkatan lembaga pendidikan formal dan pesantren	Pemerintahan Umum	Pem. Pusat, Prov, Kabupaten
		5. Peningkatan Pemahaman Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan nilai-nilai keagamaan	1. Meningkatkan pemahaman nilai-nilai luhur kebudayaan oleh masyarakat.	60 %	85 %	Program pembinaan kehidupan dan kerukunan hidup umat beragama	Pemerintahan Umum	Pem. Pusat, Prov, Kabupaten
		6. Mengembangkan kelembagaan masyarakat adat dan meningkatkan peran ulama, ninik mamak dan cendekiawan dalam				Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya	Kebudayaan, Pariwisata	Disporaparsebud
2	Pengembangan Kebudayaan yang berlandaskan							

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
3	nilai-nilai luhur	penerapan nilai-nilai adat, seni dan budaya	2. Meningkatnya jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan	9 bh	19 bh	Program pengelolaan keragaman budaya	Kebudayaan, Pariwisata	Disporaparsebud
		7. Memupuk rasa solidaritas sosial serta mengembangkan toleransi terhadap perbedaan budaya sehingga dapat menumbuhkan kebersamaan dan kerukunan	3. Tersedianya gedung kesenian yang representatif	0	2 bh			
		8. Mengembangkan pendidikan budaya mulai sejak usia dini dengan mendorong tumbuhnya partisipasi yang luas dalam masyarakat	4. Terlaksananya penyelenggaraan festival seni dan budaya	1 kali/ thn	1 kali/ thn	Program Pengembangan Nilai Budaya	Kebudayaan, Pariwisata	Disporaparsebud
		9. Mengembangkan iklim dan suasana kehidupan seni dan budaya yang kondusif	5. Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	0	3 paket	Program pengelolaan kekayaan budaya	Kebudayaan, Pariwisata	Disporaparsebud
		10. Meningkatkan kompetensi dan profesionalitas SDM apratur dalam bidang tugasnya	1. Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	... orang orang	1. Program Pendidikan Kedinasan	Kepegawaian	BKPL
			2. Meningkatnya rasio penjabaran	50 %	80 %	2. Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		
						3. Program pembinaan dan pengembangan aparatur		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
	11. Meningkatkan etos kerja dan disiplin aparatur dalam menjalankan tugasnya		program RPJMD ke dalam RKPD	Dissslaimer	WTP (wajar tanpa pengecualian)		Kepegawaian, Pemerintahan Umum	Bag. Organisasi, BKPL
	12. Melakukan penataan terhadap organisasi tata kerja pemerintah menuju kecil organisasi kaya fungsi.		3. Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah 4. Meningkatnya jumlah objek pemeriksaan	80%	100%		Kepegawaian, Pemerintahan Umum	Bag. Organisasi
	13. Menciptakan standarisasi jabatan untuk mewujudkan manajemen aparatur yang berlandaskan pada keahlian (maritokrasi)		5. Meningkatnya Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	60,34	90,0		Kepegawaian, Pemerintahan Umum	BKPL, Bag. Organisasi
	14. Meningkatkan koordinasi dan partisipasi antara daerah dan stakeholders pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.		6. Meningkatnya Rasio kepemilikan akta Kelahiran per 1000 penduduk 7. Rasio pasangan berakte nikah 8. Meningkatnya Jumlah perizinan yang dikeluarkan	10,47	26,62	Program Perencanaan Pembangunan	Perencanaan Pembangunan	Bappeda
	15. Meningkatkan fungsi dan peranan pemerintahan nagari dalam penyelenggaraan		9. Lama proses perizinan maksimal 10. Meningkatnya ketatalaksanaan 2340 izin	...			
				150 hari	90 hari			
				1. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah nagari 2. Program peningkatan	Pemerintahan Umum	Bag. PEMNAG

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.	birokrasi pemerintahan: - SOP yang dihasilkan - SPM			participasi masyarakat dalam membangun nagari		
	16. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta perbaikan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah	16. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah serta perbaikan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah	11. Adanya indeks kepuasan layanan masyarakat (survey IKM yang dilaksanakan)	-	2 survey IKM	1. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	Pemerintahan Umum	DPKAD
	17. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.	17. Meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pengelolaan keuangan daerah.				1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 2. Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 3. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Pemerintahan Umum	Inspektorat
	18. Pengendalian kependudukan dan pembinaan administrasi kependudukan	18. Pengendalian kependudukan dan pembinaan administrasi kependudukan				Program Penataan Administrasi Kependudukan	Pemerintahan Umum	Dukcapil
	19. Peningkatan Efisiensi dan	19. Peningkatan Efisiensi dan				Program Peningkatan	Pemerintahan	KPUSP,

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
4	Peningkatan Keamanan, Ketertarikan, Ketertiban dan menegakkan supremasi hukum	efektifitas pelayanan publik				pelayanan, sarana dan prasarana perizinan dan non perizinan	umum	Bagian Organisasi, Tata Pemerintahan
		20. Peningkatan rasa aman, tertib, melalui upaya pencegahan terjadinya tindakan kriminalitas dan gangguan keamanan lainnya.	1. Meningkatnya angka kriminalitas yang tertangani 2. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk	4,9	5,5	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kesbang pol Linmas
		21. Peningkatan peran masyarakat dalam pencegahan kemungkinan konflik dan mengatasi konflik yang terjadi	3. Meningkatnya kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP 4. Meningkatnya kegiatan pembinaan partai politik	2 kali/ thn	2 kali/ thn	1. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 2. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Kesbang pol Linmas
		22. Pembangunan produk hukum daerah yang aspiratif yang mawadahi nilai-nilai sosial budaya yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat		2 kali/ thn	2 kali/ thn	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Pemerintahan Umum, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	Bagian Hukum, Kesbang pol Linmas
	23. Pembinaan, penyusunan, dan pengawasan serta evaluasi produk hukum						Pemerintahan Umum	Bagian Hukum

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
5	Pengembangan Pertanian, pangan, peternakan dan perkebunan	daerah dalam rangka penegakan HAM, dan investasi	<ol style="list-style-type: none"> Tersedianya regulasi ketahanan pangan (Perda/ Perkada) Produktifitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar (ton/Ha) Meningkatnya produksi komoditi pertanian, peternakan dan perkebunan : 	0	<ol style="list-style-type: none"> 1 (satu) Peraturan 5,5 	<ol style="list-style-type: none"> Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan Program peningkatan penerapan teknologi peternakan 	Pertanian	Dipertahorka, Perkebunan
		<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan kesadaran hukum warga masyarakat Meningkatkan kualitas hidup bangsa dan bernegara atas dasar penghargaan dan penghormatan kebhinekaan dan perbedaan. Membangun sistem ketahanan dan keamanan pangan di tingkat kabupaten yang dapat menjamin ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. 						

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
6	Peningkatan Perikanan dan Kelautan	27. Membangun dan mengembangkan sistem pertanian terpadu berbasis bahan organik ;	<ul style="list-style-type: none"> - Padi (Ha) - Jagung (Ha) - Pisang Ha) - Cabe (Ha) - Sapi (ekor) - Kambing (ekor) - Ayam (ekor) - Coklat (Ha) - Karet (Ha) 	<ul style="list-style-type: none"> - 25.798 - 41.727 - 632,91 - 223,6 - 13.500 - 13.000 - 1.000.000 - 9.997 - 718.4 	<ul style="list-style-type: none"> - 27.192 - 55.724 - 1.048,62 - 230,81 - 13.500 - 15.000 - 2.000.000 - 10.754 - 8.895 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 	Pertanian	Dipertahorka k,
		28. Merevitalisasi sistem kelembagaan dalam penyuluhan pertanian/pendampingan terhadap petani tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 4. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 5. Kontribusi sektor pertanian(palawija) terhadap PDRB 6. Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB 	<ul style="list-style-type: none"> - 27,14 	<ul style="list-style-type: none"> - 28,5 	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan	Pertanian	BP2KP, Dipertahorka, perkebunan
6	Peningkatan Perikanan dan Kelautan	29. Meningkatkan kemampuan/ kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha Pertanian, Perkebunan dan peternakan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan produksi perikanan tangkap (Ton) 2. Meningkatkan produksi perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> 7,3 19,81 	<ul style="list-style-type: none"> 7,9 20,6 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 2. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan 	Pertanian	BP2KP, Dipertahorka, perkebunan
		30. Pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap di perairan Barat Sumatera.	31. Pengembangan perikanan	<ul style="list-style-type: none"> 77.620 ton 1.154 ton 	<ul style="list-style-type: none"> 102.000 ton 2.500 ton 	Program pengembangan perikanan tangkap	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Program pengembangan	Kelautan dan	Dinas

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
7	Pengembangan agro industri, Jasa, perdagangan, investasi dan	budidaya.	budidaya	0	1 perda	budidaya perikanan	Perikanan	Kelautan dan Perikanan
		32. Peningkatan infrastruktur dan daya saing produksi perikanan.				Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		33. Pengelolaan sumberdaya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil dengan baik secara sustainable				Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		34. Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan.				1. Program pengembangan sistem Penyuluhan perikanan 2. Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
7	Pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan	35. Pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan	1. Jumlah perda yang mendukung iklim usaha 2. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	17	20	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		36. Meningkatkan daya saing komoditi ekspor melalui pengembangan teknologi dan efisiensi produksi				1. Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi 2. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Perdagangan , Perindustrian	Dinas Koperindag UKM, Penanaman Modal

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab									
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir												
pariwisata	37. Mendorong dan memfasilitas pengembangan komoditi ekspor menuju daerah-daerah pemasaran baru	3. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp. Triliun)	5,0 trilyun	3,3 trilyun	1. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	Perdagangan, Penanaman modal daerah	Dinas Koperindag UKM, Penanaman Modal										
								26,13	25,44	2. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Penanaman modal daerah	Dinas Koperindag UKM, Penanaman Modal					
													24,30	23,88	1. Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan	Perdagangan, Penanaman modal daerah	Dinas Koperindag UKM, Penanaman Modal
38. Mendorong pengembangan kegiatan perdagangan dalam negeri melalui perbaikan dan pengembangan fasilitas pasar;	4. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	Jumlah pengunjung	500 org	320 org	3. Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Perdagangan, Perindustrian	Dinas Koperindag UKM										
								5. Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB	90.300 org	71.200 org	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perdagangan, Perindustrian	Dinas Koperindag UKM				
39. Menyediakan jaminan resiko dan kredit bagi usaha agro industri dan agro bisnis pertanian	6. Meningkatkan jumlah kunjungan wisata	1 lokasi	6 lokasi	71.200 org	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perdagangan, Perindustrian	Dinas Koperindag UKM										
								7. Meningkatkan jumlah destinasi wisata	1 lokasi	6 lokasi	Program Penataan Struktur Industri	Perindustrian	Dinas Koperindag UKM				
40. Perwilayahan Industri Agro melalui Penataan areal lokasi industri pengolahan sub sector perkebunan, perikanan, dan perternakan.	7. Meningkatkan jumlah destinasi wisata	1 lokasi	6 lokasi	71.200 org	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perdagangan, Perindustrian	Dinas Koperindag UKM										
								41. Peningkatan fasilitas investasi dan Promosi	1 lokasi	6 lokasi	Program Penataan Struktur Industri	Perindustrian	Dinas Koperindag UKM				
41. Peningkatan fasilitas investasi dan Promosi	7. Meningkatkan jumlah destinasi wisata	1 lokasi	6 lokasi	71.200 org	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Perdagangan, Perindustrian	Dinas Koperindag UKM										
								41. Peningkatan fasilitas investasi dan Promosi	1 lokasi	6 lokasi	Program Penataan Struktur Industri	Perindustrian	Dinas Koperindag UKM				

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Investasi				Investasi 2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	daerah	
		42. Mengembangkan industri pariwisata dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan investasi dan peluang usaha yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.				Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Pariwisata, Penanaman modal daerah	Disporaparse bud, penanaman modal
		43. Mengembangkan destinasi pariwisata dengan mendorong perbaikan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan sarana pendukung pariwisata, mengembangkan kawasan strategis dan daya tarik pariwisata berbasis wisata bahari, alam, dan budaya.				Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Pariwisata	Disporaparse bud
		44. Meningkatkan pemasaran dan promosi pariwisata				Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Pariwisata	Disporaparse bud

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		<p>melalui saluran pemasaran dan pengiklanan yang kreatif dan efektif, serta menguatkan strategi pemasaran dan promosi pariwisata terpadu berbasis teknologi informasi dan komunikasi.</p> <p>45. Mengembangkan sumber daya pariwisata dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan pemangku kepentingan pariwisata lokal, meningkatkan kualitas penelitian dan pengembangan kepariwisataan.</p>						
8	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM)	<p>46. Meningkatkan kualitas SDM Koperasi dan UKM melalui pendidikan dan pelatihan.</p> <p>47. Mendorong terwujudnya kemitraan Koperasi dan UKM dengan usaha besar dalam bentuk kerjasama saling memerlukan dan</p>	<ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya jumlah koperasi Persentase koperasi aktif Jumlah UKM non BPR/LKMUUKM Jumlah BPR/LKM 	<p>152</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>5 BPR/ LKM</p>	<p>190</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>9 BPR/ LKM</p>	<p>Program Pengembangan Kemitraan</p> <p>Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah</p> <p>Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif</p>	<p>Pariwisata</p> <p>Koperasi dan UKM</p> <p>Koperasi dan UKM</p>	<p>Disporaparse bud</p> <p>Dinas Koperindag UKM</p> <p>Dinas Koperindag UKM</p>

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		saling menguntungkan						
		48. Meningkatkan bantuan dana bergulir dari APBD/APBN, perusahaan BUMN, perusahaan swasta nasional/asing dan sumber dana lainnya sehingga selalu tersedia dana murah yang dapat diakses oleh Koperasi dan UKM.				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan UKM	Dinas Koperindag UKM
		49. Menyediakan bantuan asuransi kredit bagi Koperasi UKM yang ingin mendapatkan akses ke perbankan				Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Koperasi dan UKM	Dinas Koperindag UKM
		50. Meningkatkan peran lembaga pemasaran (trading house) untuk mendorong pertumbuhan Koperasi dan UKM..				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan UKM	Dinas Koperindag UKM
		51. Menyediakan fasilitas produksi bersama (common service facilities) di sentra-sentra produksi kerajinan rakyat yang dilaksanakan dalam skala				Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Koperasi dan UKM	Dinas Koperindag UKM

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
9	Percepatan Penurunan Tingkat Pengangguran dan Kemiskinan	mikro dan rumah tangga.						
		52. Pengembangan kesempatan kerja dengan mendorong perluasan kesempatan kerja	1. Rasio penduduk yang bekerja 2. Meningkatnya Angka partisipasi angkatan kerja 3. Menurunnya Tingkat pengangguran terbuka 4. Parsentase jumlah penduduk diatas garis kemiskinan 5. Angka konsumsi rumah tangga per kapita	93,28 64,3 7 % 73 %	95,0 75,5 5 % 78 %	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Tenaga Kerja	Sosnakertrans
		53. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan jaminan sosial perlindungan kerja serta kebebasan berserikat.				Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Tenaga Kerja	Sosnakertrans
		54. Peningkatan produktivitas tenaga kerja, keterampilan, kompetensi dan kemandirian melalui pendidikan dan pelatihan				Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Tenaga Kerja	Sosnakertrans
		55. Peningkatan dan pemberdayaan SDM Transmigrasi serta Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi				1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 2. Program Transmigrasi Lokal 3. Program Transmigrasi Regional	Transmigrasi	Sosnakertrans
		56. Menurunkan jumlah penduduk miskin terutama di daerah pesisir pantai, tertinggal dan terisolir				Program penanggulangan kemiskinan		SKPD
		57. Meningkatkan daya beli				Program penanggulangan		SKPD

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan dasar pangan				kemiskinan		
10	Pemberdayaan masyarakat, Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Kesejahteraan Keluarga	<p>58. Meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta lembaga ekonomi dalam membangun desa/ Nagari</p> <p>59. Meningkatkan kapasitas aparatur dan kelembagaan pemerintah desa/ nagari</p> <p>60. meningkatkan kualitas SDM perempuan, kedudukan dan perannya dalam pembangunan daerah</p> <p>61. Meningkatkan kesejahteraan, keluarga berencana dan perlindungan anak terutama bidang kesehatan, pendidikan maupun hukum</p>	<p>1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah</p> <p>2. Partisipasi angkatan kerja perempuan</p> <p>3. Rata-rata jumlah anak per keluarga</p> <p>4. Cakupan peserta KB aktif</p> <p>5. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)</p> <p>6. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK</p>	48 %	50 %	<p>1. Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan</p> <p>2. Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa</p> <p>Program peningkatan kapasitas aparatur desa</p>	Pemberdayaan masyarakat dan desa	BPMPPKB
				93,66	95,10		Pemberdayaan masyarakat dan desa	BPMPPKB
				2	2			
				60 %	80 %		Pemberdayaan masyarakat desa,	BPMPPKB
				19 nagari	19 nagari		Pemberdayaan Perempuan	
				19 nagari	19 nagari		Pemberdayaan Perempuan	BPMPPKB

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
11	Pembangunan Infrastruktur Penunjang Ekonomi Rakyat					5. Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 6. Program penyiapan tenaga pendamping kelompok bina keluarga 7. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU		
		62. Peningkatan kelembagaan perlindungan terhadap anak dan orang tua usia lanjut				Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Pemberdayaan Perempuan	BPMPPKB
		63. Memaksimalkan perencanaan, pengawasan, pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan prasarana jalan dan jembatan.	1. Meningkatnya proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik 2. Meningkatnya rasio jaringan irigasi 3. Meningkatnya panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase 4. Meningkatnya Rumah Tangga (RT)	0,38	0,65	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	PU
		64. Pengembangan jalan baru diarahkan kepada daerah potensial yang masih terisolasi dan membuka hubungan ke pusat-pusat perkembangan ekonomi		1 Km	6 Km	Program pembangunan infrastruktur perdesasaan Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	PU
				3.187 RT	5.800 RT			

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		65. Meningkatkan peranan Swasta dan Masyarakat dalam pembangunan jalan dan jembatan	penggunaan air bersih 5. Meningkatnya persentase penduduk berakses air minum	4,00%	14,00%	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pekerjaan Umum	PU
		66. Meningkatkan dan mengembangkan sistem saluran irigasi melalui kegiatan pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan swadaya masyarakat	6. Meningkatnya Rumah Tangga (RT) pengguna Listrik 7. Meningkatnya pemasangan rambu-rambu lalu lintas - Traffic light - Warning light	34.212 RT	39.600 RT	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Pekerjaan Umum	PU
		67. Memadukan pembangunan saluran irigasi dengan pembangunan sistem drainase, pembuangan air limbah, dan lain-lain.	8. Jumlah uji kir angkutan umum 9. Meningkatnya jumlah jaringan komunikasi	3 bh 4 bh	6 bh 7 bh	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Pekerjaan Umum	PU
		68. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap bendungan dan saluran irigasi yang sudah ada sehingga berfungsi dengan baik.		3 provider	7 provider	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Pekerjaan Umum	PU
		69. Mengembangkan dan optimalisasi sumberdaya dan potensi energi/ energi baru dan terbarukan.				Program penelitian dan pengembangan sumber daya dan potensi energi baru dan terbarukan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Pertambangan
		70. Mengembangkan				Program pembinaan dan	Energi dan	Pertambangan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		infrastruktur jaringan dan penyediaan pembangkit listrik dari energi pemenuhan tenaga listrik terutama daerah tertinggal (Kawasan Pesisir dan Pegunungan).				pengembangan bidang ketenagalistrikan	Sumber Daya Mineral	n Energi
	71. Menciptakan pemerataan dan pemenuhan distribusi energi yang tepat dan efisien.					Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Pertambangan Energi
	72. Mengembangkan sistem pelayanan informasi dan promosi dalam rangka menarik minat investor khususnya di bidang pengembangan energi.					Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Energi dan Sumber Daya Mineral, Penanaman Modal Daerah	Pertambangan Energi, Penanaman Modal
	73. Melaksanakan pengendalian/pemantauan / pengawasan terhadap pencurian arus listrik oleh masyarakat					Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	Energi dan Sumber Daya Mineral	Pertambangan Energi
	74. Penyediaan lahan yang diperlukan bagi investor dalam pemenuhan sarana dan prasarana					Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Perhubungan	Dishub kominfo

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		telekomunikasi.						
		75. Memberi berbagai kemudahan dan informasi kepada calon investor secara reguler tentang peluang investasi yang tersedia dalam bidang telekomunikasi				Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi	Perhubungan, Penanaman Modal Daerah	Dishub kominfo, Penanaman Modal
		76. Menambah jaringan telepon di semua daerah Pasaman Barat				Program kerjasama informasi dan media massa	Perhubungan	Dishub kominfo
		77. Meningkatkan pelayanan Telekomunikasi Pos dan Giro				Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Perhubungan	Dishub kominfo
		78. menyediakan perumahan dan pemukiman layak huni yang akan diprioritaskan bagi penduduk berpenghasilan rendah				Program Pengembangan Perumahan	Pekerjaan Umum	PU
		79. peningkatan kapasitas terpasang debit air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat				Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pekerjaan Umum	PU
		80. Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pekerjaan Umum	PU

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
12	Peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan;	81. Mendorong partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah.	1. Meningkatkan prosentase Angka melek Huruf 2. Angka partisipasi	97,00	98,4	1. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 2. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Lingkungan Hidup	Dishubkominfo
		82. Meningkatkan Prasarana dan Sarana perhubungan						
		83. Meningkatkan Sarana dan Fasilitas Lalulintas						
		84. Meningkatkan Disiplin dan Keselamatan Lalulintas						
		85. Perluasan dan Pemerataan Akses Pendidikan				1. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Pendidikan	Pendidikan
		86. Peningkatan Kualitas Pendidikan yang Tinggi dan				2. Program peningkatan kelainan pengoperasian kendaraan bermotor		
						1. Program Pendidikan Anak Usia Dini 2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan		

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		Dilandasi Moral Agama dan beretika.	murni - SD/ MI/ Pkt A - SMP/MTs/PktB - SMA/ MA/Pkt C	90,65 90,00 70,20	94,5 92,0 80,1	Tahun 3. Program Pendidikan Menengah 4. Program Pendidikan Luar Biasa		
		87. Peningkatan Relevansi Pendidikan	3. Angka partisipasi kasar	127,81	100,0	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Pendidikan	Pendidikan
		88. Peningkatan Pengelolaan, Penegakkan aturan (Kode Etik Guru), Pengawasan dan Manajemen	- SD/ MI/ Pkt A - SMP/MTs/PktB - SMA/ MA/Pkt C	96,66 73,7	97,6 75,0	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Pendidikan	Pendidikan
		89. Meningkatkan Pendidikan Nonformal	4. Angka pendidikan yang ditamatkan	2,22	2,3	Program Pendidikan Non Formal	Pendidikan	Pendidikan
		90. Meningkatkan kontribusi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam sektor produksi melalui upaya-upaya penyuluhan yang sesuai dengan kondisi masyarakat,	- SD/ MI/ Pkt A - SMP/MTs/PktB - SMA/ MA/Pkt C	1,91 0,96	2,1 1,2		Pendidikan	Pendidikan
		91. Mengembangkan budaya IPTEKS di kalangan masyarakat.	5. Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah - SD/ MI - SMP/MTs - SMA/ MA	57,05 45,15 27,38	56,29 44,39 28,62		Pendidikan, Kearsipan	Pendidikan, Pustaka Arsip dan dokumentasi
		92. Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana	6. Rasio guru terhadap murid			1. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Pendidikan, Kearsipan	Pustaka Arsip dan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
13	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	perpustakaan dan kearsipan	- SD/ MI - SMP/MTs - SMA/ MA	58,3 82,7 86,2	64,09 83,48 87,23	2. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi		dokumentasi
		93. Menyempurnakan sistem dan pengelolaan kearsipan	7. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	12.065 org	20.000 org	1. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 2. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan	Pendidikan, Kearsipan	Pustaka Arsip dan dokumentasi
		94. Meningkatkan layanan perpustakaan dan minat baca siswa/masyarakat	8. Meningkatnya Koleksi buku yang tersedia di Pustaka daerah	5.375 Judul	11.500 Judul	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	Pendidikan, Kearsipan	Pustaka Arsip dan dokumentasi
		95. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama antar kabupaten, dengan provinsi dan nasional.	9. Pengelolaan arsip secara baku	0	9 SKPD			
13	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	95. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, swasta dan masyarakat madani dalam pembangunan kesehatan melalui kerjasama antar kabupaten, dengan provinsi dan nasional.	1. Meningkatnya Angka usia harapan hidup 2. Menurunnya Parsentase balita gizi buruk 3. Meningkatnya rasio puskesmas, poliklinik, pusku per satuan penduduk	69,0 2,4 % 0,61	70,6 1,9 % 0,69	1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Pengawasan Obat dan Makanan 3. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	Kesehatan	Kesehatan
		96. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau, bermutu dan	4. Meningkatnya rasio	0,06	0,08	1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat	Kesehatan	Kesehatan, RSUD

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		berkeadilan, serta berbasis bukti, dengan pengutamaan pada upaya promotif - preventif.	Rumah Sakit persatuan penduduk 5. Meningkatnya rasio dokter per satuan penduduk 6. Meningkatnya Rasio tenaga medis per satuan penduduk 7. Menurunnya angka kematian bayi 8. Menurunnya angka kematian Ibu 9. Terkendalinya prevalensi kasus penyakit menular : - HIV/ AIDS - Malaria - TB Paru	0,30	0,40	2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 4. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 5. Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 6. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 7. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak		
		97. Meningkatkan pembiayaan pembangunan kesehatan, terutama untuk mewujudkan jaminan sosial kesehatan nasional.		1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 2. Program Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Kesehatan	Kesehatan, RSUD
		98. Meningkatkan pengembangan sarana prasarana dan pemberdayaan sumber		1. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas	Kesehatan	Kesehatan, RSUD

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		<p>daya manusia kesehatan yang merata dan bermutu.</p> <p>99. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat dan alat kesehatan serta menjamin keamanan/khasiat, kemanfaatan, dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan.</p> <p>100. Meningkatkan manajemen kesehatan yang akuntabel, transparan, berdayaguna dan berhasilguna untuk memantapkan</p>			<p>pembantu dan jaringannya</p> <p>2. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit paru-jiwa/rumah sakit mata paru/rumah sakit mata</p> <p>3. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit paru-jiwa/rumah sakit mata paru/rumah sakit mata</p> <p>Program Obat dan Perbekalan Kesehatan</p>	Kesehatan	Kesehatan, RSUD	
					<p>1. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan</p> <p>2. Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan</p>	Kesehatan	Kesehatan, RSUD	

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab		
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir					
14	Peningkatan Kualitas Pemuda dan Pembangunan Olahraga	desentralisasi kesehatan yang bertanggung jawab.	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah klub olah raga Jumlah gedung olah raga Jumlah organisasi pemuda 	11	19	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Pemuda dan Olah raga	Disporaparse bud		
		101. Peningkatan koordinasi dan keterpaduan pembinaan kegiatan olahraga							0	1 Bh GOR
		102. Meningkatkan prestasi dan Memasyarakatnya kegiatan olahraga							19	24
		103. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta dalam menggerakkan olahraga								
		104. Peningkatan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga yang sesuai dengan pengembangan bakat dan minat pemuda serta peran sertanya dalam pembangunan								
	105. Pemberdayaan pemuda, pengembangan kepeloporany/ kreatifitas pemuda dan pemberdayaan organisasi kepemudaan				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Pemuda dan Olah raga	Disporaparse bud			
					Program Pengembangan dan Keresasian Kebijakan Pemuda Program peningkatan peran serta kepemudaan	Pemuda dan Olah raga	Disporaparse bud			

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab	
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir				
15	Mitigasi dan Penanggulangan Bencana	106. Mengembangkan sistem informasi sumber daya alam untuk mendukung pengambilan keputusan dan mitigasi bencana alam	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0,12	0,32	1. Peningkatan kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana 2. Penanganan Tanggap Darurat	Pemerintahan umum	BPBD	
		107. Memperkuat kapasitas, kualitas dan kesiapan pengelolaan dan penanganan dampak bencana alam				1. Program Peningkatan prasarana dan sarana fisik mitigasi bencana alam 2. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Pemerintahan umum, Pekerjaan Umum	BPBD, PU	
16	Pelestarian Lingkungan Hidup	108. Peningkatan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan pada air, lahan, udara dan keanekaragaman hayati, serta pengendalian bencana alam	1. Persentase Penanganan sampah 2. Terlaksananya pengelolaan luas kawasan konservasi laut, perairan tawar dan payau secara berkelanjutan	20 %	70 %	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam Program Pengendalian kebakaran hutan	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup	
		109. Peningkatan penataan lingkungan berdasarkan daya dukung dan daya tampung lingkungan		... Ha	... Ha				
		110. Peningkatan upaya penegakan hukum					Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		lingkungan secara konsisten						
		1.1.1. Peningkatan pengelolaan dan perlindungan ekosistem pesisir dan laut				Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
		1.1.2. Peningkatan pengelolaan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penanganan persampahan				Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
		1.1.3. Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia dalam rangka pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, serta peningkatan akses informasi lingkungan.				Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup
		1.1.4. Peningkatan pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara Terpadu				Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan	Lingkungan Hidup	Lingkungan Hidup

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
17	Pemanfaatan sumber daya alam	115. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	1. Meningkatkan Rehabilitasi hutan dan lahan kritis 2. Menurunnya kerusakan kawasan hutan 3. Meningkatkan kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB 4. Berkurangnya persentase pertambahan tanpa izin 5. Meningkatkan kontribusi sektro pertambahan terhadap PDRB	0,25 %	0,75 %	konservasi laut dan hutan	Energi dan sumber daya mineral, Kehutanan	Pertambangan Energi, Kehutanan
				30,87 %	10,0 %	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Kehutanan	Kehutanan
				2,27%	2,35%	Program rehabilitasi hutan dan lahan	Kehutanan	Kehutanan
				66,67 %	25 %	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan	Kehutanan	Kehutanan
				1 %	1,5 %	1. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2. Program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	Kehutanan	Kehutanan
116. Peningkatan pengelolaan kawasan hutan, rehabilitasi hutan serta peningkatan daya dukung DAS.								
117. Peningkatan pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan, serta mitigasi adaptasi perubahan iklim								
118. Peningkatan revitalisasi pemanfaatan Kawasan Hutan dan industri kehutanan								

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
18	Penataan ruang wilayah	119. Peningkatan pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar kawasan hutan				1. Program pemanfaatan kawasan baten industri	Kehutanan	Kehutanan
		2. Program perencanaan dan pengembangan baten						
		Program pengembangan data dan informasi Sumber daya alam						
		121. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan				Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan	Energi dan sumber daya mineral	Pertambangan dan Energi
		122. Meningkatkan pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan				Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan	Energi dan sumber daya mineral Lingkungan hidup	Pertambangan dan Energi, Kehutanan, Lingkungan Hidup
		123. Meningkatkan kuantitas dan kualitas produk	1. Rasio ruang terbuka hijau per	1. Program Perencanaan Tata Ruang	Penataan Ruang	Bappeda, PU

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
		penataan ruang, evaluasi, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang	satuan luas wilayah ber HPL/HGB	0,38	1,50	2. Program Pemanfaatan Ruang 3. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		
	124. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah		2. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan			1. Program perencanaan pembangunan ekonomi 2. Program perencanaan sosial budaya	Penataan Ruang	Bappeda
	125. Penetapan pusat-pusat kegiatan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah					1. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan cepat tumbuh 2. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Penataan Ruang	Bappeda
	126. Pendorongan terbentuknya aksesibilitas jaringan transportasi dalam rangka menunjang perkembangan wilayah					Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Penataan ruang	Bappeda, PU
	127. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu					1. Program perencanaan pembangunan daerah rawan bencana 2. Program pengembangan,	Penataan Ruang, Kehutanan	Bappeda, Kehutanan

No	Sasaran	Strategi dan Arah Kebijakan	Indikator Kinerja (outcome)	Capaian Kinerja		Program Pembangunan Daerah	Bidang Urusan	SKPD Penanggung Jawab
				Kondisi Awal	Kondisi Akhir			
						<p>pengelolaan dan konversi sungai, danau dan sumber daya air lainnya</p> <p>3. Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan</p>		

BAB VIII

INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN

Memuat hubungan urusan Pemerintah Daerah dengan SKPD terkait beserta program yang menjadi tanggungjawab SKPD serta pencapaian target indikator kinerja disertai dengan kebutuhan pendanaan.

Program Pendidikan Menengah																			Dinas Pendidikan
APK SMA/SMK/MA/Paket C	%			75	%	85	%	90	%	95	%	99	%						Dinas Pendidikan
APM SMA/SMK/MA/Paket C	%			75	%	85	%	90	%	95	%	99	%						Dinas Pendidikan
Akreditasi SMK	%			35	%	40	%	45	%	50	%	55	%						Dinas Pendidikan
SMA SBI atau RSBI	%			10	%	13	%	14	%	15	%	16	%						Dinas Pendidikan
Guru SMA/SMK Berkualifikasi S-2	%			15	%	24	%	26	%	28	%	30	%						Dinas Pendidikan
Guru SMA/SMK/SMALB Bersertifikasi	%			5	%	8	%	10	%	12	%	15	%						Dinas Pendidikan
Program Pendidikan Non Formal																			
Setiap sekolah tersedia buku pembelajaran Al-qur'an	%			30	%	35	%	40	%	45	%	50	%						
Tersedia guru yang memiliki kompetensi	%			25	%	27	%	30	%	35	%	40	%						
Tersedia lembaga keterampilan pendidikan formal dan formal	%			10	%	15	%	20	%	22	%	25	%						
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan																			
Dapat ningkatan program Sekolah memiliki ICT	%			98	%	1	%	90	%	95	%	100	%						
Berjalan kekuatan hukum bidang pendidikan (kode etik guru)	%			40	%	1	%	80	%	90	%	100	%						
Persentase sekolah yang menjalankan ISO	%			20	%	1	%	80	%	90	%	100	%						
Menjalankan manajemen pendidikan yang transparan dan akuntabel	%			2	%	0	%	15	%	30	%	45	%						
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan																			KPAD
Jumlah kunjungan pustaka	orang		12,065																20,000
Jumlah judul buku	Eks		5,375																11,500
Tersedianya pelayanan perpustakaan untuk daerah tertinggal, terisolir dan antar pulau	lokasi		-					1		1		1							3

								1	1	1									3				
			Jumlah dokumen kebijakan strategis dalam pembangunan kesehatan	Buah				1	1	1									3				
			Jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan	Buah				2	2	3									5				
			Jumlah dokumen anggaran yang dihasilkan	Buah				1	1	2									3				
			Persentase pemenuhan kebutuhan SDM aparatur (PNS dan PTT)	%				60	70	80									90				
			Persentase penyelesaian administrasi kepegawain tepat waktu	%				60	70	80									90				
			Persentase produk administrasi kepegawain yang dikelola melalui	%				60	70	80									90				
			Persentase laporan keuangan Dinkes yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%				100	100	100									100				
			Persentase Puskesmas yang telah melakukan pemeliharaan, peningkatan, dan	%				50	60	70									80				
			Persentase screening calon haji tepat waktu	%				100	100	100									100				
			Angka kematian calon jemaah haji (per 1000 calon jemaah)	Orang				<2	<2	<2									<2				
			Persentase Puskesmas dan Bidang pada Dinkes Kabupaten yang menerapkan administrasi yang akuntabel	%				50	60	70									80				
			Jumlah penelitian yang dilakukan secara swakelola dan ke finak ketiga	Kali				3	3	4									5				
			Jumlah diseminasi hasil penelitian dalam forum seminar/pertemuan	kali				3	3	4									5				

	Ibu Hamil, Nifas, Puskesmas, RS	per 100.000 KH	199	195	190	186	182		
	Persalinan oleh Nakes (PN) 90%	%	84	86	88	88	90		
	Cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1)	%	84	86	88	88	90		
	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Antenatal (K4) 95%	%	85	88	90	92	95		
	Persentase Faskes yg melayani KB sesuai standar 100%	%	100	100	100	100	100		
	Persentase Puskesmas Rawat Inap yang mampu PONED 100%	%	100	100	100	100	100		
	Persentase RS Kab yang melaksanakan PONEK 95%	%	100	100	100	100	100		
	Bayi dan Balita	%	86	88	89	90	90		
	Persentase kunjungan Neonatal (KN1) 90%	%	84	86	88	88	90		
	Cakupan kunjungan Bayi 90%	%	84	86	86	88	90		
	Cakupan Anak Balita 85%	%	84	86	86	86	90		
	Persentase Puskesmas yang terakreditasi	%	5	10	15	20	25		
	Jumlah Kunjungan penduduk pada pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan jaringannya (Visit Rate)	Kali	2	2,2	2,2	2,5	2,5		
	Terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas terisolir	%	100	100	100	100	100		

Program Pembangunan turap/talud/bronjong	Panjang turap/talu/bronjong	M		300			300			300				300			
Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Terpeliharanya jalan, jembatan	%		20			20			20				20			
Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong	Terpeliharanya talud/bronjong	%		20			20			20				20			
Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Tersedianya data base jalan dan jembatan	paket		1													
Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengaliran lainnya	Jaringan irigasi yang dipelihara	%		20			20			20				20			PU
	Bertambahnya Luas Sawah irigasi. (Ha)	Ha		15			17			18				22			PU
	Saluran irigasi yang diperbaiki	%		20			20			20				20			PU
	Peningkatan Produksi Air bersih (000 m3)	M3		4			2			3				5			PU
	Jumlah Pelanggan dilayani (orang)	orang		3,528			3,682			3,843				4,011			PU
	Jumlah Hidran/ Kran Umum (unit).	buah		110			110			110				110			PU
Program penyediaan dan pengolahan air baku	Jumlah Penampung air/Waduk yang di bangun (Unit)	unit		11			11			11				11			PU
	Jumlah Sumber Daya Air yang dibangun masyarakat. (unit)	unit		11			11			11				11			PU
	Jumlah Sumber Daya Air yang dibangun dan dikelola masyarakat.	Unit															

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut	Teraksananya pembangunan pelabuhan teluk tapang Pengerukan Alur Pelayaran (m3). Tersedianya buku regulasi dan kebijakan penyinggaraan transportasi laut	unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	APBN	1				DISHUB													
														lokasi	1																	
														dokumen	1																	
Dst...																																
8	Lingkungan Hidup Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Tersedianya kebijakan daerah berupa PERDA/PERBUP tentang pengelolaan sampah	dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1					KLH													
		Tersedianya prasarana dan sarana persampahan	paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																		
		Tersedianya sosialisasi tentang pengelolaan persampahan	kali	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																		
		Berpersinya pengelolaan sampai di TPA secara maksimal	%	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50																		
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Kabupaten sebagai penerima Adipura Perusahaan pelaksana CSR Lingkungan 8 perusahaan	Terpantaunya pencemaran 1 sungai	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	APBN	1				KLH													
														Perusahaan	2																	
														:Sungai	1																	
	Ditapaknya status mutu dan daya dukung 1 sungai, dan 1 lahan		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2																			

		Pengawasan aktifitas yang menghasilkan limbah B3	%		0	0		1	1	1	1			
		Terselesainya kasus pencemaran dan kerusakannya lingkungan	%	1	1			1	1	1	1			
		Pengawasan kegiatan terkait perubahan iklim dan perlindungan ozon 5	Kegiatan	2	2			3	3	3	3			
		Tersusunnya status Kehati Kabupaten	Kegiatan	1	1			1	1	1	1			KLH
		Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Unit	5	5			5	5	5	5			
		Jumlah sumber daya air yang dipelihara	orang	110	110			110	110	110	110			
		Jumlah yang ikut mengelola Sumber Daya Air.												
		Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup												
		Program pengembangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan												
		Program Pengendalian kebakaran hutan	dokumen					1						KLH
		Tersedianya dokumen pemetaan daerah rawan kebakaran hutan												
		Program Pengelolaan dan rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut												
		Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	lokasi						1					
9		Pertanahan												
		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	%											Bagian Tata Pemerintahan
		Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan	buah											
		Jumlah konflik yang terselesaikan												
		Dst.....												

	Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	paket		1	1	1	1	1	1	1	1	1			DINSOSNAKE RTRANS
	Program pembinaan anak terlantar														
	Jumlah anak terlantar, anak jalanan, anak nakal yang dilatih untuk punya keterampilan bisa bekerja	orang						40	60	80	100				
	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma														
	Jumlah penyandang cacat dan trauma yang dibina	orang	30	40	40	50	25	37	183						DINSOSNAKE RTRANS
	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo														
	Tersedianya sarana dan prasarana panti asuhan	Paket	1	1	1	1	1	1							DINSOSNAKE RTRANS
	Jumlah penghuni panti yang dilatih keterampilan	orang	10	10	10	10	10	10	50						
	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)														
	Jumlah penyandang penyakit sosial yang di berikan bimbingan	kelompok		3	3	3	4	4							DINSOSNAKE RTRANS
	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial														
	Jumlah lembaga yang diberikan pembinaan	kelompok	11	11	11	11	11	11							DINSOSNAKE RTRANS

14	Tenaga Kerja																				DINSOSNAKE RTRANS	
	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja																					
		Menurunnya tingkat pengangguran terbuka	%	7	6,6							6,2			5,8							
		Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja	%	64,3	66,1							68,2			70							75,5
15	Program Peningkatan Kesempatan Kerja																					
		Tersedianya Balai Latihan Kerja	unit													1						
		Terlaksananya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja	kali		2							3			4							5
	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan																					
		Terlaksananya pengawasan, perlindungan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja	paket		1							1			1							1
		Adanya kebijakan pengiriman tenaga kerja tentang	PERDA																			
		Penyelesaian kasus-kasus tenaga kerja dengan perusahaan	paket		1							1			1							1
	Dst.....																					
16	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah																					
	Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif																					
		Tersusunnya dan tersosialisasikan kebijakan tentang usaha kecil dan Menengah	PERDA									1			1							1

17	Penanaman Modal Daerah																				
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Tersedianya profil investasi daerah Jumlah MOU pemerintah daerah dengan investor	Paket buah		5		1	5		5		5		5		5					
	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Jumlah PERDA pendukung Investasi Lama proses perizinan investasi Jumlah realisasi investasi di Pasaman barat	buah hari Rp				1														
	Program Penyediaan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah																				
18	Kebudayaan																				
	Program Pengembangan Nilai Budaya	Peningkatan implementasi pemahaman masyarakat terhadap esensi ABS-SBK Tersedianya sarana dan prasarana untuk memotivasi pengembangan adat, seni dan budaya daerah Fasilitasi dan peningkatan koordinasi pemberdayaan lembaga budaya dan seni; Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	% Paket Paket paket		20	%	20	%	20	%	20	%	20	%	20	%	20	%			DPOPK
	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Terselenggaranya festival budaya daerah	Kali		1		2		2		2		2		2		2		2		

		Pengembangan lembaga silat minangkabau	paket																
		Jumlah SDM kelembagaan adat yang laih	orang																
		meningkatkan pelestarian kekayaan daerah	%																
19		Pemuda dan Olah Raga																	
		Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda																	
		Adanya dokumen rencana aksi daerah bidang kepemudaan	dokumen																
		Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	orang																
		Program peningkatan peran serta kepemudaan																	
		Jumlah organisasi pemuda yang dibina	buah																
		Jumlah pemuda yang dilatih kepemimpinan	orang																
		Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda																	
		Jumlah pemuda yang dilatih kewirausahaan dan keterampilan	orang																
		Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba																	
		Tertaksananya penyuluhan narkoba untuk pemuda	orang																
		Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga																	
		Meningkatnya pembibitan, prestasi, mutu olahraga dan aktifitas olahraga masyarakat	paket																

	Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Terbentuknya SOTK yang efektif dan efisien																		Bagian organisasi
21	Kepegawalan Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah PNS yang tugas belajar dengan anggaran APBD Kabupaten Pasaman Barat	orang	2	4	4	4	4	4	4										BKPL
	Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur	Jumlah peserta diklat yang memenuhi kompetensi PNS Gol. I, II, & III	Orang	240	240	240	240	240	240	240										BKPL
		Terlaksananya diklat kepemimpinan tingkat II, III, dan IV	Orang	30	30	30	30	30	30	30										
		Terlaksananya diklat teknis dalam upaya peningkatan kapasitas SDM aparatur daerah	Orang	50	60	70	80	90	90	90										
		Terlaksananya diklat fungsional dalam upaya peningkatan kapasitas SDM aparatur daerah	orang	50	60	70	80	90	90	90										
	Penyempurnaan Sistem Penggajian Kepegawalan Daerah Kabupaten	Persentase peningkatan kesejahteraan Kabupaten	%	6	6	6	6	6	6	6										BKPL/Bagian organisasi
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya kinerja, kapasitas, kualitas, karier PNS Adanya dokumen analisis jabatan Adanya uraian jabatan	orang dokumen dokumen																	

22	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																										
	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Jumlah organisasi masyarakat desa yang diberdayakan dalam pembangunan																								BPMPPKB	
	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pelaksanaan diklat teknis kepada masyarakat desa																								BPMPPKB	
	Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Jumlah anggota masyarakat yang dilatih bidang pertanian																								BPMPPKB	
	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	Jumlah aparatur pemerintah nagari yang diberi pelatihan manajemen pemerintahan nagari																								BPMPPKB	
23	Statistik																										
24	Kearsipan																										
	Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	Tersedianya data base kearsipan																									Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
	Program peningkatan kualitas pelayanan informasi	tersedianya sarana informasi arsip																									
		Tertaksananya sosialisasi kearsipan			1			2																			

25	Komunikasi dan Informatika																					
	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Parsetase program pembangunan pembkab Pasaman Barat dapat dipublikasikan kepada Masyarakat, dunia usaha serta pemerintahan secara seimbang dan dinamis	%	70	75	80	90	90													Bagian Humas	
		Parsetase terhimpunya kliping berita, pidato Bupati serta terlaksananya pelayanan informasi melalui balho, spanduyk, leaflet dan mobil unit penerangan	%	70	75	80	90	90														Bagian Humas
	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Parsetase terhimpunya dokumen kegiatan Pembkab Pasaman Barat	%	70	75	80	90	90														Bagian Humas
	Program kerjasama informasi dan media massa																					
	Urusan Pilihan																					
	1	Pertanian																				
		Program Peningkatan Kesejahteraan Petani																				
		Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan																				DPTPHP
		Peningkatan luas areal tanaman pangan berbasis padi yang menjamin ketersediaan pangan	%	10	20	10	10	20														
		Meningkatnya jumlah produksi pangan	%	40	80	40	40	80														

	Peningkatan Lahan luas areal tanaman hortikultura sesuai kebutuhan	%		10		20		10		20		20						
	Meningkatnya jumlah produksi hortikultura			500		500		500		375		375	375					
	Terbangunnya kawasan ketahanan pangan berbasis padi	Lokasi				1		1		1		1	1					
	Terbangunnya desa mandiri pangan	Desa		3		7		4		12		5	5					
	Meningkatnya produktivitas lahan komoditi pangan dan hortikultura	%		0		5		5		5		5	5					
	Meningkatnya Jumlah varitas benih / bibit bersertifikat	Paket		1		1		1		1		1	1					
	Meningkatnya jumlah produksi bibit / Denih bersertifikat	Jenis																
	Tersedianya rencana program Minatani			1		3		3		5		5	5					
	Terbangunnya program Minatani																	
	Berdayanya masyarakat pertanian penghasil pangan secara sosial, ekonomi, dan kultur teknis			3		5		5		5		5	Semua kelompok tani di nagari					
	Tumbuhnya kesadaran masyarakat pertanian penghasil pangan untuk menjaga keberlanjutan program ketahanan dan keamanan pangan																	

	Ditemukannya pola pembangunan pertanian terpadu berbasis bahan organik yang sesuai dengan potensi lokal	paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	DPTPHP
	Berkembangnya usahatani terpadu berbasis bahan organik	Paket GERBANG EMAS SIKKEPI (sapi dan kelana	1	3	3	3	5	6											DPTPHP
	Terbangunnya kawasan pertanian terpadu berbasis bahan organik	Unit kawasan / nagari	1	3	3	3	5	5											Disbun
	Terbangunnya kemitraan yang memberdayakan masyarakat pertanian organik	Paket	1	2	2	2	3	3											DPTPHP
	Meningkatnya permintaan terhadap produk pertanian organik	paket	1	1	1	1	1	1											DPTPHP, Koperindag UKM
	Meningkatnya harga produk pertanian organik																		BP2KP
	Tersedianya luas lahan tanam komoditi perkebunan kakao dan nilam yang memenuhi skala ekonomi dan kebutuhan daerah	HA																	DISBUN
	Terpenuhinya jumlah produksi kakao dan nilam yang memenuhi skala ekonomi dan kebutuhan daerah.																		
	Tertaksananya intensifikasi, Rehabilitasi dan Peremajaan Perkebunan Kakao rakyat	HA	700	750	800	850	900												DISBUN
	Tertaksananya intensifikasi, Rehabilitasi dan Peremajaan Perkebunan Kelapa sawit rakyat	HA	2,000	2,000	2,000	4,000	5,000												

	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan																							
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak																							
	Program peningkatan produksi hasil peternakan																							
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan																							
	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan																							
2	Kehutanan																							
	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan																							
	Terentuknya Model budidaya tanaman hutan 50 Ha	HA		10		10		10		10		10		10		10		10		10		10		
	Tertaksananya Pembinaan dan Pengendalian HTR dan Hutan Desa pada 1kecamatan	Paket		-		1		1		1		1		1		1		1		3				
	Tertaksananya pembinaan dan pengawasan Sarang Burung Walet pa	Pakwt		1		1		1		1		1		1		1		1		1				
	Berkurangnya Kasus kehutanan(ilegal logging) dan pidana kehutanan			0		0		1		1		1		1		1		1		1				
	Program rehabilitasi hutan dan lahan																							
	Tersedianya kuantitas dan kualitas bibit tanaman hutan			50		100		100		100		100		150										
	Tersedianya sarana prasarana pembibitan tanaman hutan	paket		-		1		1		1		1		1		1		1		1				
	Tersedianya KMDM pada SD/MI 10 SD/MI			-		2		2		2		2		2		2		2		2				
	Terehabilitasinya lahan kritis dalam kawasan hutan 600 Ha	Ha		200		100		100		100		100		100		100		100		100				

7	Industri																	DKPI
	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah																	
	Jumlah Industri Kerajinan dan makanan ringan yang memperoleh bantuan	Buah		5		10		15		20		25						
	Jumlah pengusaha yang dilatih (20/tahun)	orang		20		20		20		20		20						
	Jumlah pengusaha dilatih bidang akuntansi keuangan	orang		20		20		20		20		20						
	Jumlah koperasi nagari didirikan dan dikembangkan	buah		19		19		19		19		19						
	Jumlah kelompok pelaku usaha Industri asintan dan perbengkelan	buah		5		10		15		20		25						
	Jumlah UKM difasilitasi permodalannya	buah		20		25		30		35		40						
	Jumlah Sektor Informal	buah		20		30		40		50		60						
	Dibina																	
	Jumlah tenaga kerja UKM dilatih (30 orang/tahun)			30		30		30		30		30						
	Jumlah klaster industri yang terbentuk (unit klaster industri)	unit		2		3		4		5		6						
	Jumlah bantuan mesin untuk klaster industri olahan (unit)	unit		3		6		9		12		15						
	Jumlah Produk yang dipantau secara reguler oleh TLKI dan BPOM (produk)	Jenis		3		6		9		12		15						
	Jumlah produk yang dipromosikan (produk)	Jenis		2		4		6		10		14						
	Jumlah Koperasi yang ditingkatkan kualitasnya (unit)	unit		60		60		60		60		60						
	Jumlah Koperasi yang bersertifikasi (unit)	unit		5		5		5		5		5						
	Jumlah wirasahsa baru (orang)	orang		200		200		200		200		200						
	Jumlah aparaturn (orang)	orang		95		95		95		95		95						
	Jumlah Dana KUR(Rp. milyar)	Rp		50		50		50		60		60						
	Jumlah KUKM yang didampingi(unit)	unit		100		100		100		100		100						

8	Transmigrasi																									
	Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi	Tersedianya prasarana dan sarana pemukiman transmigrasi	paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1														DINSOSNAKE RTRANS
	Program Transmigrasi Lokal	Tersedianya lembaga keuangan dan bantuan permodalan di kawasan transmigrasi	paket	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
	Program Transmigrasi Regional																									

BAB IX PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel IX.1
Tabel Penetapan Indikator Kinerja Daerah
Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Pasaman Barat

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Ket
			Thn 0	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Umum, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1	Pertumbuhan PDRB	6,26	6,40	6,6	6,8	6,9	7,12	
1.2	PDRB per kapita (Juta)	16,297	18,297	20,159	22,159	24,5	27,159	
1.3	Persentase penduduk dia tas garis kemiskinan	73	74	75	76	77	78	
1.4	Angka kriminalitas yang tertangani	4,9	5,5	5	5,1	5,2	5,5	
1.	Pendidikan							
1.1	Angka melek huruf	97,00	97,5	97,75	98	98,2	98,4	
1.2	Angka partisipasi murni SD/ MI/ paket A SMP/ MTS/ Paket B SMA/ MA/ Paket C	90,65	91,5	92,2	93,1	93,9	94,5	
1.3	Angka partisipasi kasar SD/ MI/ paket A SMP/ MTS/ Paket B SMA/ MA/ Paket C	127,81	123,8	120,5	117,2	108,3	100	
		73,7	73,9	74,2	74,5	74,7	75	
		96,66	90,8	97	97,2	97,4	97,6	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Ket
			Thn 0	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.	Angka pendidikan yang ditamatkan - SD/ MI/ paket A - SMP/ MTS/ Paket B - SMA/ MA/ Paket C	2,22 1,91 0,96					2,3 2,1 1,2	
2.	Kesehatan							
2.1.	Angka usia harapan hidup	69	69,4	69,8	70,2	70,4	70,6	
2.2.	Persentase balita gizi buruk	2,4%	2,3%	2,2%	2,1%	2%	1,9%	
	Seni Budaya dan Olah Raga							
1.	Kebudayaan							
1.1.	Jumlah grup kesenian	9	11	13	15	17	19	
1.2.	Jumlah gedung	0	0	0	1	0	2	
2.	Pemuda dan Olahraga							
2.1.	Jumlah klub olahraga	11	13	14	15	17	19	
2.2.	Jumlah gedung olahraga/GOR	0.1	0,1	0,4	0,2	0,1	1	
2.3.	Jumlah organisasi pemuda	19					24	
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Pelayanan Urusan Wajib								
1.	Pendidikan							
1.1.	Pendidikan dasar:							
1.1.1.	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah - SD/ MI - SMP/ MTs	57,05 45,15					56,29 44,39	
1.1.2.	Rasio guru terhadap murid - SD/ MI - SMP/ MTs	58,3 82,7					64,09 83,48	
1.1.3.	Rasio guru terhadap per kelas rata-rata							
1.2.	Pendidikan menengah							
1.2.1.								
1.2.2.	Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah (SMA/ MA)	27,38					28,62	
1.2.3.	Rasio guru terhadap murid (SMA/ MA)	86,2					87,23	
1.2.4.	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata							
2.	Kesehatan							
2.1.	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	0,61	0,63	0,65	0,67	0,68	0,69	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Ket
			Thn 0	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.2.	Rasio Rumah sakit persatuan penduduk	0,06	-	-	-	0,08	-	
2.3.	Rasio dokter per satuan penduduk	0,30	0,32	0,34	0,36	0,38	0,40	
2.4.	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	2,95	3,47					
3.	Pekerjaan Umum							
3.1.	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	0,38	0,4	0,45	0,5	0,55	0,65	
3.2.	Rasio jaringan irigasi							
3.3.	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	2,93					5,0	
3.4.	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air - Trotoar	1 KM		1 KM	1 KM	1 KM	1 KM	
4.	Perumahan							
4.1.	Rumah tangga pengguna air bersih	3187	3650	4100	4700	5300	5800	
4.2.	Rumah tangga pengguna listrik	34212	35100	36300	37500	38400	39600	
5.	Penataan Ruang							
5.1.	Rasio bangunan ber - IMB persatuan bangunan	0,38	0,5	0,8	1	1,25	1,50	
6.	Perencanaan Pembangunan							
6.1.	Rasio penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	50%	60%	65%	70%	75%	80%	
7.	Perhubungan							
7.1.	Jumlah uji kir angkutan umum							
7.2.	Pemasangan Rambu-rambu lalulintas (lokasi)	5	7	8	9	10	11	
8.	Lingkungan Hidup							
8.1.	Persentase penanganan sampah	20	30	40	50	60	70	
8.2.	Persentase penduduk berakses air minum	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	
9.	Pertanahan							
9.1.	Persentase luas lahan bersertifikat							
10.	Kependudukan dan Catatan Sipil							
10.1.	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	60,34					90	
10.2.	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	10,47					26,62	
11.	Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak							

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Ket
			Thn 0	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11.1.	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah(di luar tenaga guru)	48%					50%	
11.2.	Partisipasi angkatan kerja perempuan	93,66	93,89	94,23	94,65	94,91	95,10	
12.	Keluarga berencana dan keluarga sejahtera							
12.1.	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2	2	2	2	2	2	
12.2.	Rasio akseptor KB							
12.3.	Cakupan peserta KB aktif	60%	65%	70%	73%	76%	80%	
13.	Sosial							
13.1.	PMKS yang memperoleh bantuan sosial							
14.	Ketenagakerjaan							
14.1.	Angka partisipasi angkatan kerja	64,3	66,1	68,2	70,5	73	75,5	
14.2.	Tingkat pengangguran terbuka	7%	6,6%	6,2%	5,8%	5,4%	5%	
15.	Koperasi, usaha kecil dan menengah							
15.1.	Jumlah koperasi aktif	152	159	167	174	181	190	
15.2.	Jumlah UKM							
15.3.	Jumlah BPR	5		6			9	
16.	Penanaman Modal							
16.1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/ PMA)	17					20	
16.2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/ PMA)(dalam Triliun)	3.3					5	
17.	Kebudayaan							
17.1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	1		1	2	2	2	
17.2.	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan(dalam paket)	0			1		2	
18.	Kesatuan bangsa dan Politik dalam negeri							
18.1.	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	2 kali/th	2 kali/th	2 kali/th	2 kali/th	2 kali/th	2 kali/th	
18.2.	Kegiatan pembinaan Politik daerah	2 kali/th	2 kali/th	2 kali/th	2 kali/th	2 kali/th	2 kali/th	
19.	Otonomi daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Kepegawaian							
19.1.	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	0,83	1	1,5	2	3	4	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Ket
			Thn 0	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
19.2.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	0,12		0,27			0,32	
19.3.	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	0			1		1	
20	Ketahanan Pangan							
20.1.	Regulasi ketahanan pangan (Perda/ Perkada)	0			1			
20.2.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
20.3.	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	19 nagari					19 nagari	
20.4.	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	19 nagari					19 nagari	
21	Kearsipan							
21.1.	Pengelolaan arsip secara baku	0	1	2	2	2	2	
22	Komunikasi dan Informatika							
22.1.	Jumlah jaringan komunikasi	3		4		6	7	
22.2.	Rasio wartel/warnet terhadap penduduk							
23	Perpustakaan							
23.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	12065	16000	17000	18500	19500	20000	
23.2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (judul)	5375	6500	7500	9000	10000	11500	
Pelayanan Urusan Pilihan								
1.	Pertanian							
1.1.	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	4,63	4,8	5	5,2	5,3	5,5	
1.2.	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	27,14	27,5	27,8	28,1	28,3	28,5	
1.2.	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	7,3	7,35	7,55	7,75	7,80	7,9	
1.3.	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	19,81	20,20	20,25	20,35	20,53	20,6	
2.	Kehutanan							
2.1.	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	0,25%					0,75%	
2.2.	Kerusakan Kawasan Hutan	30,87%					10%	
2.3.	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	2,27%					2,35%	
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral							
3.1.	Pertambangan tanpa ijin	66,67%					25%	

No.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Ket
			Thn 0	2011	2012	2013	2014	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.2.	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	1%					1,5%	
4.	Pariwisata							
4.1.	Kunjungan wisata	320	370	400	430	470	500	
	- Mancanegara	71200	75200	79100	83100	88000	90300	
	- Dalam negeri							
5.	Kelautan dan Perikanan							
5.1.	Produksi perikanan laut (ton)	77620	85120	90300	95400	98540	102000	
5.2.	Produksi perikanan budidaya	1154	1300	1780	2100	2370	2500	
6.	Perdagangan							
6.1.	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	25,44	25,65	25,85	25,95	26,01	26,13	
7.	Perindustrian							
7.1.	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	23,88	24,05	24,15	24,18	24,23	24,30	
ASPEK DAYA SAING DAERAH								
	Iklm berinvestasi							
1	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							
1.1.	Lama proses perijinan maksimal	150 hari					90 hari	
1.2.	Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha				1 perda		1 perda	

BAB X

PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

10.1 Pedoman Transisi RKPD Tahun 2016

RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2015 dapat digunakan sebagai pedoman transisi penyusunan dan acuan RKPD Tahun 2016. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan dan program pembangunan dapat berlanjut, karena untuk tahun 2016 pada waktu penyusunan RKPD sebagai dasar penyusunan KUA PPAS tahun 2016 sedang terjadi kekosongan karena RPJMD tahun 2011-2015 sudah habis masa berlakunya sedangkan RPJMD tahun 2016-2020 sedang dalam proses.

Untuk mengisi kekosongan pedoman perencanaan pembangunan daerah tahun 2016, dimana tahun bersangkutan pemerintah daerah sudah diharuskan menyusun RKPD Tahun 2016 sebagai pedoman dan acuan rancangan KUA APBD Tahun 2016 yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

10.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2015, merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2015 akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pasaman Barat untuk Tahun 2011, 2012, 2013, 2014, dan Tahun 2015. Sehubungan dengan ini akan ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. RPJMD Kabupaten Barat Tahun 2011-2015 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Bupati dalam kewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah;
2. Program-Program yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Pasman Barat Tahun 2011-2015 dilaksanakan secara operasional oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat yang didukung instansi vertikal yang ada di Wilayah Kabupaten Pasaman Barat, serta masyarakat termasuk dunia usaha. Oleh karena itu, SKPD Kabupaten Pasaman Barat wajib menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
3. Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2015 perlu mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRW K) Pasaman Barat agar terwujud prinsip keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.

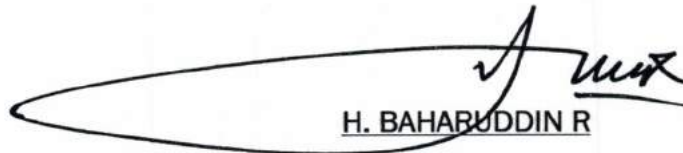
10.3 Pengendalian dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2011-2015, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pasaman Barat berkewajiban untuk melakukan pemantauan, fasilitasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015 ke dalam Rencana Strategis SKPD Kabupaten Pasaman Barat.
2. Evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2011-2015 dilakukan pada tahun ketiga dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Pasaman Barat.

Demikianlah Rancangan RPJMD Kabupaten Pasaman Barat Periode tahun 2011-2015 disusun, untuk dijadikan pedoman bagi seluruh stakeholder pembangunan.

Simpang Empat, Februari 2011

BUPATI,



H. BAHARUDDIN R